BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LKjIP

INSPEKTORAT UTAMA

2025

017/PW.09/IU/02/2026
23 Februari 2026

KATA PENGANTAR

INSPEKTUR UTAMA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 dapat disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja pengawasan intern dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu. Laporan ini menyajikan gambaran kinerja Inspektorat Utama dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh tingkatan organisasi.

Dalam dinamika penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan yang semakin kompleks, Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk terus bertransformasi menjadi fungsi pengawasan yang adaptif, bernilai tambah, dan berorientasi pada pencegahan. Penguatan peran APIP merupakan faktor kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan integritas, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan pengawasan intern Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan, penguatan pengendalian intern, serta perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Bawaslu.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern di lingkungan Bawaslu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran dan pengambilan keputusan strategis dalam rangka penguatan peran dan kapabilitas APIP serta peningkatan kualitas tata kelola Bawaslu secara berkelanjutan.

Jakarta, 23 Februari 2026

Rini Wartini, Ak., M.M., CA., CRMP, CSEP, CFrA, CGCAE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja *outcome* Inspektorat Utama Tahun 2025 diukur melalui 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Utama. Dari seluruh indikator tersebut, sebanyak 5 (lima) IKU telah mencapai target 100 persen dan 4 (empat) IKU belum mencapai target yang ditetapkan. Penjelasan sebagai berikut.

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern			
Indikator Sasaran Strategis : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82	N/A	N/A
Sasaran Program : Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien, dan efektif			
Indikator Sasaran Program:			
• Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	100%	95,65%	95,65%
• Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu	75	71,90	95,87%
• Survei Penilaian Integritas	85	73,90	86,94%
• Level Kapabilitas APIP	3	2,37	79%
• Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	100%	100%	100%
• Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal	100%	100%	100%
• Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3,8	3,81	100%
• Skor Maturitas Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP	3,3	3,90	100%
• Indeks Pelayanan Publik	3,5	3,9	100%
Rata-rata			**95,27%**

Terhadap 4 (empat) IKU yang belum mencapai target, Inspektorat Utama telah melakukan upaya perbaikan melalui penyampaian rekomendasi strategis hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 kepada Biro Perencanaan dan Organisasi, hasil pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Reformasi Birokrasi, serta hasil penguatan pendampingan dan integritas melalui sosialisasi gratifikasi dan pembangunan serta pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK).

Dari sisi perencanaan anggaran, Inspektorat Utama Bawaslu mengampu 1 (satu) Program Dukungan Manajemen dengan Pagu Awal tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) sebesar Rp10.358.325.000,00 dengan target 282 *output*. Namun, sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, anggaran Inspektorat Utama mengalami pengurangan signifikan sebesar Rp8.923.373.000,00 sehingga menjadi Rp1.434.952.000,00 tanpa disertai penyesuaian target *output*. Dalam perjalanannya, Inspektorat Utama memperoleh beberapa kali penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan antara lain pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp450.000.000,00 dan penambahan anggaran lainnya sebesar Rp1.850.483.000,00 sehingga total pagu anggaran menjadi Rp3.735.435.000,00 (Rp10.358.325.000,00 - Rp8.923.373.000,00 + Rp450.000.000,00 + Rp1.850.483.000,00). Berdasarkan data aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025, realisasi anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 sebesar Rp3.707.353.373,00 atau mencapai 99,25 persen dari pagu anggaran terakhir yang ditetapkan, dengan realisasi *output* mencapai 100 persen dari target *output* sebagaimana Renja, rincian sebagai berikut.

Unit Kerja	Pagu Awal Anggaran	Penyesuaian Pagu	Pagu Revisi Terakhir	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Target *Output*	Capaian *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5:4)	(7)	(8)
115.01.WA.4355. Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal							
Inspektorat Utama	9.000.000.000	6.108.348.000	2.891.652.000	2.866.518.402	99,13%	261	100%
115.01.WA.6849. dan 6850. Layanan Dukungan Manajemen Internal							
Tata Usaha	1.358.325.000	514.542.000	843.783.000	840.834.971	99,65%	21	100%
Total	**10.358.325.000**	**6.622.890.000**	**3.735.435.000**	**3.707.353.373**	**99,25%**	**282**	**100%**

Realisasi *output* Inspektorat Utama per 31 Desember 2025 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) telah mencapai 100 persen. Selain berdasarkan Renja, realisasi *output* juga diukur melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan kegiatan Non-PKPT. Meskipun sama-sama mengukur realisasi *output* pengawasan, jumlah target dalam PKPT lebih besar dibandingkan dengan target *output* dalam Renja. Selama Tahun 2025, selain merealisasikan seluruh target *output* Renja sebanyak 282 laporan, Inspektorat Utama juga telah merealisasikan *output* PKPT sebanyak 488 laporan serta 9 laporan Non PKPT, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan Pengawasan	Target *Output*		Realisasi *Output*		Realisasi Non PKPT	Capaian (%)
		Renja	PKPT	Renja	PKPT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Inspektorat Utama							
1	101. Audit Internal	28	28	28	28	0	100
2	102. Reviu	68	200	68	200	0	100
3	103. Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal	165	260	165	260	9	100
I	**Jumlah**	**261**	**488**	**261**	**488**	**9**	**100**
Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama							
1	Layanan Dukungan Manajemen Intenal	21	-	21	-	-	100
II	**Jumlah**	**21**	**-**	**21**	**-**	**-**	**-**
Grand Total (I+II)		**282**	**488**	**282**	**488**	**9**	**100**

Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 berdasarkan Renja dan PKPT telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Beberapa indikator *outcome* yang belum mencapai target dipengaruhi faktor lintas unit, memerlukan perbaikan berkelanjutan, dan faktor eksternal.

Dalam kondisi keterbatasan anggaran dampak efisiensi belanja pemerintah, Inspektorat Utama tetap mengoptimalkan fungsi pengawasan internal untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di lingkungan Bawaslu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
RINGKASAN EKSEKUTIF		**ii**
DAFTAR ISI		**v**
BAB I PENDAHULUAN		**1**
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		**18**
A.	RPJMN TAHUN 2025 s.d. 2029	19
B.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PADA RENSTRA BAWASLU TAHUN 2025 S.D. 2029	21
C.	VISI, MISI, INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN TARGET KINERJA INSPEKTORAT UTAMA	26
D.	PAGU ALOKASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TA 2025	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		**39**
A.	CAPAIAN KINERJA	40
B.	CAPAIAN KEUANGAN	81
BAB IV PENUTUP		84
LAMPIRAN		**88**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

INSPEKTORAT UTAMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Bawaslu, Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bawaslu.

Dinamika penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan yang semakin kompleks, termasuk tingginya ekspektasi publik terhadap integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, menuntut penguatan peran APIP yang adaptif, profesional, dan bernilai tambah. Tantangan tersebut tidak hanya terkait dengan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mencakup efektivitas kinerja, pengelolaan risiko strategis dan operasional, serta pencegahan terjadinya penyimpangan dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Tahun 2025 merupakan periode strategis bagi Inspektorat Utama dalam mengoptimalkan perannya sebagai mitra strategis pimpinan (*trusted advisor*) melalui pengawasan intern yang berbasis risiko, berorientasi pada pencegahan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk memperkuat kualitas pengendalian intern, meningkatkan maturitas manajemen risiko dan SPIP terintegrasi, serta mendorong peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan kerja di lingkungan Bawaslu.

Sejalan dengan upaya tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Tahun 2025 merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja pengawasan intern, tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam rangka penguatan peran dan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis pimpinan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern di lingkungan Bawaslu guna mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, profesional, dan terpercaya.

B. Kedudukan, Tujuan, Tugas dan Fungsi, serta Wewenang dan Tanggung Jawab Inspektorat Utama

1. Kedudukan

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi dasar terbentuknya Instansi Bawaslu. Kedua peraturan tersebut diterbitkan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan yang lebih besar dan kompleks mengenai keberhasilan demokrasi penyelenggaraan pemilu.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum diamanatkan untuk membentuk struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk mendukung terwujudnya demokrasi, maka dibentuk struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Inspektorat Utama sebagai APIP Bawaslu merupakan unsur pengawasan yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama dan terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, dan Bagian Tata Usaha.



2. Tugas dan Fungsi

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pengawasan intern di Bawaslu bertujuan untuk menilai, mengevaluasi, dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, menyatakan dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Utama memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan teknis pengawasan intern sebagaimana tercantum dalam fungsi-fungsi Inspektorat Utama sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

3. Wewenang dan Tanggung Jawab

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, berdasarkan Piagam Audit Intern yang ditetapkan sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 133/PW.00/K1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024, Inspektorat Utama memiliki kewenangan untuk:

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil baik berbentuk fisik maupun digital yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan internal dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan opini atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara keseluruhan;
d. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan melakukan komunikasi/konsultansi dengan Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal dan berkoordinasi dengan jajaran pimpinan lainnya;
e. Memiliki wewenang untuk hadir dalam rapat manajemen terkait lingkup kegiatan pengawasan intern;

f. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
h. Memperoleh masukan perbaikan kualitas hasil pengawasan dari jajaran Pimpinan Bawaslu dan para *stakeholder* terhadap kegiatan Inspektorat Utama;
i. Mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan jumlah dan mutu SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP.



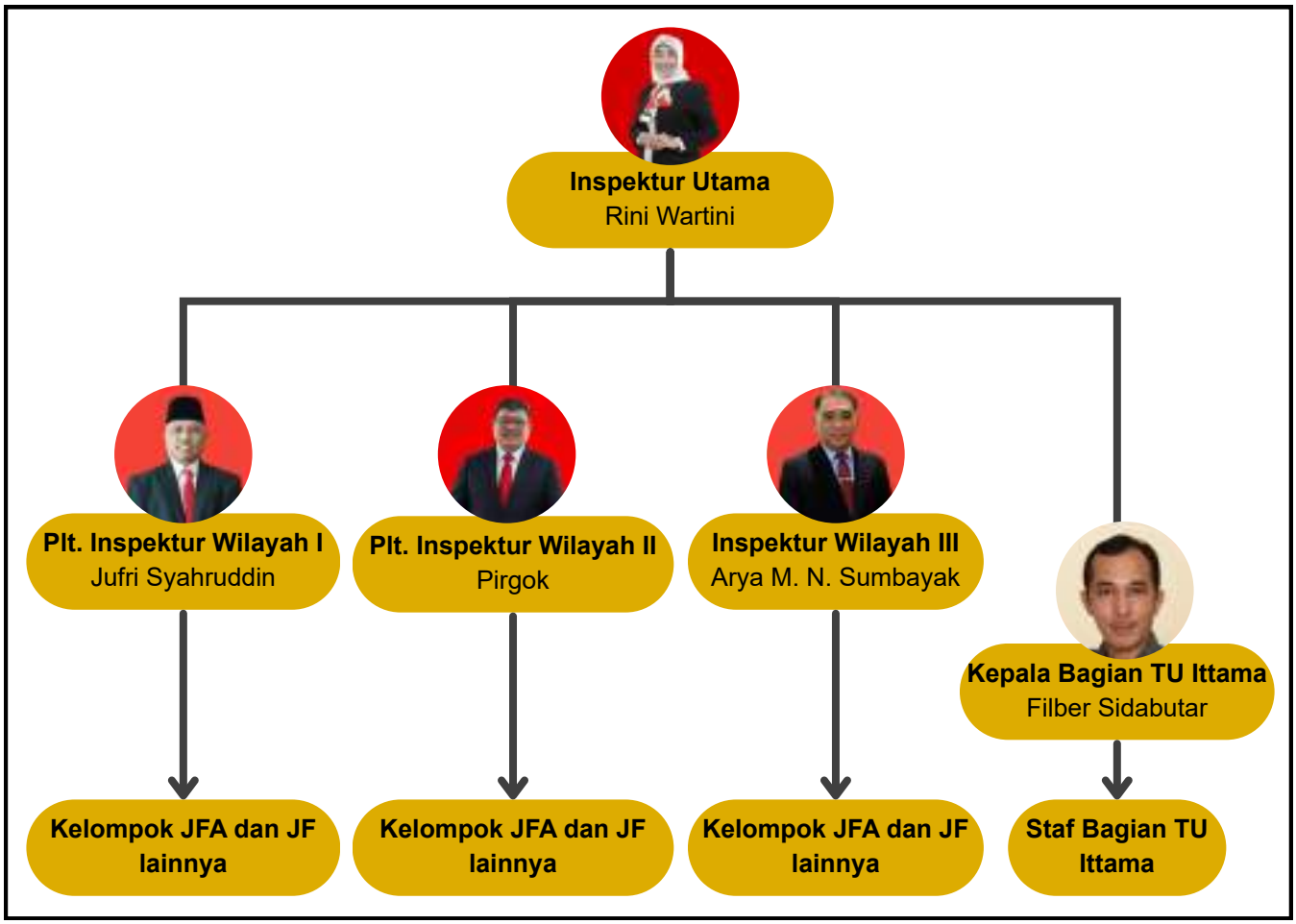
Kemudian, berdasarkan Piagam Audit Intern yang ditetapkan sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 133/PW.00/K1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk:

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan internal, dan kualitas hasil pengawasan internal dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR), khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan. PKPTBR disetujui dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. Mengelola ketersediaan sumber daya secara efektif dan efisien sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan internal kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal dan jajaran manajemen auditi secara berkala atas aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, struktur organisasi Eselon I Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Utama memiliki 3 (tiga) Inspektorat Wilayah yaitu Inspektorat Wilayah I, II, dan III yang masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional auditor dan kelompok jabatan fungsional lainnya, serta Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Utama.

D. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

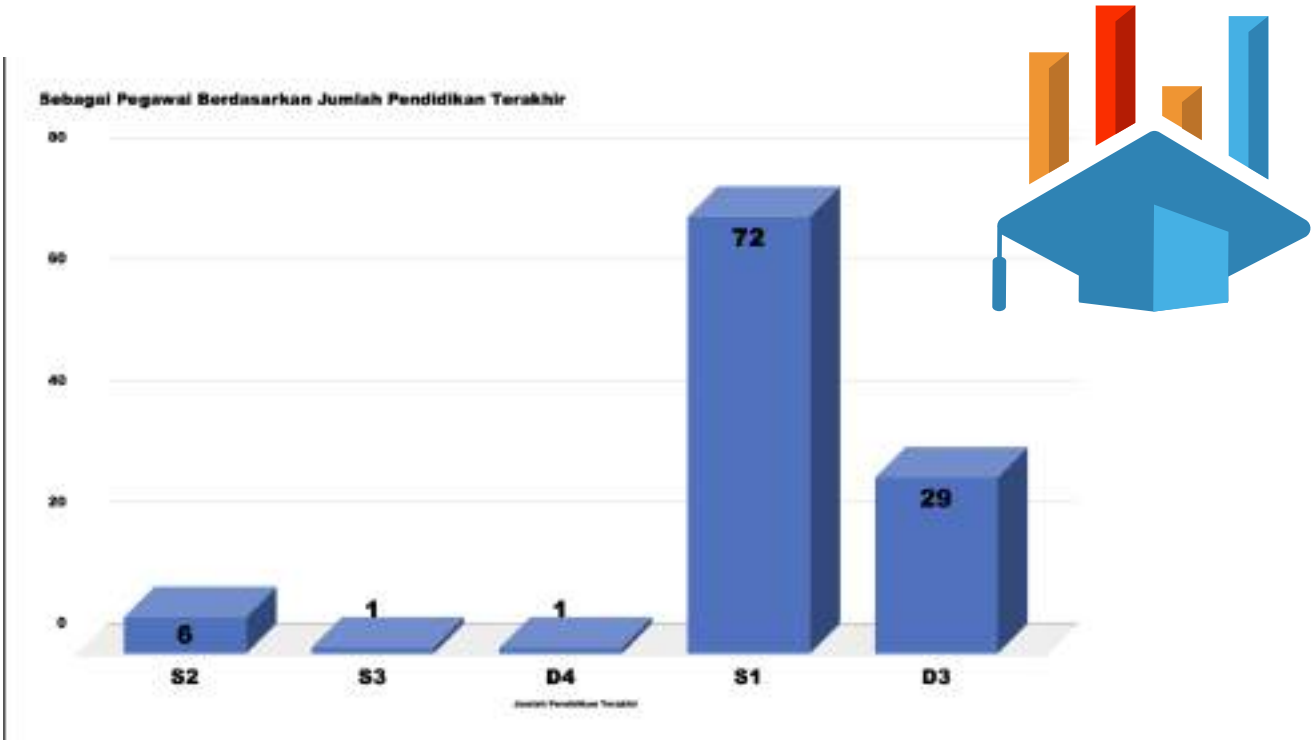
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 109 pegawai. Komposisi pegawai pada Inspektorat Utama per 31 Desember 2025 dirincikan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
Jabatan Struktural		
1.	Inspektur Utama	1
2.	Inspektur Wilayah	3
3.	Kepala Bagian Tata Usaha	1
Jabatan Fungsional Pegawai		
4.	JFA Ahli Madya	1
5.	JFA Ahli Muda	4
6.	JFA Ahli Pertama	17
7.	JFA Terampil	30
8.	JFA Lainnya	7
9.	CPNS	45
Jumlah		**109**

Jumlah sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Utama Bawaslu per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 109 orang, yang terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional lainnya, dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu, terdapat 1 (satu) orang JFA Ahli Madya pada Inspektorat Wilayah I atas nama Pirgok yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Wilayah II. Jumlah SDM tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya rekrutmen CPNS sebanyak 45 orang, yang terdiri atas 39 formasi JFA Ahli Pertama, 3 (tiga) formasi JFA Terampil, dan 3 (tiga) formasi Jabatan Fungsional lainnya. Disamping itu, perubahan komposisi SDM juga dipengaruhi oleh pergeseran pegawai melalui mekanisme rotasi, mutasi, dan pemberhentian sementara pada Inspektorat Wilayah dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

Berikut ini komposisi SDM yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan unit kerja.







Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5967/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperoleh persetujuan atas rincian kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Bawaslu. Salah satu jabatan fungsional yang memperoleh persetujuan tersebut adalah Jabatan Fungsional Auditor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenjang Jabatan	Persetujuan Kebutuhan JFA	JFA Existing	Gap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1	Ahli Madya	12	2	10
2	Ahli Muda	36	4	32
3	Ahli Pertama	68	56	12
4	Penyelia	0	0	0
5	Mahir	4	0	4
6	Terampil	36	33	3
Total		**156**	**95**	**61**

Masih terdapat *gap* jumlah JFA sebanyak 61 orang, terhadap gap tersebut akan dilakukan pengusulan pemenuhan kebutuhan formasi JFA ke Biro SDM dan Umum. Kemudian, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan pada SDM APIP, rincian sebagaimana lampiran 2. Meskipun telah dilakukan peningkatan kompetensi, belum seluruh auditor memperoleh jumlah Jam Pelatihan (JP) minimal 20 JP per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan pengembangan kompetensi auditor secara merata masih memerlukan penguatan perencanaan dan pengelolaan pelatihan agar selaras dengan kebutuhan jabatan dan standar kompetensi yang ditetapkan.



E. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama didukung oleh sumber daya berupa sarana dan prasarana yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 550 unit. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Jenis Barang	Jumlah Unit	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3050102007	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	9	Baik
3	3050104002	Lemari Kayu	83	Baik
4	3050104005	Filing Cabinet Besi	6	Baik
5	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	3	Baik
6	3050105015	Alat Penghancur Kertas	3	Baik
7	3050105017	Mesin Absensi	1	Baik
8	3050201002	Meja Kerja Kayu	30	Baik
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	143	Baik
10	3050201005	Sice	1	Baik
11	3050201008	Meja Rapat	3	Baik
12	3050201011	Tempat Tidur Kayu	1	Baik
13	3050201014	Meja Resepsionis	1	Baik

No	Kode Barang	Jenis Barang	Jumlah Unit	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	3050201016	Kasur/Spring Bed	4	Baik
15	3050201019	Meja Makan Kayu	4	Baik
16	3050201020	Kursi Fiberglass/Plastik	14	Baik
17	3050201028	*Workstation*	61	Baik
18	3050201033	Sofa	8	Baik
19	3050203005	*Air Cleaner*	3	Baik
20	3050204001	Lemari Es	2	Baik
21	3050206002	Televisi	8	Baik
22	3050206007	*Loudspeaker*	1	Baik
23	3050206008	*Sound System*	2	Baik
24	3050206016	*Mic Conference*	16	Baik
25	3050206036	Dispenser	5	Baik
26	3050206045	*Coffee Maker*	3	Baik
27	3060102015	*Video Mixer*	1	Baik
28	3060102132	*Video Conference*	3	Baik
29	3060102165	*Camera Conference*	3	Baik
30	3100102001	P.C Unit	7	Baik
31	3100102003	*Note Book*	76	Baik
32	3100102009	Tablet PC	1	Baik
33	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	13 Baik dan 5 Rusak Ringan
34	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	Baik
35	3100204002	*Router*	1	Baik
36	3100204003	Hub	1	Baik
37	3100204014	*Rak Server*	1	Baik
38	3100204023	Wireless Access Point	10	Baik
Total			**550**	

Sumber data: Data BMN Inspektorat Utama tahun 2025

F. Peran Strategis

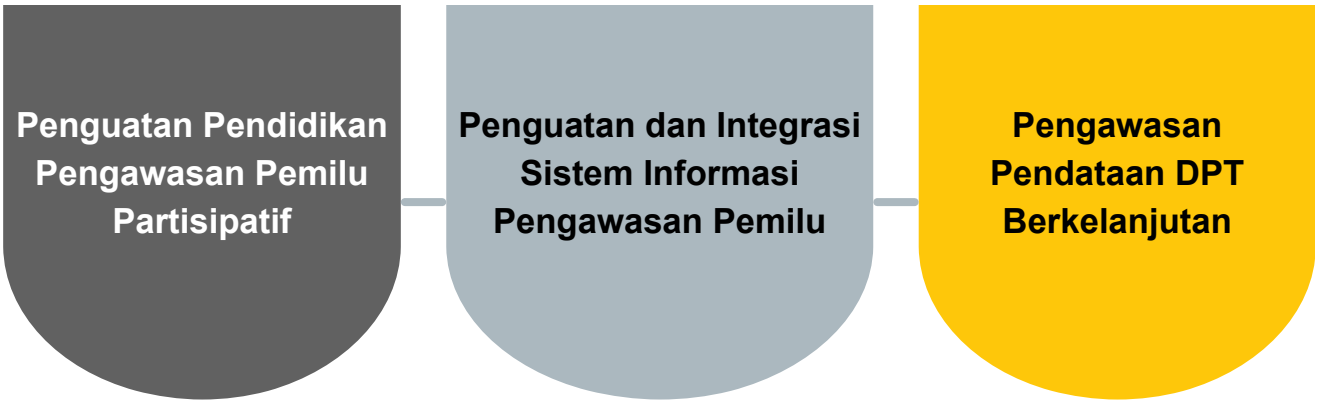
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 11 dijelaskan bahwa perwujudan APIP yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 dijelaskan bahwa APIP Kementerian Negara/Lembaga melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Penjelasan pada dua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Utama Bawaslu memiliki peran strategis dalam pengawasan serta mengedepankan pencegahan sebagai langkah peringatan dini (*early warning system*) terhadap terjadinya penyimpangan untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Bawaslu.

G. Isu Strategis Pengawasan Intern

Berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 30/PW.09/K1/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Bawaslu Tahun 2025, isu strategis pengawasan intern terkait dengan Kegiatan Prioritas Nasional Bawaslu Tahun 2025 sampai dengan 2029 yang dapat disampaikan sebagai berikut:



Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh lapisan masyarakat dalam berkontribusi dan berpartisipasi dalam Pemilu. Pendidikan pengawasan Pemilu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pemilu agar bersifat inklusif, adil, dan representatif secara berkelanjutan.	Peningkatan kualitas sistem informasi pengawasan Pemilu akan dilakukan secara paralel dengan peningkatan kapasitas SDM pengembang sistem informasi pengawasan Pemilu. Kedua hal ini bertujuan untuk memastikan keandalan sistem aplikasi penyelenggaraan Pemilu agar keamanan data terkait penanganan sengketa dan pelanggaran Pemilu dapat terjaga dengan baik, serta memastikan bahwa SDM yang berkaitan langsung dengan aspek teknis tersebut memiliki kemampuan yang komprehensif.	Permasalahan terkait DPT merupakan isu yang terus muncul dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kegiatan ini dalam jangka panjang diharapkan dapat berdampak pada tercapainya akurasi data pemilih, keadilan, dan kredibilitas Pemilu, yang merupakan esensi dari penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, serta memastikan kepastian partisipasi seluruh warga negara dan mengurangi potensi kecurangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pendataan DPT dilakukan pemutakhiran berkelanjutan sebelum Pemilu dilaksanakan.

H. Fokus, Tema, dan Strategi Pengawasan

Fokus dan strategi pengawasan pada Tahun 2025 merujuk pada Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Bawaslu, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 untuk mencapai target indikator kinerja Inspektorat Utama. Sebagai "*Trusted Advisor*", APIP Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang melakukan audit, evaluasi, dan pengawasan administratif. Lebih dari itu, APIP harus menjadi mitra strategis bagi pimpinan dan jajaran Bawaslu dalam pengambilan keputusan, memberikan masukan berbasis bukti yang objektif, dan membantu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dibentuklah lima fokus pengawasan Inspektorat Utama pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Fokus Pengawasan Keuangan dan Kinerja Bawaslu:
Audit Operasional, Audit Kinerja, dan Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan APBN serta Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan dan Non Pemilihan.

Fokus Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, serta Aspek Terkait Lainnya.

Fokus Pengawasan Intern untuk Pengungkit Penguatan Reformasi Birokrasi.

Fokus Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan.

Fokus Layanan Permintaan Manajemen.

Terhadap lima fokus pengawasan Inspektorat Utama di Tahun 2025 karena adanya penurunan anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan sehingga merubah metode penugasan menjadi gabungan antara metode pengawasan jarak jauh dan metode pengawasan langsung di lapangan. Fokus pengawasan tersebut diturunkan menjadi Tema Pengawasan dan Strategi Pengawasan, sebagai berikut:

Fokus	Tema Pengawasan	Strategi Pengawasan
(1)	(2)	(3)
Fokus 1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Bawaslu: Audit Operasional, Audit Kinerja, dan Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan APBN serta Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Bawaslu dalam Mendukung Prioritas Nasional, Pengelolaan APBN, serta Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan dan Hibah Non Pemilihan.	Audit Operasional, Audit Kinerja, Audit Tujuan Tertentu termasuk Audit SPBE Bawaslu.
Fokus 2: Fokus Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, serta Aspek Terkait Lainnya	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja, Perencanaan Anggaran dan Barang Milik Negara, serta Pengadaan Barang/Jasa	Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran, Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, Reviu Pengadaan Barang/Jasa, Reviu Lainnya.

Fokus	Tema Pengawasan	Strategi Pengawasan
(1)	(2)	(3)
Fokus 3: Fokus Pengawasan Intern untuk Pengungkit Penguatan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Pengungkit Reformasi Birokrasi	*Monitoring* Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), *Monitoring* Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN), *Monitoring* SPAN Lapor, *Whistleblowing system*, Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan Pengaduan Lainnya, *Monitoring* Survei Penilaian Integritas (e-SPI), *Monitoring* Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK), *Monitoring* capaian PBJ P3DN, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, Konsultasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Konsultasi Manajemen Risiko Pengawasan Lainnya sesuai kebutuhan.
Fokus 4: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Memastikan tercapainya efektivitas dan nilai tambah rekomendasi hasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APIP	*Monitoring* tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, serta APIP. Penyusunan Kebijakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pengelompokan status tindak lanjut.
Fokus 5: Fokus Layanan Atas Permintaan Manajemen	Layanan atas permintaan manajemen	Peningkatan kapasitas SDM, Laporan Ikhtisar Pengawasan, Laporan Kinerja, Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, Penilaian Mandiri SPIP Inspektorat, Telaah Sejawat, Telaah kasus dan permasalahan, Pengembangan dan implementasi SIMWAS APIP, Permintaan layanan manajemen lainnya.

I. Produk Layanan Pengawasan Internal

Sepanjang Tahun 2025, Inspektorat Utama telah merumuskan dan menetapkan sebanyak 18 kebijakan internal pengawasan intern yang dituangkan dalam bentuk produk hukum sebagaimana terlampir dalam lampiran 3. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk memenuhi standar pengawasan intern serta sebagai bagian dari evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

J. Kesesuaian dengan Kode Etik dan Standar

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan berpedoman pada kode etik dan standar pengawasan intern yang berlaku. Seluruh kegiatan pengawasan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, independensi, kerahasiaan, dan kompetensi sebagai nilai dasar APIP.

Dalam penerapannya, Inspektorat Utama telah menerapkan standar pengawasan intern secara konsisten pada setiap tahapan penugasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Mekanisme pengendalian mutu dan reviu berjenjang diterapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan memenuhi standar profesional, berbasis risiko, serta memberikan keyakinan yang memadai dan nilai tambah bagi organisasi.

Selain itu, Inspektorat Utama memastikan bahwa seluruh auditor dan pengawas internal mematuhi ketentuan kode etik APIP dan standar profesi yang berlaku, termasuk pengelolaan konflik kepentingan, pemeliharaan independensi, serta peningkatan kompetensi berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan intern Tahun 2025 dinilai telah selaras dengan kode etik dan standar yang berlaku serta mendukung penguatan akuntabilitas, tata kelola, dan kepercayaan terhadap fungsi pengawasan intern di lingkungan Bawaslu.

K. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini melaporkan capaian kinerja Inspektorat Utama Bawaslu pada tahun 2025 yang diukur dan dinilai berdasarkan perjanjian kinerja Inspektur Utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat pencapaian target sebagai pertimbangan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) bab sebagaimana tersaji berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat uraian latar belakang, kedudukan, tujuan, tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, struktur organisasi, komposisi SDM, sarana prasarana, peran dan isu-isu strategis pengawasan internal, fokus, tema, dan strategi pengawasan, produk layanan, kesesuaian dengan kode etik dan standar, serta sistematika laporan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja, memuat rencana dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2025 s.d. 2029, Renstra Bawaslu tahun 2025 s.d. 2029, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Utama tahun 2025, dan Pagu Alokasi Anggaran.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat analisis dan evaluasi atas pencapaian target kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan analisis atas kinerja anggaran.
4. Bab IV Penutup, memuat kesimpulan, tantangan, dan upaya perbaikan pada tahun berikutnya.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029

1. Sasaran Pembangunan Tahun 2025 s.d. 2029

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025–2029 berpedoman pada Asta Cita Presiden yang memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan strategis pemerintah. Dalam kerangka tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengampu Prioritas Nasional ke-1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prioritas Nasional ke-7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan".

Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prioritas Nasional ke-1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)				
Sasaran: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia				
Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79,51	81,69 - 85,23	83,42 - 86,96	Penguatan lembaga demokrasi, Penguatan kesetaraan masyarakat sipilArah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.
Prioritas Nasional ke-7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan				
Sasaran: Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional				
Indikator: Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00 - 64,99	71,00 - 72,99	Reformasi politik dan tata kelola pemilu diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Sumber: Ringkasan RPJMN 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

2. Program Prioritas Bawaslu

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, Bawaslu berperan pada 2 (dua) Program Prioritas (PP) yaitu Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik, penjelasan pada tabel berikut:

Prioritas Nasional ke-1	**Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**				
Indikator	**Indeks Demokrasi Indonesia**				
Program Prioritas -3	**Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.**				
Indikator Kegiatan Prioritas (IKP)	**Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel.**				
Baseline 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
0%	0%	0%	90%	95%	100
Program Prioritas -4	**Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.**				
Indikator Kegiatan Prioritas (IKP)	**Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif.**				
Baseline 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
900 orang	16.590 orang	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang

Kemudian, dalam rangka mendukung Prioritas Nasional ke-7, Bawaslu berperan pada 1 (satu) Program Prioritas (PP) yaitu Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan 2 (dua) Kegiatan Prioritas yaitu Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu (IKP3) dan Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu (IKP 4), penjelasan pada tabel berikut:



Prioritas Nasional ke-7	**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**					
Indikator	**Indeks Integritas Partai Politik**					
Program Prioritas -1	**Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas, dengan Kegiatan Prioritas Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu (IKP3) dan Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu (IKP 4)**					
Indikator Kegiatan Prioritas (IKP3)	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.**					
Baseline 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
76,96	0	0	77	80	83	
Indikator Kegiatan Prioritas (IKP4)	**Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan**					
Baseline 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
-	**80%**	**85%**	**90%**	**92%**	**95%**	

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Bawaslu Tahun 2025 s.d. 2029

1. Visi dan Misi

VISI

Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

MISI

- Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan.
- Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil.
- Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

Penjelasan Visi:

Demokrasi substansial ditandai oleh terselenggaranya proses pengisian jabatan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berlangsung secara kompetitif, jujur, dan adil. Upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan antar-lembaga negara. Dalam kerangka tersebut, Bawaslu memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas pemilu yang bertugas memastikan proses dan prosedur pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi melalui pelaksanaan fungsi pencegahan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pelaksanaan tugas tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan pemilu yang berintegritas, yang mencakup integritas kelembagaan, integritas proses, dan integritas hasil pemilu. Integritas kelembagaan mencerminkan profesionalisme dan akuntabilitas pengawas pemilu, integritas proses menjamin perlindungan hak pilih, keadilan pemilu, serta pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran, sedangkan integritas hasil memastikan kemurnian suara pemilih. Pengawasan pemilu yang berintegritas menjadi prasyarat penting dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial sebagai fondasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2. Tujuan dan Indikator Tujuan

Berdasarkan Renstra Bawaslu Tahun 2025 s.d. 2029, tidak terdapat penetapan target pada Indikator Tujuan di tahun 2025 karena tahun tersebut merupakan masa transisi pergantian Presiden dan Wakil Presiden sehingga hanya menetapkan target kinerja pada periode tahun 2026 s.d. 2029

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahunan				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	78	80	82	85

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahunan				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil	Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu	-	78	80	82	85
		Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/ organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)	-	78	80	82	85
		Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L	-	78	80	82	85
Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik	Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	-	82	83	84	85

3. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Terdapat perbedaan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis antara tahun 2025 dengan periode tahun 2026–2029. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi tahun 2025 yang merupakan masa transisi pergantian Presiden dan Wakil Presiden, sehingga penetapan sasaran strategis, indikator, dan target dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu tahun 2025 masih mengacu pada kebijakan dan kerangka perencanaan tahun 2024. Hal ini terjadi karena proses pembahasan dan penetapan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) periode 2025–2029 masih berlangsung pada saat penyusunan perencanaan tahun 2025. Berikut ini target kinerja tahun 2025 atas sasaran dan indikator sasaran strategis sebagaimana Renstra Bawaslu.



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	*Baseline* 2024	Target 2025	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	83,5	83,5	Nilai	Target Sesuai di RPJMN
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,45	75,45	Nilai	Hasil BPS - Target Kinerja Sesuai RPJMN
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Tinggi	Predikat	Dilakukan oleh Pihak ke-3. Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitasi RB
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Reformasi Birokrasi	82	82	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Berikut ini target kinerja tahun 2026 s.d. 2029 atas sasaran dan indikator sasaran strategis sebagaimana Renstra Bawaslu:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2026-2029			
		2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1- KP3).	0	77	80	83

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2026-2029			
		2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif.	70%	75%	78%	80%
	Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	70%	75%	78%	80%
	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.	70%	75%	78%	80%
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	70%	75%	78%	80%
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5%	7%	10%	15%
	Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%
	Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300
	Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85

Berikut ini target kinerja tahun 2026 s.d. 2029 atas sasaran dan indikator sasaran strategis sebagaimana Renstra Bawaslu:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2026-2029			
		2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,80	3,85	3,90	3,95
	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,50	96,00	96,50	97,00
	Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94
	Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76
	Nilai Capaian IKU	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2026-2029			
		2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3,50	3,70	4,00	4,20
	Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,80	4,00	4,20	4,50
	Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	73,85	73,90	74
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82%	85%	88%	90%
	Nilai Indeks SPBE	3,50	0	3,80	0
	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90

C. Visi, Misi, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja Inspektorat Utama

1. Visi dan Misi

VISI

Menjadi Unit Pengawasan Intern yang independen, profesional, dan berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum

MISI

- Mengoptimalkan pembangunan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Meningkatkan kualitas pengawasan kinerja dan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan mewujudkan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Mengembangkan kualitas pengawasan berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis.

Sejalan dengan arah pembangunan dan langkah strategis yang dirumuskan dalam Visi dan Misi Bawaslu, penyelenggaraan pengawasan intern perlu dilaksanakan secara optimal. Pengawasan intern yang efektif merupakan pengawasan yang dilakukan secara internal melalui pendekatan yang terencana, terstruktur, dan sistematis untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh kegiatan lembaga dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pelaksanaan pengawasan intern yang terstruktur dan sistematis tersebut, diharapkan potensi permasalahan atau penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini, rekomendasi perbaikan dapat disusun secara tepat, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dapat terjaga, sehingga Bawaslu mampu melakukan mitigasi risiko secara cepat dan mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran dan efektivitas kinerja.

2. IKU Inspektorat Utama Periode Tahun 2025

a. IKU Renstra

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai macam kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. IKU dan Target IKU Inspektorat Utama Tahun 2025 s.d. 2029 dalam Perbawaslu Nomor 3 tahun 2025 tentang Renstra Bawaslu Tahun 2025 s.d. 2029, sebagaimana tabel berikut.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025	Satuan	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Strategis ke-5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern			
Indikator Sasaran Strategis	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025	Satuan	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen	SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif			
	IKP: E.4 Persentase pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya	100	%	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang telah dilaksanakan : kegiatan pengawasan internal yang direncanakan × 100%
	IKP: E.5 Persentase penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal	100	%	Jumlah kebijakan teknis pengawasan internal yang disusun dan ditetapkan : Jumlah kebijakan teknis pengawasan internal yang direncanakan × 100%
	IKP: E.6 Persentase tercapainya indikator reformasi birokrasi inspektorat utama	100	%	Jumlah Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama yang tercapai : Jumlah seluruh indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama yang ditetapkan x 100%
	IKP: E.7 Tingkat kapabilitas APIP	3	Level	Nilai Kapabilitas APIP dari BPKP
Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama	SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu			
	IKK 4.1. Nilai evaluasi SAKIP	75	Nilai	Nilai Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN RB
	IKK 4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3,80	Indeks	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	IKK 4.3. Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	persen	Jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%

b. IKU Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diwujudkan komitmen penerima amanah yang disepakati penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dapat mewujudkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Utama tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 97/PR.00.02/SJ/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025–2029, yang terdiri atas 9 (sembilan) IKU level program dan 8 (delapan) IKU level kegiatan telah dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektur Utama Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I, II, dan III. Guna memastikan keterpaduan dan keselarasan antara sasaran kinerja, program, dan kegiatan pengawasan intern, dilakukan penambahan IKU dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Penetapan IKU ini dimaksudkan agar seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama dapat diukur secara lebih jelas, tajam, dan akuntabel, sehingga seluruh kinerja yang dilaksanakan tercermin secara utuh dan dapat dievaluasi dalam sistem akuntabilitas kinerja organisasi.

Perjanjian kinerja Inspektur Utama Tahun 2025 yang ditandatangani Inspektur Utama (pihak pertama) dan Sekretaris Jenderal Bawaslu (pihak kedua) mendukung misi ke-3 Bawaslu yaitu “Membangun Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Prima dalam Menunjang Kualitas Pengawasan Pemilu dan Pelayanan Publik”. Selama tahun 2025 Perkin tersebut mengalami 4 (empat) kali perubahan, penjelasan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja ke-1 (2 Januari 2025)

Sasaran program	Indikator S. Program	Target 2025	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	100%	10.358.325.000
	Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal	100%	
	Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	100%	
	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	3	

Perjanjian Kinerja Inspektur Utama mengalami perubahan pada tanggal 21 Februari 2025 yang disebabkan karena adanya pengurangan anggaran Inspektorat Utama dampak dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah, menjadi sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja ke-2 (21 Februari 2025)

Sasaran program	Indikator S. Program	Target 2025	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	100%	1.393.783.000
	Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal	100%	
	Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	100%	
	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	3	

b. IKU Perjanjian Kinerja

Kemudian, pada tanggal 10 Juli 2025 dilakukan perubahan kembali yang disebabkan karena adanya penambahan anggaran dampak dari kebijakan relaksasi anggaran, menjadi sebagai berikut:



Perjanjian Kinerja ke-3 (10 Juli 2025)

Sasaran program	Indikator S. Program	Target 2025	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	100%	2.884.907.000
	Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal	100%	
	Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	100%	
	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	3	

Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2025 dilakukan perubahan kembali yang disebabkan karena adanya pergantian Sekretaris Jenderal Bawaslu, perubahan anggaran, dan penajaman indikator kinerja yang sebelumnya hanya terdiri dari 4 IKU menjadi 9 IKU, sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja ke-4 (6 November 2025)

Misi ke-3	Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik		
Tujuan ke-3	**Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas**		
Sasaran Startegis	**Indikator S. Strategis**	**Target 2025**	**Cara Menghitung**
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Reformasi Birokrasi	82	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB
Sasaran program	**Indikator S. Program**	**Target 2025**	**Cara Menghitung**
Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	100%	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang telah dilaksanakan : kegiatan pengawasan internal yang direncanakan × 100%
	Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal	100%	Jumlah kebijakan teknis pengawasan internal yang disusun dan ditetapkan : Jumlah kebijakan teknis pengawasan internal yang direncanakan × 100%
	Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	100%	Jumlah Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama yang tercapai : Jumlah seluruh indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama yang ditetapkan x 100%

Sasaran program	Indikator S. Program	Target 2025	Cara Menghitung
	Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu	75	Hasil evaluasi AKIP internal Bawaslu oleh Inspektorat Wilayah I tahun 2025
	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3.8	Hasil SKM layanan Ittama tahun 2025 yang dinilai secara mandiri oleh tim SKM Ittama sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	Skor Maturitas Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP	3.3	Hasil PK atas PM SPIP Bawaslu oleh Tim PK Ittama
	Survei Penilaian Integritas	85*	Indeks SPI oleh KPK
	Indeks Pelayanan Publik	3.5	IPP dilakukan atas layanan publik Biro FPPP berdasarkan Surat Deputi Pelayanan Publik Nomor B/89/PP.00.02/2025 tanggal 28 Agustus 2025 Hal Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025 dengan hasil 3,70 (Baik) berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 3 tahun 2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2025
	Level kapabilitas APIP	3	Hasil PK atas PM Kapabilitas APIP Tahun 2025 oleh BPKP
Anggaran			**Rp3.735.435.000**

**target pada perjanjian kinerja mengikuti Memorandum Ketua Bawaslu Nomor 10/OT.05/K1/06/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Matriks Target RB Bawaslu Tahun 2025 dengan penetapan target lebih tinggi dari Renstra Bawaslu Tahun 2026 sebesar 73,8%.*

Untuk dapat mewujudkan target yang diperjanjikan tersebut, kinerja Inspektur Utama didukung kinerja Inspektur Wilayah 1, 2, dan 3, serta kinerja Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama dengan perjanjian kinerja (revisi terakhir), sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah per 6 November 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Tahun 2025	Cara Menghitung
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi Inspektorat Utama dalam mendukung pencapaian program- program di Bawaslu	Jumlah Unit Kerja yang memperoleh skor AKIP dengan Predikat BB	5 Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Skor AKIP dengan Predikat BB : Target Unit Kerja yang memperoleh Skor AKIP predikat BB x 100%
	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	100%	Realisasi Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal : Target Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal x 100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal di Unit Kerja Wilayah	3.8	Realisasi SKM Tahun 2025 pada Inspektorat Wilayah : target SKM Tahun 2025 Inspektorat Wilayah x 100%
	Jumlah Unit Kerja yang Didampingi untuk Pembangunan Manajemen Risiko dan Zona Integritas	5 Unit Kerja	Realisasi Unit Kerja Inspektorat Wilayah yang didampingi untuk Pembangunan MR dan ZI : Target Unit Kerja Inspektorat Wilayah untuk didampingi Pembangunan MR dan ZI x 100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Tahun 2025	Cara Menghitung
(1)	(2)	(3)	(4)
	Persentase Capaian Pengisian target Responden SPI KPK Inspektorat Wilayah	95%	Realisasi Persentase Capaian Pengisian target responden internal dan eksternal SPI KPK pada Mitra Kerja Inspektorat Wilayah : Target Persentase Capaian Pengisian SPI KPK pada Mitra Kerja Inspektorat Wilayah x 100%
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	3.5	Realisasi Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang telah selesai : Target Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang sudah selesai x 100%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di Unit Kerja Wilayah		
	BPK	86%	Realisasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di Inspektorat Wilayah : Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di Inspektorat Wilayah x 100%
	BPKP	65%	
	APIP	65%	
	Nilai Telaah Sejawat Internal	83	Realisasi nilai telaah sejawat internal Inspektorat Wilayah : Target nilai telaah sejawat Internal Inspektorat Wilayah x 100%

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama

Sasaran Komponen Input	Indikator S. Komponen Input	Target Tahun 2025	Cara Menghitung
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya dukungan Tata Usaha untuk kelancaran Tugas dan fungsi Inspektorat Utama yang sesuai SOP dan Sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen Administrasi Bagian Tata usaha (Perencanaan) yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi jumlah semua dokumen perencanaan yang menjadi target dikali 100
	Persentase dokumen Administrasi Bagian Tata usaha (Keuangan) yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	Jumlah Dokumen keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi jumlah semua dokumen keuangan yang menjadi target dikali 100
	Persentase dokumen Administrasi Bagian Tata usaha (Kepegawaiandan Umum) yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	Jumlah Dokumen kepegawaian dan umum yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi jumlah semua dokumen kepegawaian dan umum yang menjadi target dikali 100
Anggaran			**Rp843.783.000**

3. Rincian target kinerja berdasarkan Renja

Berdasarkan tujuan, sasaran, dan target kinerja yang ditetapkan, pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, sasaran tersebut dirumuskan secara tahunan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan diimplementasikan melalui rangkaian program dan kegiatan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 282 laporan, rincian sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/RO/ Komponen Input	Target Pengajuan Awal	Target Pengusulan Baru	Jumlah *Output* per Itwil	Rincian *Output* per Itwil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115.WA. Program Dukungan Manajemen				
4355.EBD.965. Layanan Audit Internal				
101. Audit Internal	45 Laporan	28 Laporan	8 Laporan	Wilayah I: 4 Laporan Audit Operasional 2 Laporan Audit Kinerja 1 Laporan Audit Tujuan Tertentu 1 Laporan Audit TIK/SPBE
			8 Laporan	Wilayah II: 4 Laporan Audit Operasional 2 Laporan Audit Kinerja 1 Laporan Audit Tujuan Tertentu 1 Laporan Audit TIK/SPBE
			12 Laporan	Wilayah III: 8 Laporan Audit Operasional 2 Laporan Audit Kinerja 1 Laporan Audit Tujuan Tertentu 1 Laporan Audit TIK/SPBE
102. Reviu Kinerja	99 Laporan	68 Laporan	23 Laporan	Wilayah I: 2 Laporan Reviu RKA 4 Laporan Reviu LK 12 Laporan Reviu LKjIP 1 Laporan Reviu RKBMN 4 Laporan Reviu PBJ
			20 Laporan	Wilayah II: 1 Laporan Reviu RKA 1 Laporan Reviu LK 13 Laporan Reviu LKjIP 1 Laporan Reviu RKBMN 4 Laporan Reviu PBJ
			25 Laporan	Wilayah III: 4 Laporan Reviu PBJ 2 Laporan Revi LK 2 Laporan Reviu RKA (Revisi dan 2026) 13 Laporan Reviu LKjIP 1 Laporan Reviu RKBMN 3 Laporan Reviu Tematik

Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/RO/ Komponen Input	Target Pengajuan Awal	Target Pengusulan Baru	Jumlah *Output* per Itwil	Rincian *Output* per Itwil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
103. Pemeriksaan, Pembinaan, dan Pengawasan Internal	237 Laporan	165 Laporan	56	Wilayah I: 2 Laporan Ikhtisar Pengawasan 1 Laporan LKjIP 1 Dokumen RR dan RPR 1 Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 4 Laporan progress Stranas PK 1 Laporan Telaah Sejawat 3 Laporan *monitoring* SP4N Lapor, WBS, BP,PP, dan Gratifikasi 4 Laporan Monitoring TL Hasil Pemeriksaan 13 Laporan *Monitoring* LHKAN 12 Laporan Evaluasi AKIP 4 Laporan *Monitoring* RB dan ZI 2 Laporan Penilaian Mandiri atas Penilaian SPIP dan Penjaminan Kualitas SPIP 7 Pengawasan lainnya Tematik 1 Laporan Pembinaan Penguatan e-SPI
			59	Wilayah II: 2 Laporan Ikhtisar Pengawasan Itwil 2 2 laporan ikhtisar pengawasan Ittama 1 Laporan LKjIP Itwil 2 1 Laporan LKjIP Ittama 1 Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 1 Laporan progress Stranas PK 1 Laporan Telaah Sejawat 2 Laporan *monitoring* WBS, BP,PP, dan Gratifikasi 2 Laporan Monev MR 4 Laporan *Monitoring* TL Hasil Pemeriksaan 2 Laporan *monitoring* SP4N Lapor 13 Laporan Monitoring LHKAN 13 Laporan Evaluasi AKIP 4 Laporan *Monitoring* RB dan ZI 2 Laporan Pendampingan Penilaian SPIP 7 Pengawasan lainnya Tematik 1 Laporan Pembinaan Penguatan e-SPI
			50	Wilayah III: 2 Dokumen NSPK 2 Laporan Ikhtisar Pengawasan 1 Laporan LKjIP 1 Dokumen RR dan RPR 1 Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 4 Laporan progress Stranas PK 1 Laporan Telaah Sejawat 1 Laporan *monitoring* WBS, BP,PP, dan Gratifikasi 12 Laporan *Monitoring* TL Hasil Pemeriksaan 1 Laporan *monitoring* SP4N lapor 1 Laporan *Monitoring* LHKAN 12 Laporan Evaluasi AKIP 1 Laporan *Monitoring* RB dan ZI 1 Laporan Pendampingan Penilaian Mandiri atas Penilaian SPIP 1 Laporan SA SPIP 2 Laporan Pendampingan BPK 6 Pengawasan lainnya Tematik
Total (I)	**381 Laporan**	**261 Laporan**	**261 Laporan**	

Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/RO/ Komponen Input	Target Pengajuan Awal	Target Pengusulan Baru	Jumlah *Output* per Itwil	Rincian *Output* per Itwil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6850.EBALayanan Dukungan Manajemen Internal				
6850.EBA.962Layanan Umum				
Koordinasi data dan Informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum lingkup Inspektorat Utama	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	12 Laporan Bulanan e-Monev 4 Laporan Keuangan dan Kinerja Triwulanan 2 Laporan Kepegawaian dan Umum Semesteran 1 Perjanjian Kinerja 1 Laporan Kinerja Inspektorat Utama
Total (II)	**20 Laporan**	**20 Laporan**	**20 Laporan**	
4355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal				
4355.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja				
Indeks Kepuasan Pelayanan pengawasan Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan Indeks Kepuasan Pelayanan pengawasan Internal
Total (III)	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	
Total (IV=I+II+III+IV)	**402**	**282**	**282**	

4. Rincian target kinerja berdasarkan PKPT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama tidak hanya menyusun perencanaan kinerja melalui penetapan target dalam Rencana Kerja (Renja), tetapi juga menerapkan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Target yang ditetapkan dalam PKPT sebesar 488 laporan hasil pengawasan atau lebih tinggi 86,97 persen dibandingkan dengan target *output* Renja, yang menunjukkan bahwa Inspektorat Utama menetapkan sasaran pengawasan yang lebih responsif terhadap potensi permasalahan. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan intern tidak hanya berfokus pada pemenuhan target perencanaan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dampak yang lebih nyata dalam penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Bawaslu.

Program/Kegiatan	Ruang Lingkup (Tahun)	Target *Output* (Laporan)
(1)	(2)	(3)
Audit Internal		
Audit Operasional	2025	17
Audit Kinerja	2025	6
Audit SPBE	2025	3
Audit Dengan Tujuan Tertentu	2025	2
Jumlah (I)		**28**
Reviu Kinerja		
Reviu RKA	2025 dan 2026	64
Reviu LK	2024 dan 2025	28
Reviu LKjIP	2024	38
Reviu RKBMN	2027	3
Reviu PBJ	2025	13
Reviu Tematik	2025 dan 2026	44
Reviu Lainnya	2025	10
Jumlah (II)		**200**
Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal		
Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2025 dan 2026	8
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	2024	4
Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko	2025	2
Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	2025	4
Progres Stranas PK	2025	13
Telaah Sejawat	2025	3
Monitoring SP4N Lapor, WBS, BP, PP, dan Gratifikasi	2025	11
Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	2025	35
Monitoring LHKAN	2024	30
Evaluasi AKIP	2025	41
Monitoring RB dan ZI	2025	17
Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko	2025	2
Pendampingan BPK	2025	2
Pendampingan PM atas Penilaian SPIP	2025	3
Penilaian Mandiri atas Penilaian SPIP	2025	3

Program/Kegiatan	Ruang Lingkup (Tahun)	Target *Output* (Laporan)
(1)	(2)	(3)
Penjaminan Kualitas atas SA SPIP	2025	1
Pengawasan Lainnya Tematik	2025	77
Pembinaan Penguatan Survei Penilaian Integritas (e-SPI)	2025	2
Dokumen NSPK (Kebijakan Pengawasan Internal dan PKPT)	2025	2
Jumlah (II)		**260**
GRAND TOTAL		**488**

D. Alokasi Anggaran Inspektorat Utama TA 2025

Berdasarkan data aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025, realisasi anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 sebesar Rp3.707.353.373,00 atau mencapai 99,25 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2025 sebesar Rp3.735.435.000,00, rincian sebagai berikut.

Program/Kegiatan/KRO/RO/ Komponen Input	Pagu Anggaran Awal	Efisiensi Belanja	Relaksasi Anggaran	Alokasi Pagu Terakhir	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
WA.4355.EBD.965. Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal,Layanan Audit Internal						
Inspektorat Utama	9.000.000.000	7.758.831.000	1.650.483.000	2.891.652.000	2.866.518.402	99,13
WA.6849.EBA.994 dan WA.6850.EBA.962 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan UmumPengelolaan Organisasi Dan SDM						
Bagian Tata Usaha	1.358.325.000	1.164.542.000	650.000.000	843.783.000	840.834.971	99,65
Total Inspektorat Utama	**10.358.325.000**	**8.923.373.000**	**2.300.483.000**	**3.735.435.000**	**3.707.353.373**	**99.25**

Inspektorat Utama Bawaslu melaksanakan 1 (satu) Program Dukungan Manajemen dengan pagu awal tahun 2025 sesuai Renja sebesar Rp10.358.325.000,00 dengan target 282 *output*. Namun, sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, anggaran Inspektorat Utama mengalami pengurangan signifikan sebesar Rp8.923.373.000,00 sehingga menjadi Rp1.434.952.000,00 tanpa disertai penyesuaian target *output*. Dalam perjalanannya, Inspektorat Utama memperoleh beberapa kali penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan antara lain pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp450.000.000,00 dan penambahan anggaran lainnya sebesar Rp1.850.483.000,00 sehingga total pagu anggaran meningkat menjadi Rp3.735.435.000,00 (Rp10.358.325.000,00 - Rp8.923.373.000,00 + Rp450.000.000,00 + Rp1.850.483.000,00).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja akan dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 dengan realisasi kinerja serta analisisnya pada akhir tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Inspektorat Utama Bawaslu telah melaksanakan penilaian kinerja melalui kegiatan evaluasi dan pengukuran kinerja, yang hasilnya memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja atas sasaran strategis Inspektorat Utama Bawaslu dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Sedangkan persentase capaian kinerja dihitung menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik indikator, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis

Inspektorat Utama mendukung Sasaran Strategis ke-5 yaitu “Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern” dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa “Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi”. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan oleh evaluator internal dan eksternal. Evaluasi Internal dilakukan oleh APIP pada tahap perencanaan RB (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan RB (*on-going*), sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh:

- Evaluator Meso yaitu Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi Koordinator Indikator RB General, misalnya: Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP, maka Evaluator Mesonya adalah BPKP. Evaluator Meso bertugas untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasil evaluasi kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi RB nasional paling lambat tanggal 15 November setiap tahun.
- Evaluator Nasional yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang bertugas untuk:

1. mengkoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi yang dilaksanakan Evaluator Internal dan Evaluator Meso, meliputi evaluasi atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
2. melakukan evaluasi atas hasil dan strategi pembangunan reformasi birokrasi.
3. menetapkan besaran nilai dan predikat Indeks RB berdasarkan informasi hasil dari evaluator internal, meso, dan nasional.
4. melaporkan hasil evaluasi akhir pelaksanaan RB kepada Pimpinan K/L yang dievaluasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pada tahun 2025, target dan capaian IKSS Bawaslu sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Formula Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip tata Pemerintahan yang Baik, bersih dan Modern.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82	N/A	N/A	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB

Pemenuhan target IKSS “Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi” yang telah dicapai Bawaslu adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Target	-	65	70	75	82	82
	Realisasi	67,99	68,60	72,95	67,71	78,19	N/A

Sampai dengan 5 Februari 2026, Nilai Evaluasi RB Bawaslu belum diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB sehingga belum dapat diukur capaiannya. Inspektorat Utama selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Bawaslu telah melaksanakan peran *assurance* dengan melaksanakan evaluasi internal Reformasi Birokrasi guna mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan RB serta perbaikan kinerja dan tata kelola organisasi. Evaluasi internal tersebut menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang memuat catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, rincian sebagai berikut:

No	Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI)
(1)	(2)	(3)
1	Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 50.A/PW.03/IU/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 Melaksanakan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Triwulan I Tahun 2025	Hasil Evaluasi Internal ReformasiBirokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Triwulan II Tahun 2025 Nomor B-29/PW.03/IU/03/2025 tanggal 31 Maret 2025
2	Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 76/PW.03/IU/07/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Triwulan II Tahun 2025	Hasil Evaluasi Internal ReformasiBirokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Triwulan II Tahun 2025 Nomor B-97/PW.03/IU/07/2025 tanggal 24 Juli 2025
3	Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 142/PW.03/IU/03/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Triwulan III dan *Ex Ante* Tahun 2025	Hasil Evaluasi Internal ReformasiBirokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum s.d. Triwulan III Tahun 2025 Nomor B-134/PW.03/IU/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025
		Hasil Evaluasi Internal ReformasiBirokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum s.d. Triwulan III Ex-Ante 2025 Nomor B-29/PW.03/IU/03/2025 tanggal 31 Maret 2025
4	Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 1/PW.03/IU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang Melaksanakan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2025	Sampai dengan 30 Januari 2026, hasil evaluasi internal oleh Inspektorat Utama masih dalam proses finalisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi internal Reformasi Birokrasi pada periode Triwulan III dan *Ex Ante* Tahun 2025, diketahui skor capaian indikator tahun 2023 dan 2024, dan target tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator	Skor 2023*	Skor 2024*	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,85	2,63	3
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	95	73,00	85
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	1,37	100,00	100
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	0,80	4,00	4,00
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,93	3,21	3,3
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,5	-	-
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65,91	66,82	75
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	87,7	89,87	93
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	-	3
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	87,74	96,97	98
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90,51	94.48	95
12	Indeks Pengelolaan Aset	3.23	3.44	3,75

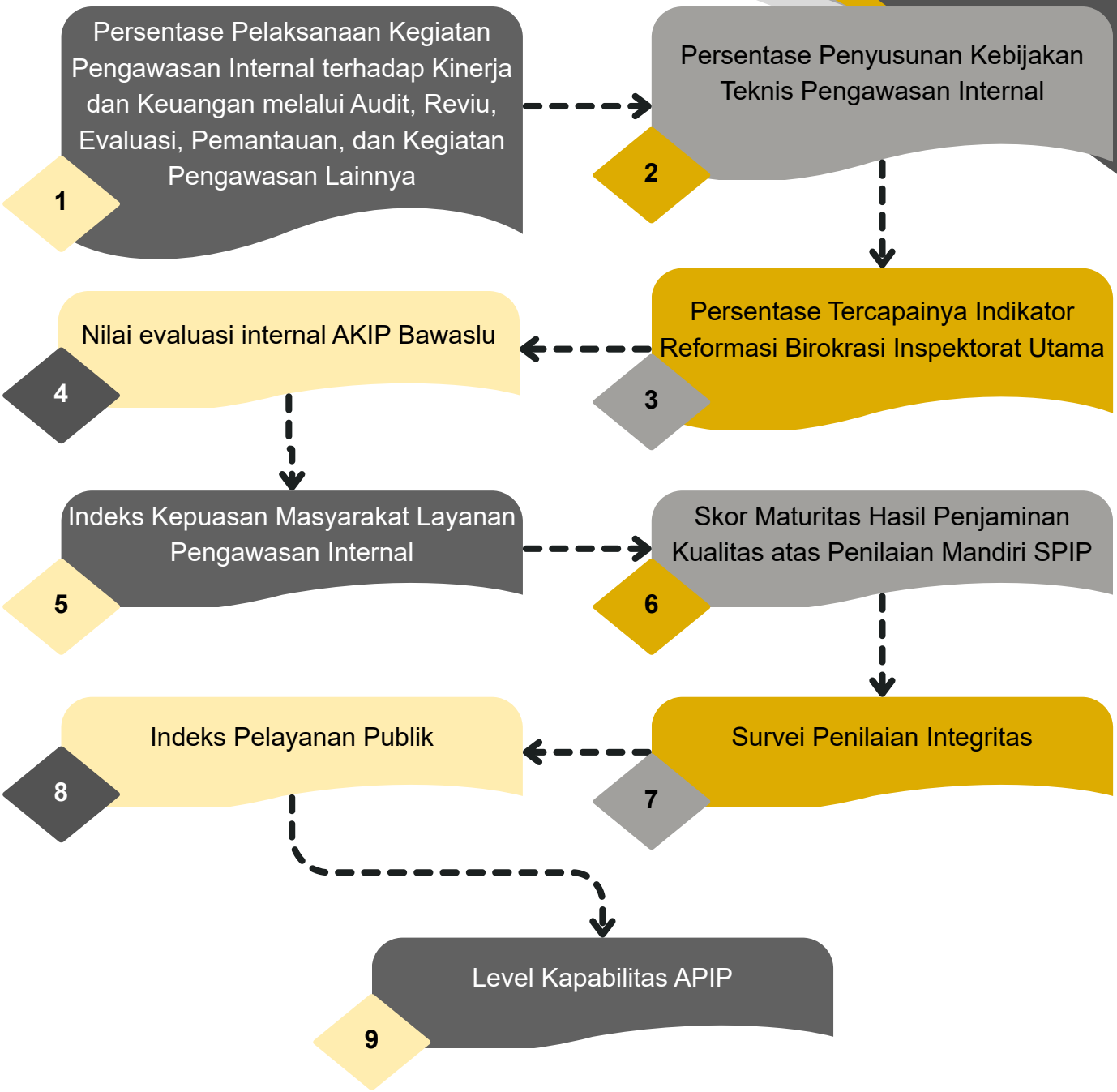
No	Indikator	Skor 2023*	Skor 2024*	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1	3,00	3,5
14	Indeks Kualitas Kebijakan	25,79	66,47	78
15	Indeks Reformasi Hukum	55,90	98,46	99
16	Indeks Pembangunan Statistik	2	2,61	3,3
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	93,42	84,99	90
18	Indeks Sistem Merit	-	-	300
19	Indeks Pelayanan Publik	3,16	2,86	3,5
20	Indeks SPBE	3,12	3,47	3,75
21	Capaian Prioritas Nasional	99,68	97,03	98
22	Capaian IKU	100	83,30	87,5
23	Opini BPK	5	5	5
24	Tindak Lanjut Rekomendasi	79,8	81,35	86
25	Indeks BerAkhlak	1,95	61,04	78
26	Survei Penilaian Integritas	73,71	77,04	85
27	Survei Kepuasan Masyarakat	75,68	94,19	95
28	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam PBJ Bawaslu	0,8	1,67	1,75

**Skor Tahun 2023 dan 2024 berdasarkan hasil evaluasi dan yang telah dipublikasikan pada laman www.portalrb.id.*

Sumber data: LHEI Reformasi Birokrasi periode Triwulan III dan Ex Ante Tahun 2025

2. Capaian Sasaran Program

Inspektorat Utama mendukung pencapaian Sasaran Strategis ke-5, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif”, melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kontribusi Inspektorat Utama terhadap sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif”. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:



Pada tahun 2025, target dan capaian IKP Inspektorat Utama sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	Persentase pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya	100%	100%	100	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang telah dilaksanakan : kegiatan pengawasan internal yang direncanakan × 100%
	Persentase penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal	100%	100%	100	Jumlah kebijakan teknis yang disusun dan ditetapkan : Jumlah kebijakan teknis yang direncanakan x 100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase tercapainya indikator reformasi birokrasi inspektorat utama	100%	95,65%	95,65	(Persentase Capaian Tingkat kepuasan terhadap layanan LAPOR + Persentase Capaian Indeks SPI + Persentase Capaian tindak lanjut rekomendasi BPK) : Jumlah Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama yang ditetapkan x 100%
	Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu	75	71.90	95.87	Hasil evaluasi AKIP internal Bawaslu oleh Inspektorat Wilayah I : Target kinerja yang direncanakan x 100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3.8	3.81	100	Hasil SKM layanan Inspektorat Utama : Target kinerja yang direncanakan x 100%
	Skor Maturitas Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP	3.3	3.90	100	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Bawaslu : Target kinerja yang direncanakan x 100%
	Survei Penilaian Integritas	85	73.90	86,94	Indeks SPI Bawaslu oleh KPK : Target kinerja yang direncanakan x 100%
	Indeks Pelayanan Publik	3.5	3.9	100	Indeks Pelayanan Publik Bawaslu oleh Kementerian PAN RB : Target kinerja yang direncanakan x 100%
	Level kapabilitas APIP	3	2.37	79	Level Kapabilitas Inspektorat Utama : Target kinerja yang direncanakan x 100%

1) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 1. Persentase pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

IKP 1 mencerminkan tingkat efektivitas Inspektorat Utama dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern secara menyeluruh dan terencana. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan pengawasan yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan penyesuaiannya dapat direalisasikan sesuai dengan target.

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pengawasan internal yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan internal yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Capaian IKP 1 pada tahun 2025 mencapai 100 persen dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini sejalan dengan kinerja tahun 2024 yang juga mencapai 100 persen, yang menunjukkan konsistensi Inspektorat Utama dalam menjaga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan PKPT serta kemampuan memenuhi target *output* pengawasan.

Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026 s.d. 2029
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. 2029 berdasarkan Renstra

Realisasi sebesar 497 *output* pengawasan internal, terdiri dari:

No	Uraian Kegiatan	Target PKPT	Realisasi Kinerja PKPT dan Non PKPT	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Audit Internal	28	28	100
2.	Reviu Kinerja dan Keuangan	200	200	100
3.	Pemeriksaan, Pembinaan, dan Pengawasan Internal	260	269	100
Total		**488**	**497**	**100**

1. Audit Internal

Pada tahun 2025, terdapat 28 laporan audit internal yang terdiri dari 17 Laporan Hasil Audit Operasional, 6 (enam) Laporan Audit Kinerja, 2 (dua) Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu, dan 3 (tiga) Laporan Audit TIK/SPBE sebagaimana pada lampiran 4.

2. Reviu Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2025, terdapat 200 reviu kinerja dan keuangan yang terdiri dari: 28 Laporan Reviu Laporan Keuangan, 38 Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), 13 Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa, 3 (tiga) Laporan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN), 64 Laporan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA), 16 Reviu Pertanggungjawaban Keuangan, 8 (delapan) Reviu Tunggakan, 2 (dua) Reviu Pisah Batas, 2 (dua) Reviu Renja, 11 Reviu PSU, dan 15 Laporan Reviu Tematik. Rincian sebagaimana lampiran 5.

3. Pembinaan Pengawasan Internal

Pada tahun 2025, terdapat 269 laporan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan internal yang terdiri dari: 2 (dua) Laporan Pendampingan BPK, 6 (enam) Laporan *Monitoring* dan Evaluasi WBS, PP, dan BK, 41 Laporan Evaluasi AKIP, 17 Laporan *Monitoring* dan Evaluasi RB ZI, 7 (tujuh) Laporan SPIP (Penilaian Mandiri, Penjaminan

Kualitas, dan Pendampingan), 35 Laporan *Monitoring* TL Hasil Pemeriksaan, 30 Laporan *Monitoring* LHKAN, 76 Laporan Pengawasan Lainnya, 8 (delapan) Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan, 4 (empat) LKjIP, 1 (satu) Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan, 1 (satu) Dokumen PKPT Itwil III, 2 (dua) Dokumen RR dan RPR, 4 (empat) Laporan Kapabilitas APIP, 13 Laporan Pemantauan Progres Stranas PK, 3 (tiga) Laporan Telaah Sejawat Internal, 2 (dua) Laporan *Monitoring* dan Evaluasi MR, 5 (lima) Laporan *Monitoring* SP4N-LAPOR!, 1 (satu) Laporan Evaluasi Lainnya, 2 (dua) Laporan Penguatan eSPI, dan 9 (sembilan) Laporan Pengawasan Non PKPT. Rincian sebagaimana lampiran 6.

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam mempertahankan kinerja pengawasan internal sehingga di tahun 2025, kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya telah mencapai 100 persen, antara lain:

1. Menyusun *timeline* pelaksanaan penugasan pengawasan internal sebagai dasar pengendalian waktu dan alokasi sumber daya.
2. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres capaian target PKPT untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi penugasan.
3. Melakukan revisi terhadap target PKPT apabila dalam tahun berjalan terdapat realisasi penugasan yang sebelumnya belum diakomodasi dalam PKPT.
4. Melaksanakan kegiatan audit internal secara *hybrid* melalui kombinasi metode daring dan luring untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan.
5. Melaksanakan kegiatan pengawasan, antara lain reviu LKjIP, evaluasi AKIP, *monitoring* LHKPN dan LHKAN, serta pengawasan tertentu lainnya dengan mekanisme daring.

2) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 2. Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern

IKP 2 adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana Inspektorat Utama berhasil menyusun kebijakan teknis pengawasan intern sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Indikator ini mengukur persentase ketercapaian penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern dalam satu tahun anggaran, baik dari aspek ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, maupun kesesuaian dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah kebijakan teknis pengawasan internal yang disusun dan ditetapkan}}{\text{Jumlah kebijakan teknis pengawasan internal yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Indikator Kinerja Program (IKP) ke-2 “Persentase penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal” mencapai realisasi sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan teknis pengawasan internal yang direncanakan pada tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan sebagaimana Keputusan Ketua Nomor 30/PW.09/K1/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025.

Target IKP 2 pada Tahun 2025 tercapai sebesar 100 persen, sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai perencanaan pada kedua tahun tersebut. Konsistensi capaian ini mencerminkan kinerja Inspektorat Utama yang stabil dalam menjalankan fungsi perencanaan dan penetapan kebijakan pengawasan intern.

Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026 s.d. 2029
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. 2029 berdasarkan Renstra

Kebijakan Teknis Pengawasan Intern tersebut menjadi acuan, dasar, dan pedoman bagi Inspektorat Utama dalam menyusun Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat Utama Tahun 2025. Penerapan kebijakan teknis pengawasan intern dalam penyusunan PPBR dan PKPTBR mendorong pelaksanaan pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika organisasi serta perkembangan risiko strategis yang dihadapi Bawaslu.

Sejalan dengan hal tersebut, Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan arah, fokus, dan prioritas pelaksanaan pengawasan intern. Namun demikian, perbedaan konteks penyelenggaraan organisasi dan dinamika risiko yang dihadapi pada masing-masing tahun anggaran menyebabkan adanya perbedaan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

Aspek	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)
Latar Belakang	Disusun untuk mendukung pengawasan selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.	Disusun untuk memperkuat pengawasan pasca-Pemilu 2024 dan menyesuaikan dengan kondisi organisasi dan anggaran.
Tujuan Kebijakan	Menjadi pedoman Inspektorat Utama dalam melaksanakan pengawasan agar pelaksanaan Pemilu berjalan tertib dan akuntabel.	Menjadi pedoman pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern dan tata kelola Bawaslu secara berkelanjutan.
Arah Pengawasan	Lebih fokus pada pengamanan tahapan Pemilu dan Pemilihan.	Lebih fokus pada perbaikan sistem, tata kelola, dan peningkatan kinerja organisasi.
Pendekatan Pengawasan	Pengawasan berbasis risiko dengan penekanan pada kepatuhan terhadap ketentuan.	Pengawasan berbasis risiko dengan penekanan pada pencegahan dan pemberian saran perbaikan
Fokus Utama	Pengelolaan anggaran Pemilu dan dana hibah Pemilihan serta kinerja unit kerja selama tahapan Pemilu.	Pengawasan keuangan dan kinerja, penguatan reformasi birokrasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan.
Metode Pelaksanaan	Didominasi pengawasan langsung di lapangan	Menggunakan kombinasi pengawasan langsung dan jarak jauh untuk efisiensi.
Hasil Yang Diharapkan	Terjaganya akuntabilitas dan kepatuhan selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024.	Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas tata kelola Bawaslu secara berkelanjutan.

Perbedaan kebijakan teknis pengawasan intern Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya penyesuaian arah pengawasan yang adaptif dan dinamis, dari pengamanan tahapan Pemilu dan Pemilihan menuju penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola Bawaslu pasca-Pemilu yang lebih akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

3) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 3. Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama

IKP 3 digunakan untuk mengukur kontribusi Inspektorat Utama dalam mendukung pelaksanaan RB di lingkungan Bawaslu. Indikator ini diukur melalui capaian 3 (tiga) indikator, yaitu Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan, Tindak Lanjut Rekomendasi, dan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagaimana tercantum dalam Memorandum Ketua Bawaslu Nomor 10/OT.05/K1/06/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Matriks Target Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2025. Ketiga indikator tersebut mencerminkan peran Inspektorat Utama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pengaduan, penguatan integritas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bawaslu.

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{(Persentase Capaian Tingkat kepuasan terhadap layanan LAPOR + Persentase Capaian Indeks SPI + Persentase Capaian tindak lanjut rekomendasi BPK)}}{\text{Jumlah Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{(100\% + 86{,}94\% + 100\%)}{\text{3 (tiga) indikator}} \times 100\% = \mathbf{95{,}64\%}$$

Hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa IKP 3 tercapai sebesar 95,64 persen, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai 100 persen. Berikut perbandingan capaian kinerja IKP 3 dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026 s.d. 2029
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100%	100%	100%	100%	95,64%	95,64%	Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. 2029 berdasarkan Renstra

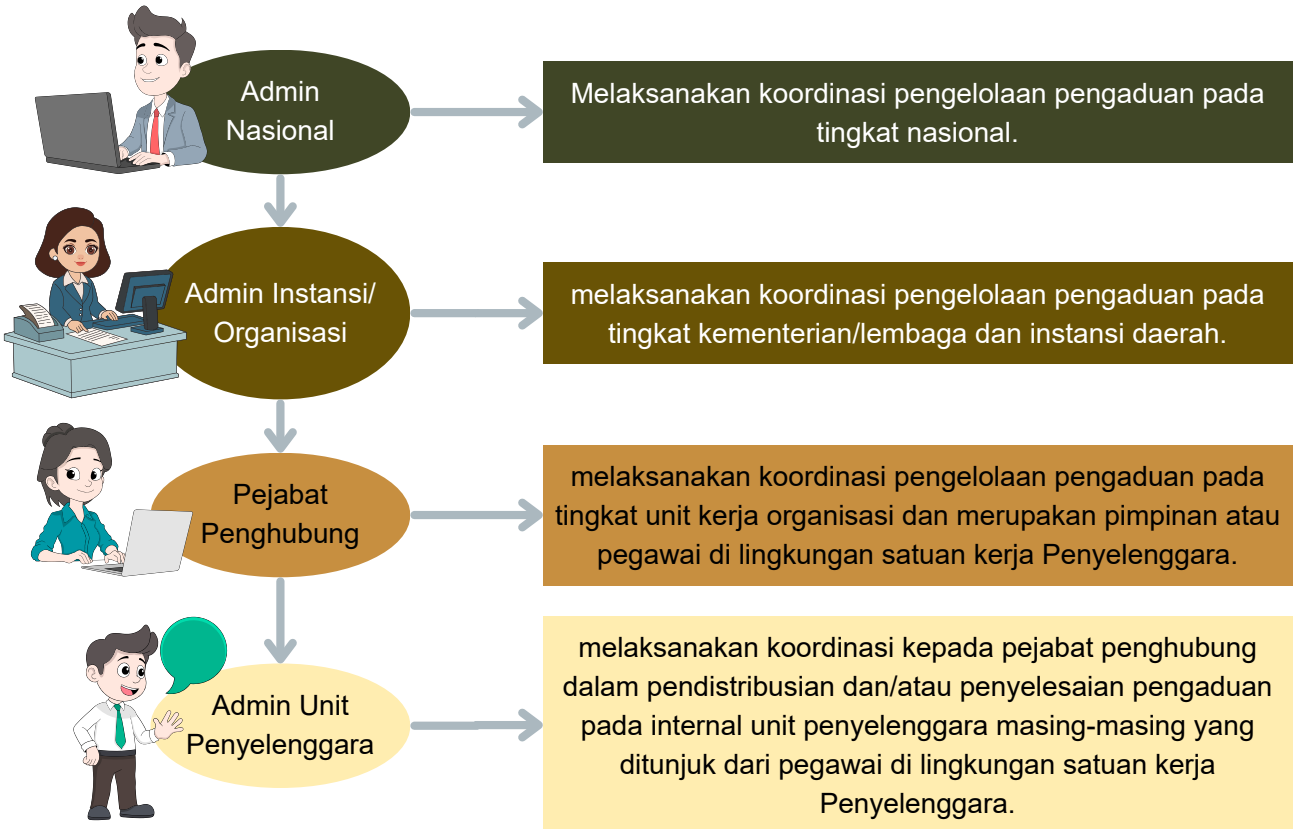
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh Indeks SPI Bawaslu tahun 2025 yaitu sebelumnya memperoleh Indeks 77,90 (Waspada) turun menjadi sebesar 73,90 (Waspada). Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap perhitungan capaian kinerja IKP 3 tahun 2025. Berikut perbandingan realisasi dan capaian 3 (tiga) indikator RB General yang diampu Inspektorat Utama antara Tahun 2024 dan Tahun 2025.

No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	3,50	3,67	100	3,50	3,67	100
2	Tindak Lanjut Rekomendasi	80	81,15	100	86	88,60	100
3	Indeks SPI	75	77,04	100	85	73,90	86,94
Rata-Rata Capaian			100			95,64	

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

SP4N–LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat) merupakan sistem pengaduan nasional yang digunakan untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan, aspirasi, serta permintaan informasi dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh K/L/P/D. Melalui SP4N–LAPOR!, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara daring, sementara instansi pemerintah wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan dan batas waktu yang telah ditetapkan

Pengelola operasional aplikasi SP4N-LAPOR! sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional terdiri dari:



Mengacu ketentuan tersebut, Bawaslu telah membentuk tim pengelola pengaduan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 295/PW.04/K1/12/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Susunan Tim Koordinasi SP4N-LAPOR! di Lingkungan Bawaslu dan menetapkan Standar Pelayanan Pengaduan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 4812/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Capaian indikator “Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan” relatif tetap atau stabil antara Tahun 2024 dan Tahun 2025. Hal tersebut mencerminkan konsistensi kinerja Bawaslu dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Berikut capaian nilai pengguna atau rating kepuasan atas pengelolaan pengaduan yang tercantum pada halaman *dashboard* admin instansi Bawaslu.

Periode	Target 2024 dan 2025	*Rating* tahun 2024	*Rating* tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Januar s.d. Desember	3,50	3,67 dari 5	3,67 dari 5

Dalam pemberian rating kepuasan, pengguna atau pelapor melakukan penilaian terhadap pengelolaan pengaduan dengan mengacu pada indikator penilaian yang telah ditetapkan, meliputi substansi tindak lanjut (20%), perlindungan identitas pelapor (25%), penggunaan bahasa (5%), pemenuhan persyaratan administrasi (10%), kecepatan tindak lanjut (20%), serta kelengkapan bukti tindak lanjut (20%). Hasil penilaian tersebut dikonversi menjadi bintang 1 s.d. 5 yang ditampilkan pada halaman profil instansi pada aplikasi SP4N-LAPOR!. Sepanjang tahun 2025, Admin Instansi Bawaslu mencatat terdapat 31 laporan aduan yang masuk ke sistem LAPOR!, sebagai berikut:

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah Aduan Yang Masuk
(1)	(2)	(3)
1	Pengaduan Berkadar Pengawasan	15
2	*Whistleblowing System*	2
3	Aspirasi	7
4	Permintaan Informasi	3
5	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	4
Total		**31**

Dari 31 laporan pengaduan yang diterima, 17 aduan terverifikasi lengkap dan didisposisikan ke Pejabat Penghubung, 13 aduan diarsipkan oleh Admin Instansi karena tidak lengkap, dan 1 (satu) aduan diarsipkan sesuai dengan keinginan Pelapor. Berikut rincian 17 aduan yang didisposisikan ke Pejabat Penghubung.

Unit Kerja Mitra	Jumlah Aduan Yang DIterimaa	Jumlah Aduan Yang Selesai	Keterangan Klasifikasi Aduan
(1)	(2)	(3)	(4)
Inspektorat Wilayah I	8	8	2 aspirasi, 2 permintaan informasi, 1 pengaduan tidak berkadar pengawasan, 2 berkadar pengawasan, dan 1 WBS
Inspektorat Wilayah II	*3*	3	1 aspirasi, 1 pengaduan berkadar pengawasan, dan 1 pengaduan tidak berkadar pengawasan
Inspektorat Wilayah II	6	6	3 aspirasi, 1 pengaduan tidak berkadar pengawasan, 1 pengaduan berkadar pengawasan, dan 1 WBS
Total	**17**	**17**	

Terhadap 17 aduan yang terverifikasi lengkap tersebut, per tanggal 31 Desember 2025 seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Admin Unit Penyelenggara Publik (UPP) dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 100 persen. Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR!, Bawaslu telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Penguatan kerangka kerja legalitas melalui penyusunan 7 (tujuh) SOP Pengelolaan SP4N-LAPOR! di lingkungan Bawaslu.
- Membuat *tools* sederhana berbasis *spreadsheet* yang berfungsi memantau kinerja pengelolaan pengaduan secara berkala.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara triwulan atas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dan menyampaikan hasil tersebut kepada Kementerian PAN-RB sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, sebagai berikut:

No	Periode	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Januari s.d. Maret 2025	Surat Sekjen Bawaslu Nomor 2/PW.04/IU/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Media SP4N-LAPOR di Lingkungan Bawaslu Triwulan I Tahun 2025
2	Januari s.d. Juni 2025	Surat Sekjen Bawaslu Nomor B-1326/PW.09/SJ/06/2025 tanggal 10 Juni 2025 hal Penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Media SP4N-LAPOR di Lingkungan Bawaslu Triwulan II Tahun 2025
3	Januari s.d. September 2025	Surat Sekjen Bawaslu Nomor 2/PW.04/IU/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Media SP4N-LAPOR di Lingkungan Bawaslu Triwulan III Tahun 2025
4	Januari s.d. Desember 2025	Laporan Tahunan SP4N-LAPOR! Bawaslu Nomor 326/PW.09/IU/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 yang disampaikan melalui link google form.

- Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR! pada 7 (tujuh) Bawaslu Provinsi beserta dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain: Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.
- Melakukan koordinasi internal secara rutin antar admin pengelola SP4N-LAPOR! di lingkungan Bawaslu untuk memastikan keseragaman pemahaman dan meningkatkan kualitas respons.
- Melakukan koordinasi eksternal dengan Admin Nasional SP4N-LAPOR! pada Kementerian PANRB, termasuk konsultasi secara berkala, guna mengatasi kendala teknis pengelolaan aplikasi serta memastikan pengelolaan pengaduan telah berjalan sesuai dengan ketentuan.

Meskipun pengelolaan aduan sampai dengan tahun 2025 telah berjalan baik, efektivitas pengelolaan SP4N–LAPOR! masih terdapat kendala teknis yaitu aplikasi SP4N–LAPOR! pada waktu tertentu mengalami pemeliharaan (*maintenance*), sehingga menyebabkan ketidakstabilan akses. Selain kendala teknis, terdapat tantangan ke depan yaitu berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas tindak lanjut pengaduan pengelolaan SP4N–LAPOR! di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Indikator Tindak Lanjut (TL) Rekomendasi menggambarkan tingkat kepatuhan Bawaslu dalam menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Inspektorat Utama berperan aktif melalui kegiatan pemantauan, koordinasi, dan asistensi kepada unit kerja terkait untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemantauan hingga 31 Desember 2025, persentase TL rekomendasi BPK telah mencapai 88,60 persen. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang tercatat sebesar 81,15 persen, serta mencerminkan adanya perbaikan dalam komitmen dan efektivitas unit kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkelanjutan.

No	Periode	Realisasi Pemantauan TL tahun 2024	Realisasi Pemantauan TL tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Januari s.d. Juni	81,16 persen (435 telah di TL dari 536 rekomendasi)	86,37 persen (469 rekomendasi di TL dari 543 rekomendasi)
2	Januari s.d. Desember	84,70 persen (454 telah di TL dari 536 rekomendasi)	88,60 persen (505 rekomendasi di TL dari 570 rekomendasi)

Capaian pemantauan TL rekomendasi BPK antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, pada kedua tahun tersebut capaian kinerja sebesar 100 persen.

Tahun 2024			Tahun 2025		
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80%	81,15%	100%	86%	88,60%	100%

Stabilitas capaian tersebut tetap terjaga meskipun terdapat penambahan jumlah rekomendasi antara periode Semester I dan Semester II Tahun 2025. Penambahan rekomendasi tersebut disebabkan karena adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh BPK pada Tahun 2025. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya jumlah rekomendasi, jumlah tindak lanjut yang diselesaikan juga mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat Utama dalam mendorong dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah berjalan secara efektif. Hal ini mencerminkan adanya komitmen dan kesadaran manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola unit kerja. Berikut ini rincian status pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK periode 1 Januari s.d. Desember 2025.

No	Tahun	Jumlah Temuan Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
				Tindak Lanjut Telah Sesuai dan Tuntas	Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2009	7	26	19	6	-	1
2	2013	8	10	10	0	-	-
3	2014	28	63	55	8	-	-
4	2015	8	15	12	3	-	-
5	2016	15	26	25	1	-	-
6	2017	9	23	20	3	-	-
7	2018	10	31	26	5	-	-
8	2019	12	40	33	7	-	-
9	2020	7	29	27	2	-	-
10	2021	89	223	209	14	-	-
11	2022	8	14	12	2	-	-
12	2023	7	16	14	2	-	-
13	2024	12	27	25	2	-	-
14	2025	10	27	18	9	-	-
Jumlah		**230**	**570**	**505**	**64**	**0**	**1**
Persentase				**88,60%**	**11,23%**	**0**	**0,17%**

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan SPI setiap tahun untuk mengukur kerawanan korupsi di setiap lembaga publik. Survei ini dilakukan secara *online* dengan responden pegawai internal (responden internal), masyarakat umum pengguna layanan (responden eksternal), dan para ahli seperti kalangan praktisi dan akademisi (responden eksper). Survei dilakukan melalui metode *random sampling* dengan derajat kepercayaan 95 persen dan *margin of error* sebesar 5 (lima) persen. Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Berikut ini Indeks SPI Bawaslu dari tahun 2021 s.d. 2025.

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks SPI Agregat	**79,85**	**78,15**	**73,70**	**77,40**	**73,90**
Kategori	*Terjaga*	Terjaga	Waspada	Waspada	Waspada
Indeks Internal	*81,57*	81,20	79,52	74,67	81,33
Indeks Eksternal	*80,00*	84,66	85,29	85,89	89,18
Indeks Eksper	*78,37*	81,73	66,49	85,43	70,61
Faktor Koreksi	*0*	4,39	2,92	5,26	6,06

Keterangan:



: Rentan (indeks <73)
: Waspada (indeks di antara 73-77)
: Terjaga (indeks 78-100)

Indeks Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bawaslu pada Tahun 2025 menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh menurunnya nilai indeks eksper serta meningkatnya faktor koreksi apabila dibandingkan dengan Tahun 2024. Penurunan indeks eksper terjadi sebagai akibat dari penilaian responden eksper yang berasal dari Kelompok Pemantau Publik dan Kelompok Pengawasan Melekat, yang menilai bahwa dimensi integritas instansi masih perlu ditingkatkan. Penilaian tersebut berdampak pada menurunnya nilai indeks integritas dari perspektif responden eksper.

Selain itu, faktor koreksi pada Tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024. Namun demikian, hingga tanggal 5 Februari 2026, Bawaslu belum menerima Laporan Lengkap Hasil SPI Bawaslu Tahun 2025 dari KPK karena masih dalam proses finalisasi. Oleh karena itu, Bawaslu belum dapat mengidentifikasi secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai indeks eksper maupun peningkatan nilai faktor koreksi secara komprehensif.

Selain 3 (tiga) indikator di atas, Inspektorat Utama sebagai mitra strategis organisasi juga memiliki peran dalam keberhasilan 4 (empat) komponen indikator penilaian RB, yaitu:

No	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,21	3,30	3,007	91,12
2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	-	-	-	-
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66,82	75	66,95	89,26
4	Indeks Pelayanan Publik	2,86	3,50	3,90	100%

Tingkat Maturitas SPIP

Hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Bawaslu Tahun 2025 menunjukkan bahwa Bawaslu memperoleh Indeks SPIP sebesar 4,317 atau berada pada Level 4. Kemudian, hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri tersebut Indeks SPIP turun menjadi 3,991 atau berada pada Level 3. Sementara itu, hasil evaluasi maturitas SPIP Bawaslu yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana Surat Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Nomor PE.09.03/S-1028/D202/2/2025 tanggal 23 Desember 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Indeks	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Hasil Sementara Evaluasi BPKP
(1)	(2)	(3)	(4)
SPIP	4,317	3,991	3,077
MRI	4,181	3,582	2,694
IEPK	3,940	3,010	2,708

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/626/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024, Bawaslu memperoleh nilai evaluasi implementasi SAKIP sebesar 66,82 dengan predikat Baik (B). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2025, Bawaslu menetapkan target nilai SAKIP sebesar 75. Atas target tersebut, Bawaslu telah mencapai kinerja sebesar 89,26 persen atau memperoleh Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 66,95 dengan predikat Baik (B) berdasarkan Surat Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/290/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2026 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, rincian sebagai berikut:

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No.	Komponen	Bobot	Nilai tahun 2024	Nilai tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,20	21,32
2	Pengukuran Kinerja	30,00	16,21	16,18
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,96	11,98
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,45	17,47
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		**100**	**66,82**	**66,95**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**Baik**	**Baik**

Sumber: hasil evaluasi AKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diakses melalui portal https://portalrb.menpan.go.id/

Hasil evaluasi AKIP Bawaslu menunjukkan adanya peningkatan nilai sebesar 0,13 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada beberapa komponen penilaian. Namun, pada komponen Pengukuran Kinerja terjadi penurunan karena belum tersusunnya dokumen IKU Tahun 2025–2029 yang dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data yang jelas untuk setiap indikator kinerja. Sebagai tindak lanjut, diperlukan percepatan penyusunan dan penetapan dokumen IKU 2025–2029 yang memenuhi hal-hal dimaksud serta selaras dengan dokumen Renstra Bawaslu Tahun 2025 s.d. 2029.

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

IPP merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penilaian IPP diperoleh melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B/89/PP.00.02/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025, lokus pelaksanaan PEKPPP pada Bawaslu ditetapkan pada Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (FPPP).

Atas dasar tersebut Inspektorat Utama melalui Inspektorat Wilayah II melaksanakan Pendampingan Penilaian PEKPPP kepada Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu sebagaimana termuat dalam Surat Tugas Plt. Inspektur Wilayah II Nomor 129/PW.09/IP/09/2025 dengan hasil akhir setelah dilakukan pembinaan, layanan publik Biro FPPP memperoleh nilai sebesar 89,28 dan rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Biro FPPP.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025, Bawaslu memperoleh nilai IPP sebesar 3,90 dengan kategori B (Baik). Capaian tersebut telah melampaui target Tahun 2025 sebesar 3,50, serta menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian IPP Tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,86.

4) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 4. Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu

IKP 4 digunakan untuk mengukur kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bawaslu. Evaluasi internal AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Utama untuk menilai keselarasan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja dengan capaian kinerja organisasi, sekaligus memastikan bahwa penerapan AKIP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hasil evaluasi internal AKIP dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan AKIP, menyusun rekomendasi perbaikan, dan mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Bawaslu.

Indikator Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu merupakan Indikator Kinerja Program yang baru ditetapkan pada Tahun 2025. Hasil evaluasi internal ini masih ada *gap* dengan hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB sebesar 4,95. Hal ini menunjukkan mutu dalam proses evaluasi perlu ditingkatkan. Indikator ini belum digunakan sebagai indikator kinerja program dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024 dan baru pertama kali dilakukan pada Tahun 2025. Dengan demikian, capaian indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026 s.d. 2029
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	-	75.00	71,90	95,87%	Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. 2029 berdasarkan Renstra

Capaian nilai Evaluasi Internal AKIP diukur berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Wilayah I terhadap Bawaslu. Pelaksanaan evaluasi tersebut didasarkan pada Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 104/PW.03/IU/07/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025, serta Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 108/PW.03/IU/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Revisi Susunan Personel dan Pembagian Tugas atas Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 104/PW.03/IU/07/2025 tanggal 22 Juli 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi internal tersebut, diperoleh nilai akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar 71,90 dengan predikat “BB (Sangat Baik)” atau telah tercapai 95,87 persen dari target nilai sebesar 75,00, yang menunjukkan bahwa penerapan AKIP di lingkungan Bawaslu telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja.

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu}}{\text{Target Kinerja Yang Direncanakan}} \times 100\% = \frac{71{,}90}{75{,}00} \times 100\% = \mathbf{95{,}87\%}$$

Rincian hasil evaluasi per komponen, sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		**100**	**71,90**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**Sangat Baik**

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP Internal Bawaslu Tahun 2025, masih terdapat beberapa catatan perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kondisi tersebut menyebabkan nilai evaluasi internal AKIP Bawaslu berada pada angka 71,90 dengan predikat “Sangat Baik”.



Atas catatan perbaikan tersebut, Bawaslu telah melakukan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kementerian PAN-RB tahun 2024.
2. Melakukan finalisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Melakukan finalisasi Renstra Bawaslu yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 dan mempublikasikannya dalam *website* JDIH Bawaslu.
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, terkait tata cara pengukuran kinerja melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan aplikasi SAKTI Modul Komitmen, dengan menghadirkan narasumber dari Bappenas dan Kementerian Keuangan.
5. Melibatkan unit kerja terkait dan tim Inspektorat Utama dalam proses perumusan indikator-indikator yang akan ditetapkan sebagai IKU Program dan Kegiatan.
6. Menyusun dan mempublikasikan LKjIP tahun 2024 yang telah direviu oleh Inspektorat Utama, serta melakukan perbaikan penyajian informasi kinerja, termasuk perbandingan capaian dengan target dan realisasi tahun sebelumnya.
7. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Evaluasi AKIP pada 36 unit kerja dengan rincian hasil sebagaimana lampiran 7. Selain itu, pada tahun 2026 akan dilaksanakan evaluasi AKIP pada 41 unit kerja mitra Inspektorat Wilayah I, II, dan III.
8. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP sebelumnya.



Keterangan:

AA (Bobot nilai 100)	:	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) danterdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohankepada unit kerja lainnya di lingkungan Bawaslu.
A (Bobot nilai 90)	:	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) danterdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	:	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	:	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	:	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	:	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	:	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	:	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi internal AKIP, diketahui bahwa:

- Inspektorat Utama meraih nilai evaluasi internal AKIP tertinggi dengan skor 85,30 dan predikat A (Memuaskan). Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai evaluasi internal AKIP Inspektorat Utama menunjukkan peningkatan kinerja.
- Terdapat 5 (lima) unit kerja yang memperoleh nilai A (Memuaskan) yaitu Inspektorat Utama, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.
- Terdapat 21 (dua puluh satu) unit kerja yang memperoleh nilai BB (Sangat Baik) yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Jambi, Aceh, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
- Terdapat 9 (sembilan) unit kerja yang memperoleh nilai B (Baik), yaitu Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, Kedeputian Bidang Dukungan Teknis, Bengkulu, dan Riau.
- Terdapat 1 (satu) unit kerja yang memperoleh predikat C (Kurang) yaitu Papua Tengah.

Secara keseluruhan, sebaran nilai evaluasi internal AKIP menunjukkan bahwa mayoritas unit kerja Bawaslu atau sebanyak 58,33 persen telah berada pada kategori BB (Sangat Baik), yang mencerminkan adanya komitmen organisasi dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja. Namun demikian, untuk mendorong peningkatan nilai AKIP secara merata dan berkelanjutan, diperlukan penguatan peran pembinaan, pendampingan, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan, antara lain sebagai berikut:

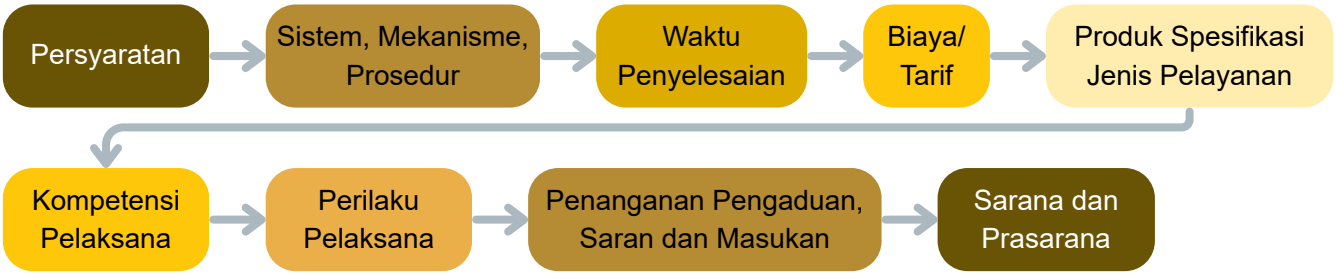


1. Mendorong Biro Perencanaan dan Organisasi agar membuat pedoman atau petunjuk teknis penyusunan Renstra Tahun 2025 s.d. 2029 bagi Bawaslu Provinsi, menyelesaikan penyusunan Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU), *cascading* atau pohon kinerja sampai ke tingkat individu, melakukan pendampingan dalam penyusunan LKjIP unit kerja serta memastikan adanya penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian setiap sasaran kinerja pada Bab III LKjIP.
2. Mendorong Biro SDM dan Umum agar memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melaksanakan reward and punishment, menempatkan pegawai, serta perpindahan pegawai (rotasi, mutasi, dan promosi).
3. Mendorong unit kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan evaluasi AKIP internal oleh Inspektorat Utama untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

5) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Pengawasan Internal

IKP 5 digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Utama. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Bawaslu dimaksudkan untuk mendapatkan *feedback* atau umpan balik dan mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan *auditee* ditingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengawasan intern yang telah dilakukan oleh tim auditor Inspektorat Utama Bawaslu sepanjang tahun 2025. Kegiatan SKM ini telah dilengkapi dengan surat rekomendasi survei yang diterbitkan oleh Direktur Diseminasi Statistik BPS dengan Nomor B-1011/03200/OT.130/2025 tanggal 15 Juli 2025 dengan kategori LAYAK (identitas rekomendasi nomor: V-25.0000.020).

Kuesioner SKM terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan untuk mengukur 9 (sembilan) unsur layanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik antara lain:



Adapun pertanyaan-pertanyaan dari setiap unsur SKM yang tersusun dalam kuesioner termuat pada tabel dibawah ini:

No	Unsur	Kode	Uraian Pertanyaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persyaratan	U1	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan yang diberikan?
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	U2	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kemudahan prosedur pelayanan oleh Inspektorat Utama?
3	Waktu Penyelesaian	U3	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kecepatan waktu Auditor Inspektorat Utama dalam memberikan pelayanan?
4	Biaya/Tarif	U4	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan yang diberikan Auditor Inspektorat Utama?
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	U5	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan denganhasil yang diberikan?
6	Kompetensi Pelaksana	U6	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kompetensi/ kemampuan Auditor Inspektorat Utama dalam memberikan pelayanan pengawasaninternal?
7	Perilaku Pelaksana	U7	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan perilaku Auditor Inspektorat Utama (dari sisi kesopanan dan keramahan) dalampemberian pelayanan?
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	U8	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penanganan pengaduan pengguna layanan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama?
9	Sarana dan Prasarana	U9	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kualitas dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Utama maupun oleh Auditor pada saat melaksanakan penugasan?

Setiap pertanyaan dalam kuesioner telah disiapkan jawaban dengan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, pembagian kategori jawaban dibagi dalam skala 4 (empat), yaitu:

Kategori	Nilai Jawaban
(1)	(2)
Tidak Baik	1
Kurang Baik	2
Baik	3
Sangat Baik	4

Tingkatan nilai internal dan nilai mutu layanan dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan inventarisasi data terhadap jumlah unit kerja yang telah dilakukan pengawasan internal (baik daring maupun luring) oleh Inspektorat Wilayah I, II dan III terdapat 149 unit kerja terdiri dari 38 Bawaslu Provinsi dan 111 Bawaslu Kabupaten/Kota yang menjadi objek pengawasan. Kemudian, dari 149 unit kerja tersebut dilakukan identifikasi jumlah populasi, sampel, dan responden *eligible* per-Inspektorat Wilayah, dengan hasil sebagai berikut:

Unit Kerja	Populasi Survei	Sampel	*Responden Eligible*
(1)	(2)	(3)	(4)
Inspektorat Wilayah I	210	136	139
Inspektorat Wilayah II	157	113	115
Inspektorat Wilayah III	151	108	125
Total	**518**	**357**	**379**
% Responden Eligible	**73,16 % dari total populasi survei**		

Responden *eligible* sebanyak 379 terdiri dari 139 merupakan pejabat/staf di mitra Inspektorat Wilayah I, 115 merupakan pejabat/staf di mitra Inspektorat Wilayah II, dan 125 merupakan pejabat/staf di mitra Inspektorat Wilayah III yang menerima layanan *consulting* dan *assurance*. Pejabat/staf yang diidentifikasi sebagai populasi survei dalam SKM ini antara lain:

- Pada tingkat Bawaslu Provinsi adalah Ketua, Kepala Sekretariat, Seluruh ASN yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Bendahara Pengeluaran (BP); dan
- Pada tingkat Bawaslu Kab/Kota adalah Ketua, Kepala/Koordinator Sekretariat, Seluruh ASN yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Pada Tahun 2025, Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan Inspektorat Utama mencapai nilai 3,81, atau terealisasi 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{Hasil SKM layanan Inspektorat Utama tahun 2025}}{\text{Target Kinerja Yang Direncanakan}} \times 100\% = \frac{3{,}81}{3{,}80} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian Indeks SKM Inspektorat Utama relatif stabil dengan nilai sebesar 3,80, yang menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan kualitas layanan.

Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026 s.d. 2029
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3,80	3,80	100%	3,80	3,81	100%	Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. 2029 berdasarkan Renstra

Capaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Utama dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Terjalinnya komunikasi yang baik antara Inspektorat Utama dengan unit kerja penerima layanan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan, kejelasan informasi, serta penyelesaian permasalahan.
2. Adanya dukungan dan komitmen Pimpinan Inspektorat Utama dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pengawasan dan menjaga konsistensi kinerja dan orientasi pada kepuasan penerima layanan.
3. Hasil survei kepuasan masyarakat dan masukan dari penerima layanan telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap proses dan kualitas layanan pengawasan internal.
4. Penerima layanan telah memiliki ekspektasi yang relatif stabil terhadap kualitas layanan Inspektorat Utama berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ekspektasi yang cenderung tetap ini mempengaruhi penilaian responden sehingga nilai SKM tidak mengalami fluktuasi yang signifikan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Utama tidak terlepas dari dukungan kinerja layanan pada Inspektorat Wilayah I, II, dan III, yang pada akhir periode penilaian juga berhasil mencapai target nilai Indeks SKM , rincian sebagai berikut.

Unit Kerja	Target 2024 dan 2025	Indeks SKM 2024	Indeks SKM 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Inspektorat Wilayah I	3,80	3,864	3,811
Inspektorat Wilayah II	3,80	3,811	3,801
Inspektorat Wilayah III	3,80	3,816	3,828

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks SKM Inspektorat Utama pada Tahun 2024 dan 2025 berada pada nilai rata-rata yang sama, yaitu 3,80. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum kualitas layanan relatif stabil dan konsisten, serta telah mampu mempertahankan tingkat kepuasan pengguna layanan pada kategori "sangat baik". Perbandingan nilai SKM Tahun 2024 dan 2025 tidak sepenuhnya bersifat sebanding (*apple to apple*), mengingat terdapat penyesuaian aspek aspek sebagai berikut:

Aspek	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)
Jumlah Pertanyaan	18 pertanyaan	9 pertanyaan
Unsur yang dinilai	7 dari 9 unsur yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif, 5. Produk Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana, 7. Perilaku Pelaksana	9 dari 9 unsur yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3. Waktu Penyelesaian, 4. Biaya/Tarif, 5. Produk Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana, 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: 9. Sarana dan Prasarana
Jawaban Pertanyaan	Skala 1-6 yaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Kurang Setuju, Cukup Setuju, Setuju, Sangat Setuju	Skala 1-4 yaitu Tidak Baik, Kurang Baik, Baik, dan Sangat Baik

Untuk meningkatkan kualitas layanan Inspektorat Utama, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- peningkatan kompetensi SDM APIP dengan mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan serta pelatihan teknis lainnya yang sesuai dengan peran dan jabatannya, seperti pelatihan perencanaan, manajemen risiko, dan pengadaan barang dan jasa, guna mendukung peningkatan kualitas layanan pengawasan internal.
- Melakukan koordinasi internal antar tim kerja di Inspektorat WIlayah I,II, dan III sehingga memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap implementasi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan.
- Melakukan sosialisasi pedoman dan/atau SOP yang telah disusun agar dapat dipahami oleh seluruh penerima layanan. Dengan demikian, penerima layanan diharapkan dapat menilai secara objektif konsistensi penerapan SOP dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh tim auditor Inspektorat Utama.

6) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 6. Skor Maturitas Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP

IKP 6 digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bawaslu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. Pada tahun 2025, Inspektorat Utama melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 123/PW.09/IU/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2024-2025. Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri SPIP yang dilakukan oleh unit kerja telah andal, objektif, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjaminan Kualitas dilakukan pada unit kerja Kedeputian Bidang Administrasi, Kedeputian Bidang Dukungan Teknis, Inspektorat Utama, Pusat Data dan Informasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga dilakukan terhadap 3 (tiga) Satuan Kerja Penanggung Jawab meliputi Biro Perencanaan dan Organisasi terkait efektivitas dan efisiensi, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terkait keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset, serta Inspektorat Utama terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Bawaslu tahun 2025 sebagaimana Laporan Nomor 219/PW.03/IU/11/2024 tanggal 7 November 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,991 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4 Level 3 (Terdefinisi);
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,582 atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 3 (Terdefinisi);
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3.010.

Indeks tahun 2025	Penilaian Mandiri (PM)	Penjaminan Kualitas (PK)
(1)	(2)	(3)
SPIP	4,317	3,991
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,181	3,582
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,940	3,010

Hasil penjaminan kualitas tersebut, selanjutnya akan dievaluasi oleh BPKP untuk memperoleh nilai maturitas SPIP, MRI, dan IEPK Bawaslu.

Berdasarkan tabel di atas, hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebesar 3,991 atau tercapai 100 persen dan bahkan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,30. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas penerapan SPIP Bawaslu. Adapun pengukuran capaian sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Bawaslu}}{\text{Target Kinerja Yang Direncanakan}} \times 100\% = \frac{3{,}991}{3{,}300} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Berikut ini perbandingan realisasi dan capaian skor penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri SPIP antara tahun 2024 dan 2025

Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026 s.d. 2029
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3,00	3,84	100 %	3,300	3,991	100 %	Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. 2029 berdasarkan Renstra

Rincian perbandingan hasil penjaminan kualitas SPIP, MRI, dan IEPK antara tahun 2024 dan 2025 disajikan sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Tahun 2024		Tahun 2025		Naik/ (Turun)
		Hasil PM	Hasil PK	Hasil PM	Hasil PK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6-4)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,980	3,844	4,264	3,991	0,147
2	MRI	2,919	2,919	4,013	3,582	0,663
3	IEPK	4,700	3,064	3,940	3,010	(0,054)

- Peningkatan skor SPIP dan MRI Bawaslu pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh penguatan komitmen manajemen, pelaksanaan penilaian mandiri yang telah didukung dengan bukti pendukung yang lebih lengkap dan memadai, peran aktif Inspektorat Utama dalam melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP dan mendorong tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, penyempurnaan kebijakan manajemen risiko Bawaslu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan pendampingan penyusunan Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko oleh Inspektorat Utama.

- Seluruh langkah tersebut berkontribusi positif terhadap meningkatnya skor maturitas SPIP dan MRI secara keseluruhan. Namun demikian, skor IEPK Tahun 2025 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh pengenaan penalti, perlunya penyempurnaan kebijakan antikorupsi, antara lain Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0251/Bawaslu/SJ/OT.03/XI/2017 tentang Whistleblowing System atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Bawaslu RI, perlu adanya sistem yang dibangun untuk menerapkan prosedur anti korupsi (aspek pencegahan, deteksi, dan respons) dan sistem Whistleblowing System (WBS) yang dikembangkan oleh Bawaslu di luar aplikasi SP4N-LAPOR!, dan kegiatan pembelajaran anti korupsi yang telah dilaksanakan belum terjadwal secara sistematis.

Sebagai tindak lanjut atas area yang masih perlu diperkuat, Inspektorat Utama saat ini terus melakukan langkah-langkah perbaikan, sebagai berikut:

- Menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4762/PW.04/SJ/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pembentukan UPG ini merupakan langkah awal dalam memperkuat pengendalian gratifikasi secara lebih terstruktur dan terkoordinasi.
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan internal, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi. Penyempurnaan kebijakan tersebut mengacu pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi terbaru yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Peraturan KPK RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- Mendorong Biro Perencanaan dan Organisasi serta unit kerja terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana matriks rencana aksi tindak lanjut *Area of Improvement* SPIP Terintegrasi yang telah disepakati bersama BPKP.
- Melakukan pemantauan terhadap progres dan capaian implementasi rencana aksi tersebut.

Di sisi lain, penguatan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) serta sistem pencegahan korupsi yang mencakup aspek pencegahan, deteksi, dan respons menghadapi tantangan yaitu perlunya dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran maupun kapasitas pengelola untuk kebutuhan pengembangan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ke depan, Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus memperkuat kerangka kebijakan dan mekanisme pengendalian antikorupsi secara bertahap, sejalan dengan prioritas pengawasan dan ketersediaan sumber daya, guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan potensi penyimpangan.

7) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 7. Survei Penilaian Integritas

IKP 7 digunakan untuk mengukur tingkat integritas dan potensi risiko korupsi di lingkungan Bawaslu melalui survey e SPI yang diselenggarakan oleh KPK. Indeks SPI Bawaslu Tahun 2025 sebesar 73,90 (Waspada), atau mencapai 86,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar 85,00. Capaian indeks tersebut mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai nilai 77,90. Adapun perhitungan capaian kinerja IKP.7, sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{Indeks SPI Bawaslu oleh KPK}}{\text{Target Kinerja Yang Direncanakan}} \times 100\% = \frac{73{,}90}{85{,}00} \times 100\% = \mathbf{86{,}94\%}$$

Berikut ini perbandingan realisasi dan capaian IKP 7, tahun 2024 dengan tahun 2025.

Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026 s.d. 2029
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73,00	77,09	100	85	73,90	86,94	Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. 2029 berdasarkan Renstra

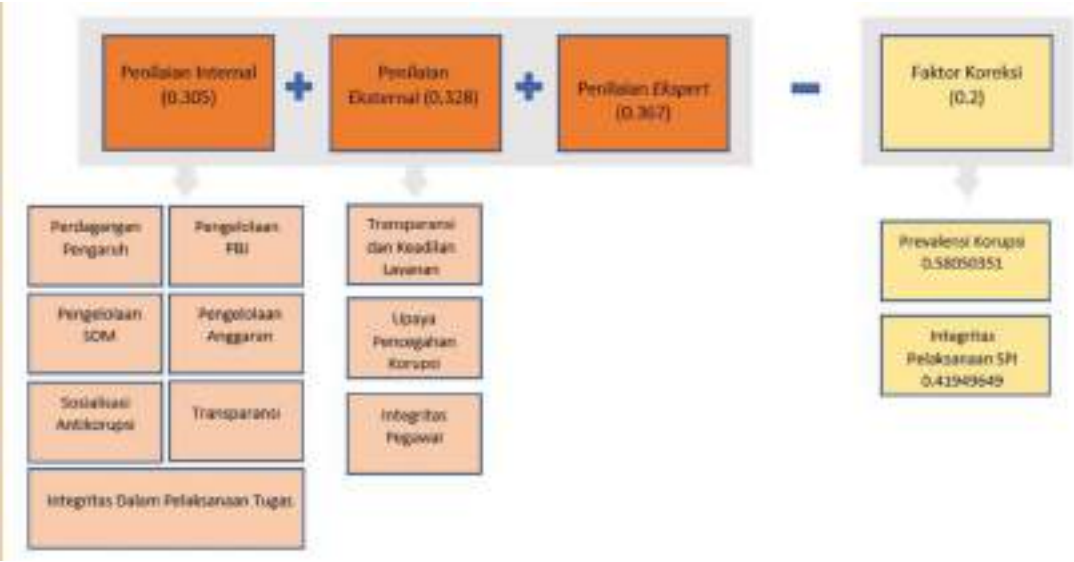
Hasil survei e-SPI berupa Indeks Integritas dihitung dengan cara menggabungkan penilaian dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu internal, eksternal, dan ahli (eksper). Penjelasan sebagai berikut:

- Penilaian internal diperoleh dari hasil survei terhadap pegawai pada 235 unit kerja Bawaslu yang dipilih sebagai sampel. Rinician sebagaimana lampiran 8.
- Penilaian eksternal berasal dari penilaian para pengguna layanan publik baik layanan vendor maupun non vendor yang pernah bekerja sama dengan 235 unit kerja Bawaslu yang dipilih sebagai sampel.
- Penilaian ahli/eksper dilakukan oleh sejumlah narasumber atau pakar yang dinilai memiliki pemahaman yang memadai mengenai isu integritas dan korupsi pada Bawaslu yang melibatkan minimal 10 ahli/tokoh dari berbagai kriteria yang ditetapkan oleh KPK, antara lain:

1. Pensiunan maksimal lima tahun terakhir (pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi atau eselon III untuk kabupaten/kota).
2. Auditor BPK.
3. Auditor BPKP.
4. Perwakilan Ombudsman.Penanggung jawab program pencegahan korupsi dari KPK (Korsupgah, Stranas PK, Dit. *Monitoring*),
5. Instansi lain yang terkait (Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas).
6. Asosiasi Pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh.
7. DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan (diutamakan Komisi A).
8. Advokat
9. Saber Pungli Polres.
10. Saber Pungli Kejari.
11. Saber Pungli Pengadilan Negeri.
12. Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) yang bereputasi.
13. LSM yang fokus pada kinerja instansi atau antikorupsi.
14. Akademisi bidang hukum atau politik/ pemerintahan/sektor terkait/ lokal setempat.
15. Advisor dari lembaga donor yang membantu program pemerintah di instansi terkait.
16. Penyuluh antikorupsi pada level madya dan utama.
17. Kriteria narasumber ahli lain yang ditetapkan KPK.

- Selain ketiga sumber penilaian tersebut, perhitungan Indeks Integritas juga mempertimbangkan faktor koreksi yang berfungsi untuk menyeimbangkan hasil indeks agar lebih mencerminkan kondisi integritas yang sebenarnya. Faktor koreksi diterapkan sebagai pengurang nilai indeks dan dihitung berdasarkan beberapa data pendukung, antara lain jumlah kasus dan tersangka tindak pidana korupsi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh aparat penegak hukum, jumlah kegiatan pengarahan yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei, serta hasil observasi terhadap pelaksanaan survei.

Skema perhitungan Indeks Integritas disajikan sebagai berikut:



Melalui skema penilaian tersebut, berikut ini perolehan Indeks SPI Bawaslu sejak tahun 2021 s.d. 2025.

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks SPI Agregat	79,85	78,15	73,70	77,40	73,90
Kategori	Terjaga	Terjaga	Waspada	Waspada	Waspada
Indeks Internal	81,57	81,20	79,52	74,67	81,33
Indeks Eksternal	80,00	84,66	85,29	85,89	89,18
Indeks Eksper	78,37	81,73	66,49	85,43	70,61
Faktor Koreksi	0	4,39	2,92	5,26	6,06

Adapun rincian indeks internal dan eksternal yang dijabarkan per unit kerja tersaji pada lampiran 9. Berikut ini Indeks SPI Bawaslu Tahun 2025 yang ditinjau berdasarkan capaian masing-masing dimensi penilaian.

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks SPI Agregat-Bawaslu	**79,85**	**78,15**	**73,70**	**77,40**	**73,90**
Indeks Integritas Internal	**81,57**	**81,20**	**79,52**	**74,67**	**81,33**
Rincian Dimensi Internal					
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	88.44	87.27	84.38	73.77	83,14
Pengelolaan Anggaran	88.31	86.69	83.95	72.54	86,55
Pengelolaan PBJ	94.66	90.20	86.67	60.36	90,39
Pengelolaan SDM	73.05	75.33	72.15	68.67	79,17
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	76.38	77.52	76.46	83.80	77,58
Sosialisasi Antikorupsi	66.80	69.75	71.58	78.04	68,84
Transparansi	86.89	84.51	83.85	86.64	86,23
Indeks Integritas Eksternal	**80,00**	**84,66**	**85,29**	**85,89**	**89,18**
Rincian Dimensi Eksternal					
Integritas Pegawai	92.44	96.64	96.94	95.72	96.97
Transparansi dan Keadilan Layanan	76.79	75.07	78.73	80.15	83,60
Upaya Pencegahan Korupsi	69.42	80.62	78.75	80.57	85,95
Indeks Integritas Eksper	**78,37**	**81,73**	**66,49**	**85,43**	**70,61**
Rincian Dimensi Eksper					
Integritas Instansi	78.37	81.73	66.49	85.43	70,61
Faktor Koreksi	**0**	**4,39**	**2,92**	**5,26**	**6,06**
Prevalensi Korupsi	0.02	0.89	1.66	1.85	1.60
Integritas Pelaksanaan SPI	0.01	3.50	1.26	3.41	4.47

Sumber: https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil

Keterangan:

- Rentan (indeks <73)
- Waspada (indeks di antara 73-77)
- Terjaga (indeks 78-100)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Area yang masih memerlukan perhatian khusus yaitu aspek internal (dimensi sosialisasi antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia, dan perdagangan pengaruh) dan aspek eksper (dimensi integritas instansi). Pada dimensi-dimensi tersebut, diperlukan aksi perbaikan yang lebih nyata, terukur, dan berdampak langsung, tidak hanya untuk meningkatkan nilai indeks, tetapi juga untuk memperkuat citra lembaga dan kepercayaan publik terhadap Bawaslu melalui penguatan internalisasi nilai anti korupsi dengan sosialisasi dan internalisasi penerapan anti korupsi yang berkelanjutan, penyempurnaan kebijakan serta praktik pengelolaan SDM yang berbasis merit, serta pencegahan perdagangan pengaruh dengan penguatan pengendalian konflik kepentingan. Upaya perbaikan tersebut diharapkan mampu mendorong penilaian yang lebih positif dari para pakar atau ahli, khususnya terkait komitmen dan praktik integritas di lingkungan Bawaslu.
- Terdapat peningkatan faktor koreksi yaitu dalam aspek Integritas Pelaksanaan SPI yang menunjukkan bahwa penguatan integritas belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku dan praktik kerja yang konsisten, sehingga masih diperlukan penguatan pengendalian, pengawasan, dan tindak lanjut perbaikan.

Dalam proses pelaksanaan SPI Bawaslu, berikut ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku penanggung jawab pelaksanaan SPI, antara lain:

1. Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Bawaslu Tahun 2024 serta melakukan pemantauan progres pelaksanaannya.
2. Menyusun Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Evaluasi Pelaksanaan SPI Tahun 2024 dan Pelaksanaan SPI Tahun 2025 dan melakukan sosialisasi Surat Edaran tersebut di lingkungan Inspektorat Utama dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota secara daring.
3. Berkoordinasi dengan Biro SDM dan Umum yang berkaitan dengan *database* pegawai Bawaslu yang akan digunakan sebagai salah satu sumber data pegawai internal.
4. Berkoordinasi dengan KPK terkait penentuan unit kerja *sampling* e- SPI tahun 2025.
5. Menghimpun data populasi internal, eksternal, dan eksper di 235 unit kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta merekonsiliasi data pegawai internal antara data dari Biro SDM dan Umum dengan data pegawai yang disampaikan oleh unit kerja.
6. Menginput data populasi internal, eksternal, dan eksper ke dalam aplikasi SPI Populasi KPK dan berkoordinasi dengan KPK dalam melakukan update atau pembersihan data populasi apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kriteria.
7. Memantau progres pengisian survei e SPI dari responden internal dan eksternal pada masing-masing mitra kerja Inspektorat Wilayah I,II, dan III, dengan capaian pengisian per 6 November 2025 sebesar 92,51 persen, sebagai berikut:

Unit Kerja Mitra	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100)
Inspektorat Wilayah I	95	95,72	100
Inspektorat Wilayah II	95	98,27	100%
Inspektorat Wilayah III	95	83,33	87,71
Rata-Rata Capaian	**92,51%**		

Upaya untuk meningkatkan Indeks SPI Bawaslu hingga berada pada kategori “Terjaga” (Indeks SPI ≥ 78–100) tidak dapat dibebankan semata-mata pada Inspektorat Utama selaku APIP Bawaslu. Keberhasilan penerapan kebijakan integritas sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan aktif seluruh pegawai serta Pimpinan Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tanpa dukungan dan pelaksanaan yang konsisten di seluruh lini organisasi, kebijakan dan program penguatan integritas tidak akan memberikan hasil yang optimal. Sampai dengan tanggal 5 Februari 2026, Laporan Hasil SPI Bawaslu belum diterima sehingga saran perbaikan sebagai tindak lanjut ke depan belum dapat diidentifikasi secara komprehensif. Harapan ke depan, dengan pelaksanaan tindak lanjut yang akan dilakukan, Indeks SPI Bawaslu pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat, tidak hanya dari sisi capaian angka, tetapi juga dari kualitas penerapan integritas dalam praktik kerja sehari-hari. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang berintegritas.

8) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 8. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

IKP 8 digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Bawaslu. Penilaian IPP diperoleh melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Nomor B/89/PP.00.02/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025, lokus pelaksanaan PEKPPP pada Bawaslu ditetapkan pada layanan publik di Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (FPPP).

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{Indeks Pelayanan Publik Bawaslu}}{\text{Target Kinerja Yang Direncanakan}} \times 100\% = \frac{3{,}90}{3{,}50} \times 100\% = \mathbf{100\ \%}$$

Capaian IPP Bawaslu tahun 2025 sebesar 100 persen yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025, Bawaslu memperoleh nilai IPP sebesar 3,90 dengan kategori B (Baik). Capaian tersebut telah melampaui target Tahun 2025 serta menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian IPP Tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,86 (Cukup).

Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026 s.d. 2029
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	2,86	N/A	3,50	3,90	100%	Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. 2029 berdasarkan Renstra

**N/A = Capaian IPP tahun 2024 tidak dapat diukur, karena tidak ada target yang ditetapkan*

Perlu disampaikan bahwa Indikator "Indeks Pelayanan Publik" merupakan Indikator Kinerja Program yang baru ditetapkan pada Tahun 2025 dan belum digunakan sebagai indikator kinerja program dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024, sehingga capaiannya belum dapat diukur. Dalam pencapaian indikator ini, Inspektorat Utama telah berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan PEKPPP sebagaimana Surat Tugas Plt. Inspektur Wilayah II Nomor 129/PW.09/IP/09/2025 tanggal 1 September 2025, serta dituangkan dalam Laporan Pendampingan Penilaian PEKPPP Tahun 2025 pada Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (Biro FPPP) Nomor 220/PW.09/IP/11/2025 tanggal 11 November 2025. Hasil pembinaan dan pendampingan tersebut menunjukkan nilai layanan Biro FPPP adalah sebesar 89,28 dari skala 100. Adapun rekomendasi hasil pembinaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Biro FPPP, yang antara lain meliputi:

1. Pemasangan Standar Pelayanan pada papan pengumuman, meja layanan, serta media elektronik (layar TV/*monitor*) di Gedung B, serta publikasi Standar Pelayanan di *website* Bawaslu dan aplikasi SIGAP Lapor.
2. Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 melalui media elektronik berupa layar TV/*monitor* di Gedung B.
3. Penambahan informasi waktu layanan, termasuk pemberlakuan layanan di luar hari kerja dalam kondisi tertentu, yang ditampilkan pada meja layanan dan media elektronik.







4. Penambahan kriteria pemberian penghargaan (*reward*) kepada pegawai layanan, antara lain melalui penilaian penampilan dan sikap pegawai, termasuk tidak pernah menerima komplain yang bersifat personal.
5. Koordinasi dengan Biro SDM dan Umum dalam penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan, seperti penyediaan alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf *braille*), petugas yang mampu berbahasa isyarat, lift khusus dengan huruf *braille*, serta jalur *guiding block*.
6. Penambahan fasilitas pendukung operasional pelayanan berupa *dashboard monitoring* proses pelayanan yang ditampilkan melalui layar TV/*monitor*.
7. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi penanganan pelanggaran pada aplikasi SIGAP Lapor secara harian.
8. Publikasi hasil *monitoring* layanan konsultasi dan pengaduan penanganan pelanggaran di media sosial dan *website* Bawaslu.

Dengan pembinaan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama, Biro FPPP menjadi lebih siap dalam penilaian IPP oleh Kementerian PAN-RB sehingga diperoleh hasil akhir yang maksimal yaitu nilai 3,90 (Baik) dan mencapai target 100 persen.



9) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 9. Level Kapabilitas APIP

IKP 9 digunakan untuk mengukur Tingkat Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP. Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan internal secara efektif dan efisien yang mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA). Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan kedalam 5 (lima) tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1), *Infrastructure* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4), dan *Optimizing* (level 5), yaitu semakin tinggi level semakin baik kapabilitasnya. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Kapabilitas pada Inspektorat Utama Bawaslu tanggal 16 Desember 2025, diperoleh simpulan evaluasi Kapabilitas Inspektorat Utama yaitu pada Level 2 dengan skor 2,37, atau tercapai 79 persen dari target.

Formulasi Perhitungan:

$$= \frac{\text{Level Kapabilitas Inspektorat Utama}}{\text{Target Kinerja Yang Direncanakan}} \times 100\% = \frac{\text{2,37 (Level 2)}}{\text{Level 3}} \times 100\% = \mathbf{79\%}$$

Berikut ini perbandingan capaian tingkat kapabilitas Inspektorat Utama tahun 2024 dan 2025.

Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026 s.d. 2029
Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Level 3	Level 3 (3,130)	100%	Level 3	Level 2 (2,37)	79%	Level 4

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025, Inspektorat Utama telah mencapai Level 3 (3,520), sebagai berikut:

No	Elemen	Level Hasil Penilaian Mandiri	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,720
2	Praktik Profesional	4	0,720
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240

No	Elemen	Level Hasil Penilaian Mandiri	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
5	Struktur Tata Kelola	4	0,400
Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		**3**	**3,520**

Sumber: Lampiran Surat Ketua Nomor B-377/PW.09/K1/08/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025.

Penurunan nilai kapabilitas APIP dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang berdampak pada penyesuaian kriteria dan bobot penilaian kapabilitas APIP. Perubahan kebijakan tersebut disampaikan setelah pelaksanaan penilaian mandiri, sehingga berpengaruh terhadap hasil evaluasi kapabilitas Inspektorat Utama Tahun 2025. Adapun perubahan dimaksud meliputi:

Aspek	Sebeleum Perubahan	Pasca Perubahan
(1)	(2)	(3)
Kebijakan	Diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021	Diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025
Komponen dan Bobot Penilaian	6 (enam) Elemen yang terdiri dari: 1. Komponen *Enabler* (60%) 2. Elemen Pengelolaan SDM, 3. Elemen Praktik Profesional, 4. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, 5. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi, 6. Elemen Struktur Tata Kelola) Komponen *Delivery* dan *Result* (40%), yang terdiri dari Elemen Peran dan Layanan	5 (lima) Elemen yang terdiri dari: 1. Elemen Kualitas Peran dan Layanan (40%) 2. Elemen Profesionalisme Penugasan (20%) 3. Elemen Manajemen Pengawasan APIP (20%) 4. Elemen Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan (10%) 5. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)
Topik	18 Topik	19 Topik dengan penajaman topik tertentu yaitu: Pengembangan Informasi Awal (PIA), pemantauan tindak lanjut, dukungan terhadap teknologi informasi (TI), dan pembangunan budaya integritas.

Adanya perubahan skema penilaian kapabilitas APIP memiliki beberapa implikasi, antara lain:

a. Kebutuhan penyesuaian strategi pengawasan

Inspektorat Utama perlu menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang berfokus pada isu-isu strategis serta berdampak langsung terhadap kinerja organisasi. Selain itu, diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja tingkat kapabilitas APIP pada dokumen perencanaan dan dokumen lainnya yang memuat target dan indikator Kapabilitas APIP agar selaras dengan kebijakan dan kriteria penilaian yang berlaku.

b. Penguatan kompetensi dan profesionalisme SDM APIP

Skema penilaian kapabilitas APIP yang terbaru menuntut auditor tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan analitis yang memadai serta kapasitas untuk menyusun rekomendasi yang aplikatif dan bernilai tambah dalam rangka peningkatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengendalian Internal (TKMRPI) serta pencegahan penyimpangan (*fraud*).

c. Peningkatan kualitas implementasi, bukan sekadar pemenuhan dokumen

Kebijakan terbaru menekankan pada kualitas peran dan layanan APIP, pemenuhan standar profesional pengawasan, dan bersifat lebih substantif. Penilaian tidak lagi bertumpu pada keberadaan pedoman atau SOP semata, tetapi pada sejauh mana pedoman tersebut diimplementasikan secara konsisten dan efektif untuk meningkatkan TKMRPI organisasi.

d. Penguatan peran APIP dalam manajemen risiko dan pengendalian internal

Inspektorat Utama dituntut untuk lebih aktif mendorong kualitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal di seluruh unit kerja, bukan hanya melakukan penilaian kepatuhan.

e. Perubahan pendekatan dalam pengukuran kinerja APIP

Capaian kapabilitas APIP ke depan perlu dilihat sebagai proses berkelanjutan (*continuous improvement*), sehingga fokus utama tidak hanya pada pencapaian level tertentu, tetapi pada peningkatan kualitas pengawasan internal dari waktu ke waktu.

Dalam rangka mempertahankan tingkat kapabilitas APIP, Inspektorat Utama telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan.
2. Penyempurnaan metodologi pengawasan dengan melakukan perubahan dan penyusunan kebijakan antara lain:
   - menetapkan Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko sebagai praktik baru dalam pelaksanaan audit kinerja, yang menekankan pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.
   - penyusunan beberapa pedoman dan SOP sebagaimana lampiran 3.
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan telaah sejawat internal, dengan hasil sebagai berikut:

Unit Kerja	Target Kinerja (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100)
Inspektorat Wilayah I	83	83,47	100
Inspektorat Wilayah II	83	83,60	100
Inspektorat Wilayah III	83	83,05	100

4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP secara periodik, dengan hasil per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan	Persentase Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) s.d. Semester II 2025 (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
BPK	88,60	505 dari 570 rekomendasi ditindaklanjuti
BPKP	62,39	617 dari 989 rekomendasi telah ditindaklanjuti
APIP	31,26	1.736 dari 5.553 rekomendasi telah ditindaklanjuti

Sumber: Data Rekapitulasi PTL per 31 Desember 2025.

5. Pelaksanaan layanan jasa konsultansi difokuskan pada penanganan layanan pengaduan internal, tindak lanjut atas permintaan Pimpinan, serta pelaksanaan telaah Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Perubahan kebijakan Kapabilitas APIP menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Inspektorat Utama. Di satu sisi, capaian kapabilitas yang telah diraih pada periode sebelumnya tidak dapat dibandingkan secara langsung karena adanya perubahan kriteria penilaian level Kapabilitas APIP. Perbedaan tersebut menyebabkan tingkatan level pada regulasi sebelumnya tidak sepenuhnya setara dengan tingkatan level pada regulasi yang baru, sehingga penerapan Perban BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdampak pada penurunan capaian level Kapabilitas APIP. Namun di sisi lain, skema penilaian yang baru mendorong Inspektorat Utama untuk memperkuat peran strategis APIP sebagai *trusted advisor* dan *quality assurance* yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi organisasi.

B. Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Utama didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp3.735.435.000,00. Berdasarkan data aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025, anggaran yang direalisasikan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dan pencapaian target kinerja Inspektorat Utama adalah sebesar Rp3.707.353.373,00 atau 99,25 persen dari pagu anggaran menurut DIPA Bawaslu Revisi ke-10 Nomor SP DIPA-115.01.1.500100/2025 tanggal 12 Desember 2025, rincian sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ RO/KRO	Indikator	Target	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)		Uraian
					Anggaran	Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
115.WA.4355. EBD.961.112. Layanan Reformasi Kinerja	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	3,80 (1 Laporan)		-	-	100	Terdiri dari 1 Laporan SKM Ittama Tahun 2025
115.WA.4355. EBD. 965. Layanan Audit Internal	Kapabilitas APIP	Level 3	2.891.652.000	2.866.518.402	99,00	79	Hasil Kapabilitas APIP oleh BPKP menunjukkan Skor 2,37 (Level 2)
101	Jumlah laporan audit internal Itwil 1,2, dan 3	28 Laporan	869.449.000	861.190.188	99,00	100	Terdiri dari 28 Laporan Hasil Audit
102	Jumlah laporan reviu kinerja Itwil 1,2, dan 3	68 Laporan	429.741.000	425.192.396	98,70	100	Terdiri dari 200 Laporan Hasil Reviu
103	Jumlah laporan pemeriksaan pembinaan dan pengawasan lainnyal Itwil 1,2, dan 3	165 Laporan	1.592.462.000	1.580.135.818	99,22	100	Terdiri dari 269 Laporan hasil Pemeriksaan, Pembinaan, dan Pengawasan Lainnya
115.WA.6849. EBA.994.002. W. Operasional Inspekorat	-	1 Layanan	87.497.000	87.495.307	100	100	Terdiri dari 1 Layanan Operasional dan Perkantoran
115.WA.6850. EBA.962.106.A Layanan Dukungan Manajemen Internal	Jumlah laporan koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Ittama	20 Laporan	756.286.000	753.339.664	99,61	100	Terdiri dari 20 Laporan yaitu 12 Laporan Bulanan e-Monev, 4 Laporan Keuangan dan Kinerja Triwulan, 2 Laporan Kepegawaian dan Umum Semesteran, 1 Dokumen Perjanjian Kinerja, 1 Laporan Kinerja Inspektorat Utama
Total		**282**	**3.735.435.000**	**3.707.353.373**	**99,25**	**97,00**	**518**

Realisasi anggaran sebesar 99,25 persen dengan capaian kinerja sebesar 97 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 secara umum telah berjalan efektif dan relatif efisien. Hal ini tercermin dari keselarasan antara penggunaan anggaran dengan hasil kinerja yang dicapai, bahkan realisasi *output* hasil pengawasan internal telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renja yaitu 518 *output* yang terdiri dari 497 (488 PKPT + 9 Non PKPT) laporan hasil pengawasan internal dan 21 Laporan Administrasi Tata Usaha.

Adapun upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dengan menerapkan pola penugasan secara daring (*online*) pada kegiatan pengawasan tertentu, seperti *monitoring* LHKAN, evaluasi AKIP, dan reviu LKjIP, serta penerapan penugasan secara *hybrid* (daring dan luring) dalam pelaksanaan audit. Strategi tersebut mampu menekan biaya perjalanan dinas tanpa mengurangi kualitas dan cakupan pengawasan, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAB IV
PENUTUP

INSPEKTORAT UTAMA

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan periode pelaporan yang merefleksikan Inspektorat Utama dalam mempertahankan kinerja dan memenuhi target PKPT di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, 5 (lima) dari 9 (sembilan) IKP yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai, serta realisasi PKPT tetap mencapai 100 persen. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja yang disajikan dalam Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern" yang diukur melalui indikator Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025 belum dapat diukur, karena sampai tanggal 5 Februari 2026 Nilai Reformasi Birokrasi Bawaslu belum diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB.
2. Capaian Sasaran Program "Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif" diukur melalui 9 (sembilan) IKP. Dari 9 (sembilan) IKP tersebut, sebanyak 5 (lima) IKP telah mencapai target 100 persen, yaitu IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya; Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal; Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengawasan Internal; Skor Maturitas Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP; serta Indeks Pelayanan Publik. Selanjutnya, terdapat 4 (empat) IKP yang belum mencapai target 100 persen, yaitu IKP Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama, Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu, Survei Penilaian Integritas, dan Tingkat Kapabilitas APIP, sehingga capaian rata-rata kinerja Inspektorat Utama sebesar 95,27% dengan yang ditargetkan.
3. Penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan secara efektif dan relatif efisien, yang tercermin dari realisasi anggaran sebesar 99,25 persen mampu mendukung pencapaian kinerja hingga 97 persen. Meskipun masih terdapat 4 (empat) IKP yang belum mencapai target, Inspektorat Utama tetap mengupayakan pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di tengah kebijakan efisiensi belanja. Adapun capaian yang belum optimal tersebut dipengaruhi oleh risiko dan faktor di luar kendali langsung Inspektorat Utama serta karakteristik indikator yang memerlukan dukungan dan koordinasi lintas unit kerja.

B. TANTANGAN DAN HAMBATAN SERTA PELUANG

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pada Tahun 2025, Inspektorat Utama Bawaslu menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, antara lain:

1. Terdapat penambahan sumber daya manusia melalui penerimaan 45 CPNS pada bulan Juni 2025. Namun meskipun menambah kuantitas pegawai, masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui diklat fungsional dan diklat teknis substantif sebagai peluang peningkatan kinerja agar dapat bekerja mendukung pelaksanaan pengawasan secara optimal.
2. Adanya keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya pelaksanaan diklat teknis substantif dan sertifikasi, sehingga pengembangan kompetensi auditor Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target minimal 20 JP bagi seluruh auditor dan sebagian besar diklat yang diikuti adalah diklat tidak berbayar dan melalui daring sebagai alternatif pemenuhan pengembangan kompetensi.
3. Adanya kesenjangan kompetensi jabatan dan kapasitas pegawai, khususnya pada peran pengendali teknis dan ketua tim, yang secara ideal seharusnya diampu oleh auditor pada jenjang tertentu, namun dalam praktiknya masih dilaksanakan oleh auditor dengan jenjang di bawahnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersusunnya pola karier auditor secara jelas serta pemenuhan jabatan fungsional sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
4. Telah terdapat aplikasi SAIBERDIT, namun pemanfaatannya belum optimal, sehingga pola kerja masih didominasi dengan proses yang memanfaatkan teknologi sederhana seperti: *google spreadsheet*.

C. UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

Sebagai upaya tindak lanjut perbaikan ke depan, Inspektorat Utama akan melakukan penguatan, sebagai berikut:

1. Penataan pengelolaan SDM melalui pemerataan beban kerja antar tim di Inspektorat Wilayah, mengusulkan pemenuhan jabatan fungsional Auditor Ahli Muda dan Ahli Madya, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui diklat dan pembelajaran internal seperti *coaching* dan *sharing knowledge* dengan dipastikan pemenuhan jam pelatihan yaitu 20 JP per auditor per tahun.
2. Pemanfaatan aplikasi SAIBERDIT untuk mendukung pelaksanaan pengawasan internal. Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan ketersediaan sumber daya.
3. Penguatan koordinasi lintas unit dan komitmen manajemen dilakukan untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan meningkatkan capaian kinerja *outcome* secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu. Laporan ini menyajikan informasi kinerja secara komprehensif dan terukur sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi berkelanjutan, memberikan umpan balik (*feedback*) bagi peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan penguatan peran APIP, serta menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan pada tahun berikutnya.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 1.

Rincian Pergeseran Pegawai melalui Mekanisme Rotasi, Mutasi, dan Pemberhentian pada Inspektorat Utama

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja Semula	Unit Kerja Menjadi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muhammad Adhar Putra	JFA Terampil	Inspektorat Wilayah I	Bawaslu Kabupaten Pare-Pare	Diberhentikan sebagai Auditor per tanggal 30 Oktober 2025 dan Alih JF menjadi Penata Layanan Operasional
2	Novario	JFA Ahli Muda	Inspektorat Wilayah II	Bawaslu Provinsi Banten	Diberhentikan Sementara sebagai Auditor karena menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi
3	Adrian Pasga Dagama	JFA Ahli Muda	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III	Dipindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaiannya ke Itwil III mulai tanggal 3 Februari 2025
4	Ronalita Situmorang	JFA Ahli Pertama	Inspektorat Wilayah II	Bawaslu Kabupaten Bogor	Diberhentikan Sementara sebagai Auditor karena menjabat sebagai Kasubbag Administrasi
5	Kevin Bonauli	JFA Ahli Pertama	Inspektorat Wilayah II	OJK	Diberhentikan sebagai Auditor atas Permintaan Sendiri per tanggal 12 Juni 2025
6	Vany M.Y.	JFA Terampil	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III	Dipindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaiannya ke Itwil III mulai tanggal 10 Oktober 2025
7	Fadel Ray Azra	JFA Terampil	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III	Dipindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaiannya ke Itwil III mulai tanggal 3 Februari 2025
8	Ikrima Rosyidah S.U.	JFA Terampil	Inspektorat Wilayah II	Bawaslu Provinsi Riau	Diberhentikan sebagai Auditor per tanggal 31 Oktober 2025 dan Alih JF menjadi Penata Layanan Operasional
9	Vebty Puput Purba	JFA Ahli Muda	Inspektorat Wilayah III	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dimutasi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia per tanggal 15 Juli 2025
10	Chrissanty Harahap	JFA Ahli Pertama	Bawaslu Kota Depok	Inspektorat Wilayah III	Diaktifkan kembali status JFA karena sudah tidak menjabat sebagai Kasubag Administrasi

Lampiran 2.

Rincian Realisasi Peningkatan Kompetensi pada SDM Inspektorat Utama

No.	Nama	Unit Kerja	Realisasi Diklat	Jumlah JP per Orang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Arya M.N.Sumbayak	Inspektorat Wilayah III	PPK	38
			Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	410
2	Jufri Syahruddin	Inspektorat Wilayah I	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	410
3	Chrissanty Harahap	Inspektorat Wilayah III	Sertifikasi PPK	38
			Diklat Auditor Ahli Muda	120
4	Rizki Riana Putri	Inspektorat Wilayah I	Sertifikasi PPK	38
			Certified Forensic Auditor (CFrA)	50
			Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP	8
5	Veronica Rahayu	Inspektorat Wilayah I	Sertifikasi PPK	38
			Diklat Auditor Ahli Pertama	115
			Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	15
6	Endah Hamidah Aini	Inspektorat Wilayah I	Sertifikasi PPK	38
			Sertifikasi PPSPM	31
7	Rasmi Juwita	Inspektorat Wilayah I	Sertifikasi PPK	38
			Sertifikasi PPSPM	31
8	Adriansyah Pasga Dagama	Inspektorat Wilayah III	Sertifikasi PPK	38
9	Apriandy Wahyu Pratama	Inspektorat Wilayah I	Sertifikasi PPSPM	31
			Diklat Auditor Ahli Pertama	115
			Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	15
10	Baiq Gany Marizazaya	Inspektorat Wilayah III	Sertifikasi Bendahara	31
11	Nurwita Sari	Tata Usaha	Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli	350
12	Vany Martiloya Yemigoe	Inspektorat Wilayah III	Diklat Auditor Ahli Pertama	115
			Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	15
13	Gifari Widi Kurniawan	Inspektorat Wilayah II	Diklat Auditor Ahli Pertama	115
			Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	15
14	Filber Sidabutar	Tata Usaha	Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Level Manajerial	15
15	Widya Rahmi	Inspektorat Wilayah I	Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	15
			Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP	8
16	Dedy Mulia	Inspektorat Wilayah II	Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	15
17	Faik Wildan Husaini	Inspektorat Wilayah II	Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	15
18	Josita Rosa Citra Sari	Inspektorat Wilayah II	Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	15
19	Anindya Prestie Oktantri	Inspektorat Wilayah II	Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA	15

Lampiran 2.

Rincian Realisasi Peningkatan Kompetensi pada SDM Inspektorat Utama

No.	Nama	Unit Kerja	Realisasi Diklat	Jumlah JP per Orang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Mhd. Adham Fitrah	Inspektorat Wilayah II	*Certified Forensic Auditor (CFrA)*	50
21	Sarah Yunita T.	Inspektorat Wilayah III	*Certified Forensic Auditor (CFrA)*	50
22	45 CPNS	Inspektorat Utama	Diklat Pelatihan Dasar CPNS atau Diklat Prajabatan	239
23	92 JFA	Inspektorat Utama	Kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM) di bidang Forensik Audit pada tanggal 11 Desember 2025	3
24	87 JF dan 4 JF Lainnya	Inspektorat Utama	Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait Peran APIP Dalam Penanganan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan yang Berindikasi Fraud tanggal 17 Desember 2025	3

Lampiran 3.

Produk Kebijakan Pengawasan Internal yang Dihasilkan Tahun 2025

No	Jenis Produk Hukum	Judul	Nomor dan Tanggal Ditetapkan	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perbawaslu	Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 5 September 2025	Berlaku
2	Keputusan Ketua Bawaslu	Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK, BPKP, dan APIP di Lingkungan Bawaslu	Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Mei 2025	Berlaku
3	Keputusan Ketua Bawaslu	Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 29 September 2025	Berlaku
4	Keputusan Ketua Bawaslu	Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Nomor 16468.1 Tahun 2025 tanggal 7 November 2025	Berlaku
5	SOP	SOP Pemenuhan Permintaan Data oleh Inspektorat Utama kepada Stakeholder	Nomor 7/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 30 September 2025	Berlaku
6	SOP	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan	Nomor 6/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 30 September 2025	Berlaku
7	SOP	SOP Penyusunan LKjIP Inspektorat Utama Bawaslu	Nomor 5/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 30 September 2025	Berlaku
8	SOP	SOP Penerimaan Siswa/Mahasiswa Magang di lingkungan Inspektorat Utama Bawaslu	Nomor 1/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 30 September 2025	Berlaku
9	SOP	SOP Pelayanan Konsultasi secara Tatap Muka pada Inspektorat Utama Bawaslu	Nomor 3/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 30 September 2025	Berlaku
10	SOP	SOP Pelayanan Konsultasi dengan Surat Permohonan melalui Aplikasi Srikandi/Surat Elektronik	Nomor 2/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 30 September 2025	Berlaku
11	SOP	SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan di lingkungan Bawaslu	Nomor 4/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 30 September 2025	Berlaku
12	SOP	SOP Telaah dan Verifikasi Pengaduan	Nomor 8/PW.09/SJ/10/2025 tanggal 29 September 2025	Berlaku
13	SOP	SOP Tindak Lanjut Pengaduan dengan Klasifikasi Aspirasi dan Permintaan Informasi	Nomor 9/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 29 September 2025	Berlaku
14	SOP	SOP Tindak Lanjut Aduan dengan Klasifikasi Tidak Berkadar Pengawasan	Nomor 14/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 29 September 2025	Berlaku
15	SOP	SOP Tindak Lanjut Aduan dengan Klasifikasi Berkadar Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Nomor 13/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 29 September 2025	Berlaku
16	SOP	SOP Tindak Lanjut Aduan dengan Klasifikasi Berkadar Pengawasan Non Pemilu/Pemilihan	Nomor 12/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 29 September 2025	Berlaku
17	SOP	SOP Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui SP4N-LAPOR!	Nomor 11/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 29 September 2025	Berlaku
18	SOP	SOP Penginputan Aduan yang Diterima di Luar Aplikasi LAPOR! ke dalam Sistem SP4N LAPOR!	Nomor 10/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 29 September 2025	Berlaku

Lampiran 4.

Rincian *Output* Laporan Hasil Audit Internal Tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Audit Operasional**				
1	Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	225/PW.01/IP/09/2025	11/09/2025	246/PW.01/IP/11/2025	29/11/2025
2	Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	210/PW.01/IP/09/2025	01/09/2025	154/PW.01/IP/10/2025	10/10/2025
3	Bawaslu Kota Cilegon	217/PW.01/IP/09/2025	04/09/2025	209/PW.01/IP/11/2025	03/11/2025
4	Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	235/PW.01/IP/09/2025	15/09/2025	226/PW.01/IP/11/2025	14/11/2025
5	Bawaslu Kota Tangerang	258/PW.01/IP/10/2025	09/10/2025	301/PW.01/IP/12/2025	29/12/2025
6	Bawaslu Kabupaten Pemalang	123/PW.01/IP/09/2025	09/09/2025	306/PW.01/IP/12/2025	30/12/2025
7	Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	122/PW.01/IP/09/2025	09/09/2025	230/PW.01/IP/11/2025	18/11/2025
8	Bawaslu Kabupaten Kendal	128/PW.01/IP/09/2025	10/09/2025	231/PW.01/IP/11/2025	18/11/2025
9	Bawaslu Kota Pekalongan	139/PW.01/IP/10/2025	6/10/2025	307/PW.01/IP/12/2025	30/12/2025
10	Bawaslu Kota Tegal	144/PW.01/IP/10/2025	15/10/2025	288/PW.01/IP/12/2025	23/12/2025
11	Bawaslu Kabupaten Cirebon	636/PW.01/SJ/08/2025	28/08/2025	259/PW.01/IP/12/2025	8/12/2025
12	Bawaslu Kota Cirebon	637/PW.01/SJ/08/2025	28/08/2025	242/PW.01/IP/11/2025	26/11/2025
13	Bawaslu Kota Tasikmalaya	654/PW.01/SJ/09/2025	04/09/2025	234/PW.01/IP/11/2025	24/11/2025
14	Bawaslu Kabupaten Garut	653/PW.01/SJ/08/2025	04/09/2025	217/PW.01/IP/11/2025	7/11/2025
15	Bawaslu Kabupaten Sumedang	635/PW.01/SJ/08/2025	28/08/2025	236/PW.01/IP/11/2025	24/11/2025
16	Bawaslu Kabupaten Majalengka	634/PW.01/SJ/08/2025	28/08/2025	255/PW.01/IP/12/2025	18/12/2025
17	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	32/PW.01/IU/02/2025	26/02/2025	122/PW.01/IP/7/2025	21/07/2025
B	**Audit Kinerja**				
18	Panwaslih Provinsi Aceh	290/PW.01/IP/11/2025 291/PW.01/IP/11/2025	11/11/2025	291/PW.08.02/IP/12/2025	29/12/2025
19	Bawaslu Provinsi Lampung	294/PW.01/IP/11/2025 295/PW.01/IP/11/2025	12/11/2025	298/PW.01/IP/12/2025	29/12/2025
20	Bawaslu Kabupaten Demak	121/PW.01/IP/09/2025	09/09/2025	257/PW.01/IP/12/2025	5/12/2025
21	Bawaslu Kota Magelang	145/PW.01/IP/10/2025	15/10/2025	308/PW.01/IP/12/2025	30/12/2025
22	Inspektorat Utama	158/PW.01/IU/2025	28/10/2025	035/CHR/IP.III/V/2025	28/05/2025
23	Bawaslu Kabupaten Karawang	61/PW.01/IU/11/202	6/11/2025	037/CHR/IP.III/VI/2025	2/6/2026
C	**Audit dengan Tujuan Tertentu**				
24	Bawaslu Provinsi Jambi	48/PW.01/IU/05/2025	16/05/2025	144.A/PW.01/IP/09/2025	26/9/2025
25	Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	47/PW.01/IP/05/2025	16/05/2025	137.B/PW.01/IP/09/2025	10/9/2025
D	**Audit SPBE/TIK**				
26	Aplikasi PPID (Indikator 1 s. d. 35)	333/PW.01/IP/12/2025	10/12/2025	322/PW.01/IP/12/2025	31/12/2025
27	Aplikasi PPID (Indikator 36 s.d. 70)	174/PW.01/IP/12/2025	10/12/2025	309/PW.01/IP/12/2025	30/12/2025
28	Aplikasi PPID (Indikator 71 s.d. 105)	82/PW.01/IP/12/2025	10/12/2025	305/PW.01/IP/12/2025	30/12/2025

Lampiran 5.

Rincian *Output* Laporan Hasil Reviu Keuangan dan Kinerja Tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Reviu Atas Laporan Keuangan**				
1	Reviu atas Tunggakan Belanja Tahun Anggaran 2024 pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	43/PW.02/IP/02/2025	25/02/2025	022/PW.02/IP/03/2025	07/03/2024
2	Reviu atas Tunggakan Belanja Tahun Anggaran 2024 pada Bawaslu Kabupaten Buru Selatan	67/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	036.A/PW.02/IP/03/2025	20/03/2025
3	Reviu atas Tunggakan Belanja Bawaslu Kabupaten Banjar Tahun 2024	107/PW.02/IU/07/2025	24/07/2025	128/PW.02/IP/7/2025	30/07/2025
4	Reviu atas Tunggakan Belanja Bawaslu Kota Banjarmasin Tahun 2024	178/PW.02/IP/07/2025	18/07/2025	072/CHR/IP.I/10/2025	01/10/2025
5	Reviu atas Tunggakan Belanja Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	174/PW.02/IP/07/2025	18/07/2025	049/CHR/IP.I/08/2025	01/08/2025
6	Reviu atas Tunggakan Belanja Tahun Anggaran 2024 pada Bawaslu Provinsi Banten	174/PW.02/IP/07/2025	18/07/2025	046.B/CHR/IP.I/VII/2025	28/07/2025
7	Reviu atas Tunggakan Belanja Tahun Anggaran 2024 pada Bawaslu Kota Bitung	179/PW.02/IP/07/2025	18/07/2025	046.A/CHR/IP.I/VII/2025	28/07/2025
8	Reviu atas Tunggakan Belanja Tahun Anggaran 2024 pada Bawaslu Provinsi Maluku	175/PW.02/IP/07/2025	18/06/2025	046/CHR/IP.I/VII/2025	31/07/2025
9	Reviu Tunggakan Bawaslu Provinsi Lampung	60/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	045.E/PW.02/IP/04/2025	10/04/2025
10	Reviu Tunggakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	61/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	045.D/PW.02/IP/04/2025	10/04/2025
11	Reviu Tunggakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	59/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	045.C/PW.02/IP/04/2025	10/04/2025
12	Reviu Tunggakan Belanja Tahun Anggaran 2024	69/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	044.D/PW.02/IP/03/2025	27/03/2025
13	Reviu Tunggakan Belanja Tahun Anggaran 2024 pada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir	68/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	088/PW.02/IP/05/2025	22/05/2025
14	Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudited Tingkat UAPPA-W	54/PW.02/IP/03/2025	12/03/2025	044.A/PW.02/IP/03/2025 072/PW.02/IP/05/2025	27/03/2025 14/05/2025
15	Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudited Tingkat UAPPA-W	176/PW.02/IP/07/2025	18/07/2025	046.C/CHR/IP.I/VII/2025	28/07/2025
16	Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudited Tingkat Wilayah	32/PW.02/IP/02/2025	10/02/2025	021.B/CHR/IP.I/3/2025	14/03/2025
17	Reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2025 Wilayah	32/PW.02/IP/02/2025	10/02/2025	021.C/CHR/IP.I/3/2025	14/03/2025
18	Reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2025 Wilayah	45/PW.02/IP/02/2025	26/02/2025	017/PW.02/IP/02/2025	28/02/2025
19	Reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2025 Wilayah	269/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	204/PW.02/IP/10/2025	28/10/2025
20	Reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2025 Wilayah	26/PW.02/IP/01/2025	28/01/2025	014/PW.02/IP/02/2025	10/02/2025
21	Reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2025 Wilayah Provinsi Papua Pegunungan	19/PW.02/IP/01/2025	20/01/2025	014.A/PW. 02/IP/02/2025	10/02/2025
22	Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Unaudited Tingkat UAPPA-W	18/PW.02/IP/01/2025	17/01/2025	020/PW.02/IP/03/2024	06/03/2025
23	Reviu atas Laporan Keuangan KL Semester I Tahun 2025 Wilayah	17/PW.02/IP/01/2025	17/01/2025	021/PW.02/IP/03/2025	06/03/2025
24	Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Bawaslu Tahun 2025 tingkat UAPA	62/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	044.C/PW.02/IP/03/2025	27/03/2025
25	Reviu LK Semester I dan Triwulan III pada Mitra Kerja Inspektorat Wilayah II	99/PW.02/IP/07/2025 143/PW.02/IP/10/2025	17/7/2025 14/10/2025	142/CHR/IP.II/XI/2025 004/CHR/IP.II/II/2025 005/CHR/IP.II/II/2025 006/CHR/IP.II/II/2025 007/CHR/IP.II/II/2025 008/CHR/IP.II/II/2025	11/26/2025 25/02/2025 25/02/2025 25/02/2025 25/02/2025 25/02/2025
26	Reviu LK Tahunan (1 LHR): Jawa Barat, Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan Bawaslu Provinsi Papua Barat	19/PW.02/IP/02/2025	12/02/2025	009.B/CHR/IP.III/02/2025	25/02/2025
27	Reviu LK TW III 2025	150/PW.02/IU/10/2025	16/10/2025	144/CHR/IP.III/11/2025 118/CHR/IP.III/10/2025	27/11/2025 31/10/2025
28	Reviu PIPK Bawaslu	35/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	116/PW.02/IP/07/2025	10/07/2025
B	**Reviu Rencana Kinerja Anggaran**				
1	**Reviu Anggaran Hibah**				
29	Reviu Anggaran Hibah Non Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku	312/PW.02/IP/11/2025	26/11/2025	143/CHR/IP.I/XI/2025	27/11/2025
30	Reviu Anggaran Hibah Non Pemilihan Tahun Anggaran 2025 pada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur	119/PW.02/IP/06/2025	11/06/2025	042/CHR/IP.I/VI/2025	26/06/2025
31	Reviu Anggaran Hibah Non Tahapan Pemilihan Tahun Anggaran 2025 pada Bawaslu Kota Jayapura	283/PW.02/IP/11/2025	05/11/2025	126.A/CHR/IP.I/XI/2025	07/11/2025
32	Reviu Asistensi Penyusunan Dana Hibah PSU Bawaslu Provinsi Papua	47/PW.02/IP/03/2025	02/28/2025	021.A/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025

Lampiran 5.

Rincian *Output* Laporan Hasil Reviu Keuangan dan Kinerja Tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Reviu atas Anggaran Hibah Non Tahapan Tahun Anggaran 2025 pada Bawaslu Provinsi Banten	268/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	115/CHR/IP.I/X/2025	31/10/2025
34	Reviu atas Usulan Permohonan Penerimaan Dana Hibah non Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	106/PW.02/IP/04/2025	29/04/2025	031/CHR/IP.I/IV/2025	29/04/2025
35	Reviu atas Usulan Permohonan Penerimaan Dana Hibah non Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	106/PW.02/IP/04/2025	29/04/2025	032/CHR/IP.I/IV/2025	29/04/2025
36	Reviu Usulan Anggaran Dana Hibah Non Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Jayapura	133/PW.02/IP/07/2025	04/07/2025	043/CHR/IP.I/VII/2025	09/07/2025
37	Reviu Usulan Anggaran Dana Hibah Non Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Sarmi	134/PW.02/IP/07/2025	04/07/2025	044/CHR/IP.I/VII/2025	09/07/2025
38	Reviu Usulan Anggaran Dana Hibah Non Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Yapen	135/PW.02/IP/07/2025	04/07/2025	045/CHR/IP.I/VII/2025	09/07/2025
39	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	010/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
40	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	011/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
41	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	012/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
42	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	013/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
43	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	014/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
44	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	015/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
45	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	016/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
46	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	017/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
47	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	018/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
48	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	019/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
49	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	020/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
50	Reviu Usulan Dana Hibah PSU Bupati dan Wakil Bupati	71/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025	021/CHR/IP.I/III/2025	14/03/2025
2	**Reviu Revisi Anggaran**				
51	Reviu Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Bawaslu dalam rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026	337/PW.02/IP/12/2025	17/12/2025	276/PW.02/IP/12/2025	19/12/2025
52	Reviu Revisi Anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang	117/PW.02/IP/05/2025	22/05/2025	036/CHR/IP.I/V/2025	28/05/2025
53	Reviu atas Revisi Anggaran Antar Satker Tahun Anggaran 2025 pada Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten Sleman, dan Bawaslu Kabupaten Bantul	93/PW.02/IP/04/2025	08/04/2025	030/CHR/IP.I/IV/2025	09/04/2025
54	Reviu atas Revisi Anggaran Puslitbangdiklat Tingkat KPA Tahun Anggaran 2025	111/PW.02/IP/05/2025	09/05/2025	033/CHR/IP.I/V/2025	21 Mei 2025
55	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tahun 2025 pada Biro Keuangan dan BMN	90/PW.02/IP/03/2025	24/03/2025	027/CHR/IP.I/III/2025	25/03/2025
56	Reviu Pemanfaatan Anggaran Blokir yang Terancam pada Lampiran VI.A DIPA Bawaslu Tahun Anggaran 2025 - Tahap II	246/PW.02/IP/09/2025	29/09/2025	151/PW.02/IP/10/2025	09/10/2025
57	Reviu Pemanfaatan Anggaran Blokir yang Tercantum pada Lampiran VI.A DIPA Bawaslu Tahun Anggaran 2025	116/PW.02/IP/05/2025	27/05/2025	091/PW.02/IU/06/2025	05/06/2025
58	Reviu Revisi Anggaran Biro Keuangan dan BMN	142/PW.02/IP/07/2025 137/PW.02/IP/07/2025	07/07/2025	046/CHR/IP/I/VII/2025	14/07/2025
59	Reviu Revisi Anggaran Tingkat DJA ke-03 dan Usulan Pemanfaatan Anggaran Blokir Tahun Anggaran 2025	241/PW.02/IP/09/2025	18/09/2025	143/PW.02/IP/09/2025 149/PW.02/IP/09/2025	25/09/2025 30/09/2025
60	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	208.A/PW.02/IP/10/2025	31/10/2025
61	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	145.A/CHR/IP.I/XI/2025	27/11/2025
62	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	141.A/CHR/IP.1/XI/2025	24/11/2025
63	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	148.A/CHR/IP.III/XI/2025	28/11/2025
64	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	141.B/CHR/IP.1/XI/2025	24/11/2025
65	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	148.B/CHR/IP.III/XI/2025	28/11/2025
66	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	141.C/CHR/IP.1/XI/2025	24/11/2025
67	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	145.B/CHR/IP.I/XI/2025	27/11/2025
68	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	109/CHR/IP.1/X/2025	31/10/2025

Lampiran 5.

Rincian *Output* Laporan Hasil Reviu Keuangan dan Kinerja Tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	111/CHR/IP.1/X/2025	31/10/2025
70	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	112/CHR/IP.1/X/2025	31/10/2025
71	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu DKI	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	110/CHR/IP.1/X/2025	31/10/2025
72	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu Maluku	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	113/CHR/IP.1/X/2025	31/10/2025
73	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) di Bawaslu Papua	273/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025	114/CHR/IP.1/X/2025	31/10/2025
74	Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Tahap Akhir) pada Mitra Kerja Inspektorat Wilayah II	44/PW.02/IP/03/2025 135/PW.02/IP/10/2025 151/PW.02/IP/10/2025	13/03/2025 5/10/2025 27/10/2025	026.A/CHR/IP.II/III/2025 026.B/CHR/IP.II/III/2025 026.C/CHR/IP.II/III/2025 026.D/CHR/IP.II/III/2025 026.E/CHR/IP.II/III/2025 026.F/CHR/IP.II/III/2025 026.G/CHR/IP.II/III/2025 026.H/CHR/IP.II/III/2025 028.A/CHR/IP.II/III/2025	24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 24/03/2025 26/03/2025
3	**Reviu RKA K/L 2023**				
75	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BA 115) Tahun Anggaran 2026	193/PW.02/IP/07/2025	29/07/2025	130/PW.02/IU/07/2025	31/07/2025
76	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	102/CHR/IP.I/10/2025	23/10/2025
77	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	082/CHR/IP.I/10/2025	10/10/2025
78	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	083/CHR/IP.I/10/2025	10/10/2025
79	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	085/CHR/IP.I/10/2025	11/10/2025
80	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	084/CHR/IP.I/10/2025	10/10/2025
81	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	087/CHR/IP.I/10/2025	11/10/2025
82	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	086/CHR/IP.I/10/2025	11/10/2025
83	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	090/CHR/IP.I/10/2025	15/10/2025
84	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	091/CHR/IP.I/10/2025	15/10/2025
85	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	094/CHR/IP.I/10/2025	15/10/2025
86	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	092/CHR/IP.I/10/2025	15/10/2025
87	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	093/CHR/IP.I/10/2025	15/10/2025
88	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	089/CHR/IP.I/10/2025	15/10/2025
89	Reviu Usulan Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara	118/PW.02/IU/08/2025 117/PW.02/IU/08/2025	05/08/2025	060/CHR/IP.III/VIII/2025	30/4/2025
90	Unit-Unit Kerja di Inspektorat Wilayah III - Anggaran Operasional	62/PW.02/IP/08/2025	05/08/2025	133.A/PW.02/IP/08/2025	18/8/2025
91	Reviu Anggaran Inspektorat Utama	138/PW.02/IU/09/2025	29/09/2025	088/CHR/IP.III/10/2025	22/5/2025
92	Reviu RKA KL pada Unit-Unit Kerja di Inspektorat Wilayah III	141/PW.02/IU/10/2025	05/10/2025	150/CHR/IP.III/12/2025 116/CHR/IP.III/10/2025 153/CHR/IP.III/12/2025	5/12/2025 31/10/2025 09/12/2025
C	**Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**				

Lampiran 5.

Rincian *Output* Laporan Hasil Reviu Keuangan dan Kinerja Tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
93	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Bawaslu D.I. Yogyakarta	76/PW.02/IP/03/2025	19/03/2025	067.C/PW.02/IP/4/2025	30/04/2025
94	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Banten	87/PW.02/IP/03/2025	24/03/2025	046.F/PW.02/IP/04/2025	14/04/2025
95	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Lampung	88/PW.02/IP/03/2025	24/03/2025	046.G/PW.02/IP/04/2025	14/04/2025
96	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	72/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	046.D/PW.02/IP/04/2025	14/04/2025
97	Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	95/PW.02/IP/04/2025	14/04/2025	059/PW.08/IP/04/2025	30/04/2025
98	Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	86/PW.02/IP/03/2025	24/03/2025	060/PW.08/IP/04/2025	30/04/2025
99	Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	63/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	049/PW.02/IP/04/2025	22/04/2025
100	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Deputi Bidang Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Tahun 2024	188/PW.02/IP/07/2025	28/07/2025	146/PW.02/IP/09/2025	30/09/2025
101	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	124/PW.02/IP/06/2025	16/06/2025	095/PW.02/IP/06/2025	20/06/2023
102	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Maluku	123/PW.02/IP/06/2025	16/06/2025	097/PW.02/IP/06/2025	24/06/2025
103	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	73/PW.02/IP/03/2025	18/03/2025	096/PW.02/IP/06/2025	23/06/2025
104	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Panwaslih Provinsi Aceh	117/PW.02/IP/06/2025	11/06/2025	094/PW.02/IP/06/2025	19/06/2025
105	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	22/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	048/PW.02/IP/04/2025	21/04/2025
106	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	23/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	055/PW.02/IP/04/2025	28/04/2025
107	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	34/PW.02/IP/02/2025	24/02/2025	104/PW.02/IP/07/2025	03/07/2025
108	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	26/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	073/PW.02/IP/05/2025	14/05/2025
109	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	27/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	074/PW.02/IP/05/2025	14/05/2025
110	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	28/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	075/PW.02/IP/05/2025	14/05/2025
111	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	25/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	044.B/PW.02/IP/05/2025	27/3/2025
112	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	21/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	080/PW.02/IP/05/2025	21/5/2025
113	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	24/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	079/PW.02/IP/05/2025	21/5/2025
114	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	30/PW.02/IP/02/2025	24/02/2025	044.C1/PW.02/IP.II/III/2025	27/3/2025
115	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	33/PW.02/IP/02/2025	24/02/2025	018.A/PW.02/IP.II/III/2025	3/3/2025
116	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	32/PW.02/IP/02/2025	24/02/2025	021.A1/PW.02/IP.II/III/2025	6/3/2025
117	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	29/PW.02/IP/02/2025	24/02/2025	044.C1/PW.02/IP/3/2025	27/03/2025
118	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	23/PW.02/IP/02/2025	17/02/2025	016/PW.02/IP/02/2025	24/02/2025
119	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	61/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	100/PW.02/IP/06/2025	25/06/2025
120	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	57/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	112/PW.02/IP/07/2025	07/07/2025
121	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	56/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	115/PW.02/IP/07/2025	09/07/2025
122	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	53/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	111/PW.02/IP/07/2025	07/07/2025
123	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	60/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	098/PW.02/IP/06/2025	25/06/2025
124	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	51/PW.02/IP/06/2025	10/06/2025	113/PW.02/IP/07/2025	07/07/2025
125	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	55/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	105/PW.02/IP/07/2025	04/07/2025
126	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	54/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	107/PW.02/IP/07/2025	07/07/2025
127	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	59/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	109/PW.02/IP/07/2025	07/07/2025
128	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	62/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	099/PW.02/IP/06/2025	25/06/2025
129	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	58/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	110/PW.02/IP/07/2025	07/07/2025
130	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	52/PW.02/IU/06/2025	10/06/2025	114/PW.02/IP/07/2025	07/07/2025
D	**Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara**				
131	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2027 tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)	313/PW.02/IP/11/2025	24/11/2025	247/PW.02/IU/12/2025	03/12/2025
132	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2027 tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)	164/PW.02/IP/11/2025	25/11/2025	155/CHR/IP.II/XII/2025 156/CHR/IP.II/XII/2025 157/CHR/IP.II/XII/2025 158/CHR/IP.II/XII/2025 159/CHR/IP.II/XII/2025 160/CHR/IP.II/XII/2025 161/CHR/IP.II/XII/2025 162/CHR/IP.II/XII/2025 163/CHR/IP.II/XII/2025 164/CHR/IP.II/XII/2025 165/CHR/IP.II/XII/2025 166/CHR/IP.II/XII/2025	9/12/2025 9/12/2025 9/12/2025 9/12/2025 9/12/2025 29/12/2025 29/12/2025 29/12/2025 29/12/2025 29/12/2025 29/12/2025 29/12/2025

Lampiran 5.

Rincian *Output* Laporan Hasil Reviu Keuangan dan Kinerja Tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
133	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2027 tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)	183/PW.02/IU/11/2025	27/11/2025	247/PW.02/IU/12/2025	3/12/2025
E	**Reviu atas Pertanggungjawaban Keuangan pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota**				
134	Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	37/PW.02/IP/02/2025	13/02/2025	025/PW.02/IP/03/2025	10/03/2025
135	Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung	39/PW.02/IP/02/2025	13/02/2025	033/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025
136	Reviu Atas Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	28/PW.02/IP/02/2025	03/02/2025	018/PW.02/IP/03/2025	03/03/2025
137	Reviu Atas Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	29/PW.02/IP/02/2025	04/02/2025	032/PW.02/IP/03/2025	13/03/2025
138	Reviu Atas Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	36/PW.02/IP/02/2025	13/02/2025	058/PW.02/IP/04/2025	30/04/2025
139	Reviu Atas Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	34/PW.02/IP/02/2025	12/02/2025	045.F/PW.02/IP/04/2025	10/04/2025
140	Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Panwaslu Kecamatan	11/PW.02/IP/01/2025	09/01/2025	027/PW.02/IP/03/2025	10/02/2025
141	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Panwascam	12/PW.02/IP/01/2025	09/01/2025	010.B/PW.02/IP/01/2025	31/01/2025
142	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Panwascam	13/PW.02/IP/01/2025	10/01/2025	010.C/PW.02/IP/01/2025	31/01/2025
143	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Panwascam	10/PW.02/IP/01/2025	09/01/2025	019/PW.02/IP/03/2025	03/03/2024
144	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Panwascam	9/PW.02/IP/01/2025	09/01/2025	014.C/PW.02/IP/02/2025	10/02/2025
145	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan Periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2025 pada Bawaslu Kabupaten Sleman	310/PW.02/IP/11/2025 311/PW.02/IP/11/2025	26/11/2025	272/PW.02/IP/12/2025	17/12/2025
146	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Bawaslu TA 2024 oleh BPK RI pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi target sampel BPK RI	006/PW.02/IP/01/2025	30/01/2025	019.B/PW.09/IP/03/2025	3/2/2025
147	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Bawaslu TA 2024 oleh BPK RI pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menjadi target sampel BPK RI (APBD)	9/PW.02/IP/01/2025	30/01/2025	044.B3/PW.02/IP/3/2025	27/03/2025
148	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Bawaslu TA 2024 oleh BPK RI pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menjadi target sampel BPK RI (APBN)	9/PW.02/IP/01/2025	30/01/2025	044.B2/PW.02/IP/3/2025	27/03/2025
149	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Bawaslu TA 2024 oleh BPK RI pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang menjadi target sampel BPK RI	15/PW.02/IP/02/2025	07/02/2025	044.B1/PW.02/IP.II/III/2025	27/3/2025
F	**Reviu Rencana Kerja (Renja)**				
150	Reviu Anggaran Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII KORPRI Tahun 2025	243/PW.02/IP/09/2025	22/09/2025	069/CHR/IP.I/IX/2025	26/09/2025
151	Reviu Anggaran Pelaksanaan Swakelola Latihan Dasar (Latsar) CPNS Bawaslu Tahun 2024 pada Unit Kerja Puslitbangdiklat Tahun Anggaran 2025	190/PW.02/IP/07/2025	29/07/2025	067/CHR/IP.I/09/2025	09/09/2025
G	**Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)**				
152	Counterpart Tim BPKP dalam Evaluasi Disiplin Belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Triwulan IV Tahun 2025	168/PW.02/IU/11/2025	11/11/2025	294/PW.03/IP/12/2025	29/12/2025
153	Evaluasi Disiplin Belanja Triwulan III Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025	201/PW.03/IP/08/2025	14/08/2025	142/PW.03/IP/09/2025	24/09/2025
154	Reviu Belanja Operasional Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026	256/PW.02/IP/10/2025	05/10/2025	203/PW.02/IP/10/2025	27/10/2025
155	Reviu PAPBJ TW I Tahun 2025	48/PW.02/IP/03/2025	07/03/2025	034/PW.02/IP/03/2025	19/03/2025
156	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun 2025 pada seluruh Unit Kerja Bawaslu	48/PW.02/IP/03/2025	07/03/2025	034/PW.02/IP/03/2025	19/03/2025
157	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan II Tahun 2025 pada seluruh Unit Kerja Bawaslu	108/PW.08/IP/08/2025	15/08/2025	Surat Plt. Inspektur Wilayah II	
158	Pemantauan Pemenuhan Permintaan Data/Informasi dalam rangka Evaluasi Disiplin Belanja Triwulan III Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 oleh BPKP pada Mitra Kerja Inspektorat Wilayah II	114/PW.03/IP/08/2025	19/8/2025	149.A/PW.08.00/IP/09/2025	30/9/2025
159	Counterpart Tim BPKP dalam Evaluasi Disiplin Belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Triwulan IV Tahun 2025	168/PW.02/IU/11/2025	11/11/2025	294/PW.02/IU/12/2025	29/12/2025
160	Telaah Terhadap Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo perihal Permohonan Petunjuk atas Perbaikan Kendaraan Dinas Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	63/PW.09/IU/06/2025	16/06/2025	32/PW.09/IP/06/2025	16/06/2025

Lampiran 5.

Rincian *Output* Laporan Hasil Reviu Keuangan dan Kinerja Tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
161	Telaah atas Paket Sewa Kendaraan Roda Empat Operasional 9 Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.	124/PW.09/IU/08/2025	21/08/2025	56/PW.09/IP/08/2025 189/PW.09/IU/08/2025	26/08/2025
162	Penyampaian Telaah Terhadap Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat perihal Paket Sewa Kendaraan Roda Empat Operasional 9 Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	168/PW.02/IU/11/2025	11/11/2025	275/PW.08.02/IP/12/2025	12/2025
163	Evaluasi Belanja BPKP Triwulan III	63/PW.03/IP/08/2025	14/08/2025	202/PW.03/IP/10/2025	27/10/2025
164	Laporan Hasil Reviu Pertanggungjawaban atas Tunggakan Dana Hibah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kab/kot	8/PW.02/IP/01/2025	16/01/2025	023/PW.02/IP/03/2025	7/3/2025
H	**Reviu Tunggakan**				
165	Reviu Tunggakan atas Belanja Tahun Anggaran 2024 yang akan Disahkan Tahun Anggaran 2025 pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara	13/PW.02/IP/02/2025	05/02/2025	039/PW.02/IP/03/2025	25/3/2025
166	Reviu Tunggakan atas Belanja Tahun Anggaran 2024 yang akan Disahkan Tahun Anggaran 2025 pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	12/PW.02/IP/02/2025	05/02/2025	035/PW.02/IP/03/2025	19/03/3035
167	Reviu Tunggakan atas Belanja Tahun Anggaran 2024 yang akan Disahkan Tahun Anggaran 2025 pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dI Riau	31/PW.02/IU/02/2025	21/02/2025	017.C/PW.02/IP/02/2025	28/02/2025
168	Reviu Tunggakan atas Belanja Tahun Anggaran 2024 yang akan Disahkan Tahun Anggaran 2025 pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Mitra Inspektorat Wilayah II	40/PW.02/IP/03/2025	11/03/2025	047/PW.09.IP/04/2025	17/04/2025
169	Laporan Hasil Reviu Pertanggungjawaban atas Tunggakan Dana Hibah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kab/kot	8/PW.02/IP/01/2025	16/01/2025	023/PW.02/IP/03/2025	7/3/2025
170	Reviu Pertanggungjawaban Atas Tunggakan Pembayaran Dana Hibah Pilkada Pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur	15/PW.02/IP/02/2025	06/02/2025	024 /PW.02/IP/03/2025	10/3/2024
171	Laporan Hasil Reviu Pertanggungjawaban atas Tunggakan Pembayaran Dana Hibah pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur	46/PW.02/IP/04/2025	28/04/2025	66/PW.09/IP/04/2025	30/04/2025
172	Reviu Pertanggungjawaban Atas Tunggakan Pembayaran Dana Hibah Pilkada Pada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	72/PW.02/IU/06/2025	25/06/2025	101/PW.02/IP/06/2025	26/06/2025
I	**Reviu Pisah Batas**				
173	Reviu Pisah Batas Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	7/PW.02/IP/01/2025	28/01/2025	029.A/PW.02/IP/03/2025	27/3/2025
174	Reviu Pisah Batas pada Bawaslu Provinsi Riau TA 2025	93/PW.02/IP/07/2025	14/7/2025	136.A/PW.09/IP/09/2025	2/9/2025
J	**Reviu PSU**				
175	Reviu Kinerja dan Pertanggungjawaban Dana Pengawasan PSU pada Bawaslu Kabupaten Pesawaran terdampak Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025	114/PW.02/IP/05/2025	20/05/2025	093.A/PW.02/IP/06/2025	18/06/2025
176	Reviu Kinerja dan Pertanggungjawaban Dana Pengawasan PSU pada Bawaslu Kabupaten Serang terdampak Putusan MK Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 19 Februari 2025	101/PW.02/IP/04/2025	17/04/2025	089/PW.02/IP/05/2025	28/05/2025
177	Reviu Kinerja dan Pertanggungjawaban Dana Pengawasan PSU pada Bawaslu Kota Banjarbaru terdampak Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025	94/PW.02/IP/04/2025	14/04/2025	067.A/PW.02/IP/04/2025	30/04/2025
178	Reviu Kinerja dan Pertanggungjawaban Dana Pengawasan PSU Terdampak Putusan MK Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 februari 2025	92/PW.02/IP/04/2025	10/04/2025	067.B/PW.02/IP/04/2025	30/04/2025
179	Reviu Pertanggungjawaban Keuangan atas Dana Hibah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 di Bawaslu Provinsi Papua	286/PW.02/IP/11/2025	07/11/2025	271/PW.02/IP/12/2025	16/12/2025
180	Reviu Atas Anggaran Dana Hibah Pilkada Sesuai Dengan Keputusan Bawaslu Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024 Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur	12/PW.02/IP/01/2025	12/02/2025	003/CHR/IP.III/I/2025	31/01/2025
181	Reviu Atas Revisi Anggaran Dana Hibah Pilkada Sesuai Dengan Keputusan Bawaslu Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024 Pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat	25/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	009/CHR/IP.III/II/2025	25/02/2025
182	Reviu Anggaran Dana Hibah Pemungutan Suara (PSU) terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 1. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat 3. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu 4. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara 5. Bawaslu Kabupaten Magetan 6. Bawaslu Kabupaten Barito Utara	34/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	1. 022/CHR/IP.III/III/2025 2. 023/CHR/IP.III/III/2025 3. 024/CHR/IP.III/III/2025 4. 028/CHR/IP.III/III/2025 5. 026/CHR/IP.III/III/2025 6. 025/CHR/IP.III/III/2025	17/03/2025 17/03/2025 21/03/2025 24/03/2025 24/03/2025

Lampiran 5.

Rincian *Output* Laporan Hasil Reviu Keuangan dan Kinerja Tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
183	Reviu Kinerja Anggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara Reviu Kinerja Anggaran Pelaksanaan PSU pada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Reviu Kinerja Anggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman Reviu Kinerja Anggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo Utara	40/PW.02/IU/04/2025	11/04/2025	068/PW.02/IP/05/2025 071/PW.02/IP/05/2025 064/PW.02/IP/04/2025 050.A/PW.02/IP/04/2025	9/5/2025 9/5/2025 30/04/2025 23/04/2025
184	Reviu Atas Anggaran Dana Hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Terhadap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025 Pada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	48/PW.02/IP/05/2025	22/05/2025	035/CHR/IP.III/V/2025	28/05/2025
185	Reviu Atas Anggaran Dana Hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Terhadap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025 Pada Bawaslu Kabupaten Barito Utara	63/PW.02/IU/06/2025	11/06/2025	041/CHR/IP.III/VI/2025	13/06/2025
K	**Reviu Tematik**				
186	Reviu Atas Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025 Sesuai Dengan Keputusan Bawaslu Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024 Pada Bawaslu Kabupaten Bangka Reviu Atas Anggaran Dana Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 Sesuai Dengan Keputusan Bawaslu Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024 Pada Bawaslu Kota Pangkal Pinang	11/PW.02/IP/01/2025	21/01/2025	- 001/CHR/IP.III/I/2025 - 002/CHR/IP.III/I/2025	24/01/2025
187	Reviu Atas Anggaran Dana Hibah Pilkada Sesuai Dengan Keputusan Bawaslu Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024 Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur	12/PW.02/IP/01/2025	22/01/2025	003/CHR/IP.III/I/2025	31/01/2025
188	Reviu Atas Revisi Anggaran Dana Hibah Pilkada Sesuai Dengan Keputusan Bawaslu Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024 Pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat	25/PW.02/IP/02/2025	21/02/2025	009/CHR/IP.III/II/2025	25/02/2025
189	Reviu Anggaran Dana Hibah Pemungutan Suara (PSU) terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 1. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 2. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat 3. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu 4. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara 5. Bawaslu Kabupaten Magetan 6. Bawaslu Kabupaten Barito Utara	34/PW.02/IP/03/2025	17/03/2025	1. 022/CHR/IP.III/III/2025 2. 023/CHR/IP.III/III/2025 3. 024/CHR/IP.III/III/2025 4. 028/CHR/IP.III/III/2025 5. 026/CHR/IP.III/III/2025 6. 025/CHR/IP.III/III/2025	17/03/2025 17/03/2025 21/03/2025 24/03/2025 24/03/2025
190	Reviu Kinerja Anggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara Reviu Kinerja Anggaran Pelaksanaan PSU pada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Reviu Kinerja Anggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman Reviu Kinerja Anggaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo Utara	40/PW.02/IU/04/2025	11/04/2025	068/PW.02/IP/05/2025 071/PW.02/IP/05/2025 064/PW.02/IP/04/2025 050.A/PW.02/IP/04/2025	9/5/2025 9/5/2025 30/04/2025 23/04/2025
191	Reviu Atas Anggaran Dana Hibah Pemungutan Suara Ulang (Psu) Terhadap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025 Pada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	48/PW.02/IP/05/2025	22/05/2025	035/CHR/IP.III/V/2025	28/05/2025
192	Reviu Atas Anggaran Dana Hibah Pemungutan Suara Ulang (Psu) Terhadap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025 Pada Bawaslu Kabupaten Barito Utara	63/PW.02/IU/06/2025	11/06/2025	041/CHR/IP.III/VI/2025	13/06/2025
193	Reviu Revisi Dana Hibah Non Pilkada Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung	40/PW.02/IP/03/2025	22/03/2025	029/CHR/IP.III/III/2025	27/03/2025
194	Reviu Dana Hibah Non Pilkada Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor	49/PW.02/IP/05/2025	27/05/2025	037/CHR/IP.III/VI/2025	2/6/2025
195	Reviu Dana Hibah Non Pilkada Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi	51/PW.02/IP/05/2025	27/05/2025	040/CHR/IP.III/VI/2025	2/6/2025
196	Reviu Dana Hibah Non Pilkada Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok	52/PW.02/IP/05/2025	27/05/2025	038/CHR/IP.III/VI/2025	2/6/2025
197	Reviu Dana Hibah Non Pilkada Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi	53/PW.02/IP/05/2025	27/05/2025	039/CHR/IP.III/VI/2025	2/6/2025
198	Reviu Dana Hibah Non Pilkada Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi	57/PW.02/IP/07/2025	30/07/2025	048/CHR/IP.III/VIII/2025	01/08/2025
199	Reviu Revisi Penerimaan Dana Hibah Operasional Non Pilkada Pada Bawaslu Kabupaten Bekasi	178/PW.02/IU/11/2025	19/11/2025	146/CHR/IP.III/XI/2025	28/11/2025
200	Reviu Dana Hibah Non Pilkada Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Teluk Bintuni	175/PW.02/IU/11/2025	19/11/2025	139/CHR/IP.III/XI/2025	28/11/2025

Lampiran 6.

Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Pendampingan Pemeriksaan Audit Interim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)**				
1	Pendampingan Pemeriksaan Audit Interim BPK Bawaslu Provinsi Jawa Barat	7/PW.09/IP/01/2025	16/01/2025	119/PW.09/IP/07/2025	14/7/2025
2	Pendampingan Pemeriksaan Audit Interim BPK Bawaslu Provinsi Jawa Timur	13/PW.02/IP/02/2025	01/02/2025	017.E/PW.02/IP/03/2025	01/03/2025
B	**Evaluasi Pengelolaan Whistleblowing System (WBS), Penanganan Pengaduan, dan Benturan Kepentingan**				
3	Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR! Periode Triwulan II (April s.d. Juni) Tahun 2025 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.	39/PW.09/IU/03/2025	24/03/2025	2/PW.04/IU/03/2025	26/03/2025
4	Pengawasan Lainnya dalam Rangka Monitoring Tindak Lanjut Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 1 Januari s.d. Triwulan III Tahun 2025	52/PW.09/IU/06/2025	03/06/2025	B-1326/PW.09/SJ/06/2025	10/06/2025
5	Pengawasan Lainnya dalam Rangka Monitoring Tindak Lanjut Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 1 Januari s.d. Triwulan IV Tahun 2025	132/PW.08/IU/09/2025	08/09/2025	B-1935/PW.08/SJ/09/2025	24/09/2025
6	Pemantauan Pengelolaan Whistleblowing System, Penanganan Pengaduan, Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Utama Periode Triwulan II Tahun 2025	113/PW.08/IP/08/2025	19/08/2025	137/PW.08/IU/09/2025	10/09/2025
7	*Monitoring* Pengelolaan *Whistleblowing System*, Penanganan Pengaduan, Benturan Kepentingan dan Gratifikasi serta *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/APIP pada Bawaslu Kabupaten Pemalang	127/PW.08/IP/09/2025 10 September 2025	10/09/2025	212/PW.08/IP/11/2025	06/10/2025
8	Laporan kompilasi *monitoring* atas WBS, Penanganan Pengaduan, dan Benturan Kepentingan seluruh unit wilayah III	203/PW.09/IU/12/2025	16/12/2025	280/PW.08.IP/12/2025	22/12/2025
C	**Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**				
9	Evaluasi AKIP Bawaslu Provinsi Lampung	157/PW.03/IP/07/2025	14/07/2025	223.A/PW.03/IP/11/2025	11/11/2025
10	Evaluasi AKIP Bawaslu Provinsi Banten	159/PW.03/IP/07/2025	14/07/2025	243/PW.03/IP/11/2025	26/11/2025
11	Evaluasi AKIP Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	158/PW.03/IP/07/2025	14/07/2025	266/PW.03/IP/12/2025	10/12/2025
12	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	165/PW.03/IP/07/2025	14/07/2025	148/PW.03/IP/09/2025	30/09/2025
13	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	167/PW.03/IP/07/2025	14/07/2025	147/PW.03/IP/09/2025	30/09/2025
14	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	153/PW.03/IP/07/2025	11/07/2025	248/PW.03/IP/12/2025	04/12/2025
15	Evaluasi AKIP Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	160/PW.03/IP/07/2025	11/07/2025	159/PW.03/IP/10/2025	24/10/2025
16	Evaluasi AKIP Bawaslu RI Tahun 2025	108/PW.03/IU/07/2025	25/07/2025	B-122/PW.03/IU/09/2025	25/09/2025
17	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu D.I Yogyakarta	138/PW.03/IP/07/2025	07/07/2025	133/PW.03/IP/08/2025	08/08/2025
18	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Panwaslih Provinsi Aceh	148/PW.03/IP/07/2025	11/07/2025	144/PW.03/IP/09/2025	26/09/2025
19	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Maluku	208/PW.03/IP/08/2025	22/08/2025	281/PW.03/IP/12/2025	22/12/2025
20	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	198/PW.03/IP/08/2025	06/08/2025	258/PW.03/IP/12/2025	5/12/2025
21	Evaluasi AKIP Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI	185/PW.03/IP/07/2025	24/07/2025	150/PW.03/IP/10/2025	01/10/2025
22	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Bawaslu Kabupaten Sleman	227/PW.03/IP/09/2025	11/09/2025	222/PW.03/IP/11/2025	11/11/2025
23	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Kota Yogyakarta	219/PW.03/IP/09/2025	08/09/2025	084/PW.03/IP/10/2025	14/10/2025
24	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Kabupaten Bantul	218/PW.03/IP/09/2025	08/09/2025	157/PW.03/IP/10/2025	21/10/2025
25	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	66/PW.03/IP/04/2025	21/04/2025	270/PW.03/IP/12/2025	12/12/2025
26	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	81/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	268/PW.03/IP/12/2025	12/12/2025
27	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	82/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	269/PW.03/IP/12/2025	12/12/2025
28	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Bengkulu	87/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	223/PW.03/IP/11/2025	11/11/2025
29	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	88/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	186/PW.03/IP/10/2025	24/10/2025
30	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara	79/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	250/PW.03/IP/12/2025	05/12/2025
31	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	80/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	249/PW.03/IP/12/2025	05/12/2025
32	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	78/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	251/PW.03/IP/12/2025	05/12/2025
33	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Bali	84/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	252/PW.03/IP/12/2025	05/12/2025
34	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah	86/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	254/PW.03/IP/12/2025	05/12/2025
35	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Riau	85/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	253/PW.03/IP/12/2025	05/12/2025

Lampiran 6.

Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	83/PW.03/IP/05/2025	16/05/2025	256/PW.03/IP/12/2025	05/12/2025
37	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Tahun 2025	104/PW.03/IP/08/2025	04/08/2025	282/PW.03/IP/12/2025	23/12/2025
38	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Jambi	54/PW.03/IP/07/2025 53/PW.03/IP/07/2025	07/07/2025	215/PW.03/IP/11/2025	7/11/2025
39	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	77/PW.03/IU/07/2025	04/07/2025	136/PW.03/IP/09/2025	02/09/2025
40	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80/PW.03/IU/07/2025 83/PW.03/IU/07/2025	05/07/2025	228/PW.03/IP/11/2025	17/11/2025
41	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat	78/PW.03/IU/07/2025	04/07/2025	134/PW.03/IP/08/2025	26/08/2025
42	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur	88/PW.03/IU/07/2025 96/PW.03/IU/07/2025	07/07/2025	214/PW.03/IP/11/2025	7/11/2025
43	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	56/PW.03/IP/07/2025 55/PW.03/IP/07/2025	07/07/2025	216/PW.03/IP/11/2025	7/11/2025
44	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	91/PW.03/IU/07/2025 93/PW.03/IU/07/2025	07/07/2025	206.B/PW.03/IP/10/2025	31/10/2025
45	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	81/PW.03/IU/07/2025 82/PW.03/IU/07/2025	05/07/2025	211/PW.03/IP/11/2025	5/11/2025
46	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	84/PW.03/IU/07/2025 95/PW.03/IU/07/2025	07/07/2025	239/PW.03/IP/11/2025	24/11/2025
47	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Gorontalo	92/PW.03/IU/07/2025 90/PW.03/IU/07/2025	07/07/2025	206.A/PW.03/IP/10/2025	31/10/2025
48	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu Provinsi Papua Barat	87/PW.03/IU/07/2025 89/PW.03/IU/07/2025	07/07/2025	213/PW.03/IP/11/2025	7/11/2025
49	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Utama	79/PW.03/IU/07/2025 94/PW.03/IU/07/2025	05/07/2025	208/PW.03/IP/10/2025	31/10/2025
D	**Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas**				
50	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum s.d. Triwulan I Tahun 2025	50.A/PW.03/IU/03/2025	24/03/2025	B-29/PW.03/IU/03/2025	31/03/2025
51	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum s.d. Triwulan II Tahun 2025	76/PW.03/IU/07/2025	04/07/2025	B-97/PW.03/IU/07/2025	24/07/2025
52	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum s.d. Triwulan III Tahun 2025	142/PW.03/IU/10/2025	03/10/2025	B-134/PW.03/IU/10/2025	23/10/2025
53	Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bebas dari Korupsi (WBK) pada Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta	233/PW.05/IP/09/202	11/09/2025	221/PW.05/IP/11/2025	11/11/2025
54	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Triwulan I Tahun 2025	50.A/PW.03/IU/03/2025	24/03/2025	B-29/PW.03/IU/03/2025	31/03/2025
55	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Triwulan II Tahun 2025	76/PW.03/IU/07/2025	04/06/2025	B-97/PW.03/IU/07/2025	24/07/2025
56	Pembinaan Persiapan Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 pada Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	102/PW.09/IP/08/2025	4/8/2025	138/PW.09/IP/09/2025	12/09/2025
57	Pembinaan Persiapan Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi Bawaslu	101/PW.09/IP/08/2025	04/08/2025	153/PW.09/IP/10/2025	10/10/2025
58	*Monitoring* Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/APIP pada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	125/PW.08/IP/09/2025 9 September 2025	09/09/2025	152/PW.08/IP/10/2025	10/09/2025
59	*Monitoring* Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/APIP pada Bawaslu Kabupaten Demak	120/PW.08/IP/09/2025 9 September 2025	09/09/2025	155/PW.02/IP/10/2025	14/10/2025
60	Monitoring Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/APIP pada Bawaslu Kabupaten Kendal	126/PW.08/IP/09/2025 9 September 2025	09/09/2025	224/PW.08/IP/11/2025	13/11/2025
61	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Triwulan III dan Ex-Ante Tahun 2025	142/PW.03/IU/10/202	03/10/2025	B-134/PW.03/IU/10/2025	23/10/2025
62	*Monitoring* Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/APIP pada Bawaslu Kota Pekalongan	141/PW.08/IP/10/2025	06/10/2025	185/PW.08/IP/10/2025	24/10/2025
63	Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Triwulan II Tahun 2025	76/PW.03/IU/07/2025	04/07/2025	B-97/PW.03/IU/07/2025	24/07/2025
64	Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum s.d. Triwulan III Tahun 2025	142/PW.03/IU/10/2025	03/10/2025	B-134/PW.03/IU/10/2025	23/10/2025
65	Roadmap Inspektorat Utama ZONA INTEGRITAS 2025-2029	B-11/PW.09/IU/08/2025	20/08/2025	Tidak ada Nomor	
66	Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Ex-Ante 2025	142/PW.03/IU/10/2025	03/10/2025	B-134/PW.03/IU/10/2025	23/10/2025
E	**Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**				
67	Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Utama	136/PW.09/IP/07/2025	01/07/2025	124/PW.09/IP/07/2025	21/07/2025
68	Pengisian Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	123/PW.09/IU/08/2025	19/08/2025	219/PW.03/IU/11/2025	07/11/2025

Lampiran 6.

Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69	Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Mitra Inspektorat Wilayah II	110/PW.09/IP/08/2025	19/08/2025	219/PW.03/IU/11/2025	07/10/2025
70	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2024-2025	123/PW.09/IU/08/2025	19/08/2025	219/PW.03/IU/11/2025	07/11/2025
71	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Inspektorat Utama Tahun 2025	84/PW.09/K1/06/2025	02/06/2025	141/PW.03/IP/09/2025	23/09/2025
72	Surat penyampaian laporan hasil pendampingan PM SPIP pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	58/PW.09/IP/07/2025	31/07/2025	137.A/PW.03/IP/09/2025	10/09/2025
73	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas PMSPIP Bawaslu Tahun 2025	123/PW.09/IU/08/2025	19/08/2025	219/PW.03/IU/11/2025	07/11/2025
F	**Pemantauan**				
	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI/BPKP/APIP				
74	Verifikasi Bukti Pertanggungjawaban Belanja Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	103/PW.08.02/IP/04/2025	23/04/2025	063/PW.08.02/IP/04/2025	30/04/2024
75	Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 terkait dengan Pengelolaan BMN di Bawaslu	180/PW.08.02/IP/07/2025	21/07/2025	60/PW.08.02/IP/07/2025	23/07/2025
76	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Bawaslu Kabupaten Sleman	232/PW.03/IP/09/2025	11/09/2025	210/PW.08.02/IP/11/2025	03/11/2025
77	Pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	234/PW.08.02/IP/09/2025	15/09/2025	156/PW.08.02/IP/10/2025	15/10/2025
78	Pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Reviu Kinerja dan Pertanggungjawaban Dana Pengawasan PSU pada Bawaslu Kabupaten Serang terdampak Putusan MK Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 19 Februari 2025	127/PW.08.02/IP/06/2025 129/PW.08.02/IP/06/2025	16/06/2025	120/PW.08.02/IP/07/2025	14/07/2025
79	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPK, BPKP, dan APIP pada Bawaslu Kota Serang	216/PW.08.02/IP/09/2025	05/09/2025	158/PW.08.02/IP/02/2025	21/10/2025
80	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP pada Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta	213/PW.08.02/IP/09/2025	02/09/2025	140/PW.08.02/IP/09/2025	23/09/2025
81	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPK, BPKP, dan APIP pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	226/PW.08.02/IP/09/2025	11/09/2025	151.A/PW.08.02/IP/10/2025	09/10/2025
82	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP Dan Inspektorat Utama Pada Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Dki Jakarta	249/PW.08.02/IP/09/2025	30/09/2025	229/PW.08.02/IP/11/2025	17/11/2025
83	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja pada Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2023	300/PW.08.02/IP/11/2025	11/11/2025	261/PW.08.02/IP/12/2025	08/12/2025
84	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional pada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023	292/PW.08.02/IP/11/2025	11/11/2025	260/PW.08.02/IP/12/2025	08/12/2025
85	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP pada Bawaslu Kota Bandar Lampung	302/PW.08/IP/11/2025 303/PW.08/IP/11/2025	13/11/2025	267/PW.08.02/IP/12/2025	12/12/2025
86	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan pada Bawaslu D.I. Yogyakarta dan BPK Perwakilan Tahun 2025	306/PW.08.02/IP/11/2025 307/PW.08.02/IP/11/2025	24/11/2025	278/PW.08.02/IP/12/2025	19/12/2025
87	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran	325/PW.08.02/IP/12/2025	04/12/2025	319/PW.08.02/IP/12/2025	30/12/2025
88	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota	315/PW.08.02/IP/11/2025	27/11/2025	293/PW.08.02/IP/12/2025	29 Desember 2025
89	Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Mitra Kerja Inspektorat Wilayah II Semester I Tahun 2025	98/PW.08.02/IP/07/2025	14/07/2025	184/PW.08.02/IP/102025	24/10/2025
90	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan Tahun 2024	120/PW.09/IU/08/2025	13/08/2025	145/PW.08/IP/09/2025	30/09/2025
91	Monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Bawaslu provinsi dan kab/kota se Sumatera Utara	156/PW.09/IP/11/2025	14/11/2025	289/PW.08.02/IP/12/2025	29/12/2025
92	Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan pada Bawaslu Provinsi Riau	155/PW.08.02/IP/11/2025	13/11/2025	313/PW.08/IP/12/2025	30/12/2025
93	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/APIP pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	172/PW.09/IP/12/2025	05/12/2025	315/PW.08/IP/12/2025	30/12/2025
94	Pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Pengawasan Lainnya berupa Pendampingan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Bawaslu AT 2025 oleh BPK RI pada Bawaslu Provinsi Bali	173/PW.08/IP/12/2025	08/12/2025	318/PW.09/IP/12/2025	30/12/2025
95	Penyampaian Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Audit BPKP	30/PW.09/IP/02/2025	28/02/2025	B-17/PW.08.02/IU/06/2025	20/06/2025
96	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Atas Temuan Pemeriksaan Bpk Tahun 2025 Pada Bawaslu Kabupaten Bandung	66/PW.09/IU/06/2025	19/06/2025	118/PW.09/IP/07/2025	14/07/2025
97	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2024	26/PW.08.02/IP/02/2025	21/02/2025	023.A/PW.08.02/IP/03/2025	07/03/2025
98	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2024	27/PW.08.02/IP/02/2025	21/02/2025	023.A/PW.08.02/IP/03/2025	07/03/2025

Lampiran 6.

Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2024	42/PW.09/IP/04/2025	11/04/2025	051/PW.08.02/IP/04/2025	24/04/2025
100	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	174/PW.09/IU/11/2025	17/11/2025	262/PW.09/IP/12/2025	9/12/2025
101	BA Pemutakhiran TL BPK, BPKP, APIP Kalteng	29/PW.09/IP/02/2025	24/02/2025	135/PW.09/IU/08/2025	26/08/2025
102	Surat Keterangan Bebas Temuan Kabupaten Karawang	32/PW.09/IP/02/2025	28/02/2025	1/PW.08.02/IP/02/2025	27/02/2025
103	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Atas Temuan Pemeriksaan BPK, BPKP Dan APIP Pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	113/PW.08.02/IU/07/2025 112/PW.08.02/IU/07/2025	30/07/2025	207/PW.08.02/IP/10/2025	31/10/2025
104	Laporan Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Atas Temuan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Pada Pemeriksaan Terinci Pilkada 2024	169/PW.08.02/IU/11/2025	15/11/2025	240/PW.08.02/IP/11/2025	24/11/2025
105	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Atas Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2025 Pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat	67/PW.09/IU/06/2025	19/06/2025	117/PW.09/IP/07/2025	14/07/2025
106	Laporan Hasil Pendampingan Pemeriksaan Interim BPK Atas Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2025 Dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, APIP Pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat	184/PW.08.02/IU/QQ/2025	27/11/2025	275/PW.08.02/IP/12/2025	19/12/2025
107	Permintaan Konfirmasi Pembayaran	6/PW.08.02/IP/01/2025	07/01/2025	B-1/PW.08.02/IP/01/2025	07/01/2025
108	Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Triwulan II Tahun 2025	76/PW.03/IU/07/2025	04/07/2025	B-97/PW.03/IU/07/2025	24/07/2025
	Monitoring atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)				
109	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta	79/PW.09/IP/03/2025	17/03/2025	043/PW.09/03/2025	27/03/2025
110	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	64/PW.09/IP/03/2025	17/03/2025	042/PW.09/03/2025	27/03/2025
111	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Papua	83/PW.09/IP/03/2025	17/03/2025	041/PW.09/03/2025	27/03/2025
112	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta	77/PW.09/IP/03/2025	19/03/2025	045/PW.09/IP/4/2025	10/04/2025
113	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku	80/PW.09/IP/03/2025	21/03/2025	045.A/PW.09/IP/4/2025	10/04/2025
114	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada Panwaslih Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota se-Aceh	89/PW.09/IP/03/2025	25/03/2025	045.B/PW.09/IP/4/2025	10/04/2025
115	Monitoring atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	85/PW.08/IP/03/2025	24/03/2025	061/PW.02/IP/04/2025	30/04/2025
116	Monitoring atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	84/PW.08/IP/03/2025	24/03/2025	061/PW.02/IP/04/2025	30/04/2025
117	Monitoring atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	70/PW.09/IP/03/2025	17/03/2025	046.C/ PW.09/IP/04/2025	14 April 2025
118	Monitoring atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Bawaslu Provinsi Banten	65/PW.09/IP/03/2025	17/03/2025	046.B/ PW.09/IP/04/2025	14 April 2025
119	Monitoring atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung	66/PW.09/IP/03/2025	17/03/2025	046.E/ PW.09/IP/04/2025	14 April 2025
120	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	75/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	067/PW.08/IP/05/2025	30/04/2025
121	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan	169/PW.09/IP/07/2025 171/PW.09/IP/07/2025	16/07/2025	127/PW.08/IP/07/2025	29/07/2025
122	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e-SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	61/PW.08/IP/03/2025	17/03/2025	086/PW.08/IP/05/2025	22 Mei 2025
123	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e-SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	56/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	085/PW.02/IP/05/2025	21/5/2025
124	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e-SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	60/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	054/PW.08/IP/04/2025	28/04/2025
125	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e-SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Pusat Data dan Informasi Bawaslu	57/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	053/PW.08/IP/04/2025	28/04/2025
126	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat	53/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	084/PW.02/IP/05/2025	21/5/2025
127	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara	54/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	083/PW.02/IP/05/2025	21/5/2025
128	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se- Kalimantan Utara	55/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	082/PW.02/IP/05/2025	21/5/2025
129	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah	50/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	076/PW.08/IP/05/2025	16 Mei 2025
130	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se- Maluku Utara	51/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	087/PW.08/IP/05/2025	22 Mei 2025
131	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se- Maluku Utara	52/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	077/PW.08/IP/05/2025	16 Mei 2025
132	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se- Bengkulu	58/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	052/PW.08/IP/04/2025	28/04/2025

Lampiran 6.

Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
133	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	59/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	050/PW.08/IP/04/2025	23/04/2025
134	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se-Riau	35/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	046.A2/PW.08/IP.II/IV/2025	14/04/2025
135	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se- Sulawesi Selatan	36/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	021.A1PW.08/IP/03/2025	6 Maret 2025
136	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se-Bali	37/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	044.C2/PW.08/IP/04/2025	14 April 2025
137	Monitoring Pelaporan LHKAN (LHKPN dan e- SPT PPh Pasal 21) Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota se-Papua Tengah	38/PW.08/IP/03/2025	18/03/2025	046.A3/PW.08/IP.II/IV/2025	14/04/2025
138	Laporan Hasil Monitoring Pemutakhiran Data Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun Pelaporan 2024 Pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Mitra Kerja Inspektorat Wilayah III	106/PW.08/IU/07/2025	24/07/2025	131/PW.08/IP/07/2025	31/07/2025
G	**Pengawasan Lainnya**				
139	Pengawasan Lainnya dalam rangka Pembinaan Persiapan Pemeriksaan BPK atas LK Bawaslu TA 2024 pada Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, dan Bawaslu Kota Prabumulih	24/PW.09/IP/01/2025	24/01/2025	036/PW.09/IP/03/2025	20/03/2025
140	Pengawasan Lainnya dalam rangka Pendampingan Pemeriksaan BPK atas LK Bawaslu TA 2024 pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	27/PW.09/IP/01/2025	30/01/2024	028/PW.09/IP/3/2025	12 Maret 2025
141	Pengawasan Lainnya dalam rangka Penyusunan Laporan BMN UAPPB-W Tahun Anggaran 2024 Unaudited	32/PW.09/IP/02/2025	10/02/2025	015/PW.09/IP/02/2025	14/02/2025
142	Telaah Atas Pengajuan Penambahan Anggaran pada Unit Kerja Puslitbangdiklat Bawaslu Tahun 2025	50/PW.09/IP/03/2025	10/03/2025	030/PW.09/IP/3/2025	12/03/2025
143	Pengawasan Lainnya dalam rangka narasumber kegiatan penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban dana hibah dan penyesuian revisi anggaran dana hibah pemilihan serentak Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan	51/PW.09/IP/03/2025	10/03/2025	033.B/PW.02/IP/3/2025	17/03/2025
144	Telaah atas Barang Milik Negara (BMN) Hilang pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	52/PW.02/IP/03/2025	11/03/2025	34/PW.09/IP/05/2025	06/05/2025
145	Telaah atas Permohonan Klarifikasi LSM	126/PW.09/IP/06/2025	13/06/2025	117/PW.09/IU/06/2025	13/06/2025
146	Pengawasan lainnya dalam rangka Pembinaan Persiapan Pemeriksaan BPK atas LK Bawaslu TA 2024 pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	16/PW.09/IP/01/2025	17/01/2025	026/PW.09/IP/03/2025	10/03/2025
147	Pembinaan Persiapan Pemeriksaan BPK atas LK Bawaslu TA 2024 pada Bawaslu Kota Palembang, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	23/PW.09/IP/01/2025	22/01/2025	283/PW.09/IP/12/2025	24 Desember 2025
148	Telaah atas Permohonan Tambahan Anggaran Fasilitasi PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	55/PW.09/IP/03/2025	13/03/2025	45/PW.09/IU/03/2025	20/03/2025
149	Telaah atas Usulan Komponen dalam Pagu Anggaran Hibah PSU di Kabupaten Serang pada Bawaslu Provinsi Banten	56/PW.09/IP/03/2025	13/03/2025	48/PW.09/IU/03/2025	21/03/2025
150	Kajian atas Usulan Permohonan Penerimaan Hibah Non Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	98/PW.09/IP/04/2025	14/04/2025	67/PW.09/IU/04/2025	25/04/2025
151	Kajian atas Status Kepegawaian atau Tindakan Administratif Lainnya Pegawai a.n. Bahdozen Hanan	81/PW.09/IP/03/2025	21/03/2025	089.A/PW.09/IP/05/2025	28/05/2025
152	Telaah atas Barang Milik Negara (BMN) Hilang pada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	122/PW.09/IP/06/2025	15/06/2025	120/PW.05/IU/06/2025	18/06/2025
153	Telaah BMN Hilang pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu	128/PW.09/IP/06/2025	18/06/2025	103/PW.09/IP/07/2025	01/07/2025
154	Telaah atas Pelaporan Organisasi Masyarakat Laskar Lampung Indonesia pada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	133/PW.09/IP/06/2025	25/05/2025	131/PW.04/IU/06/2025	30/06/2025
155	Telaah atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	143/PW.09/IP/07/2025	10/07/2025	178/PW.09/IU/08/2025	07/08/2025
156	Telaah Perihal BMN Hilang pada Bawaslu Provinsi Banten	149/PW.09/IP/07/2025	11/07/2025	151/PW.09/IU/07/2025	11/07/2025
157	Telaah atas Permohonan Penerbitan Surat Bebas Temuan PNS a.n. Mutia Utami	186/PW.09/IP/07/2025	23/07/2025	4/PW.09/IU/07/2025	25/07/2025
158	Telaah atas Usulan Perubahan KPA Bawaslu Provinsi Lampung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	196/PW.09/IP/08/2025	06/07/2025	188/PW.09/IU/08/2025	27/08/2025
159	Telaah atas Pengusulan Jabatan Pengawas pada 4 (empat) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	211/PW.09/IP/09/2025	01/09/2025	76/PW.09/IP/09/2025	10/09/2025
160	Telaah atas Konsultansi Bawaslu Provinsi terkait Gaji dan Tunjangan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	236/PW.09/IP/09/2025	16/09/2025	202/PW.09/IU/09/2025	19/09/2025
161	Telaah atas Laporan Terhadap Kehilangan Barang Pinjam Pakai pada Bawaslu Kota Metro	238/PW.09/IP/09/2025	18/09/2025	B-121/PW.09/IU/09/2025	23/09/2025
162	Pendampingan dalam Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 periode Tahun 2024 s.d. Semester I Tahun 2025 oleh BPK RI pada Bawaslu Provinsi Banten	215/PW.01/IP/09/2025	05/09/2025	206/PW.09/IP/10/2025	31/10/2025
163	Telaah atas Permohonan Penerbitan Surat Bebas Temuan PNS a.n. Tabrani, S.H. (Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan)	298/PW.09/IP/11/2025	03/11/25	225/PW.09/IP/11/2025	13/11/2025
164	Telaah atas permohonan klarifikasi dan konfirmasi status kepegawaian PPPK Bawaslu Kota Serang	287/PW.09/IP/11/2025	07/11/2025	102/PW.03/IP/12/2025	15/12/2025
165	Pengawasan Lainnya dalam Pendampingan Pemanggilan Klarifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bawaslu Provinsi DKI	322/PW.09/IP/12/2025 330/PW.09/IP/12/2025	08/12/2025	103/PW.09/IP/12/2025	16/12/2025

Lampiran 6.

Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
166	Pendampingan dalam Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024	248/PW.09/IP/09/2025	30/09/2025	246.A/PW.09/IP/11/2025	29/11/2025
167	Pengawasan Lainnya dalam rangka Telaah dan Inventarisir Masalah atas Permasalahan APH pada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	328/PW.09/IP/12/2025 329/PW.09/IP/12/2025	04/12/2025	285/PW.09/IP/12/2025	23/12/2025
168	Pengawasan lainnya atas Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	2/PW.09/IP/01/2025	15/01/2025	019.C/PW.09/IP/03/2025	3/2/2025
169	Pengawasan lainnya atas Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban APBN Pemilihan Tahun 2024 pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	5/PW.09/IP/01/2025	15/01/2025	017.B/PW.02/IP/02/2025	28/2/2025
170	Pengawasan lainnya atas Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban APBN dan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Magelang	3/PW.09/IP/01/2025	15/01/2025	017/PW.09/IP/02/2025	28/02/2025
171	Pengawasan lainnya atas Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban APBN dan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Semarang	4/PW.09/IP/01/2025	15/01/2025	021.B/PW.02/IP/03/2025	6/3/2025
172	Penelaahan Informasi Awal atas Aduan Pelaksanaan Kegiatan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024	8/PW.09/IP/01/2025	30/01/2025	38/PW.09/IP/06/2025	30/6/2025
173	Penelaahan atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 010/PL.03.02/K.SU-04/02/2025 tanggal 17 Februari 2025	41/PW.09/IP/03/2025	04/03/2025	46/PW.09/IU/03/2025	20/03/2025
174	Penelaahan atas Keterlambatan Pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan se-Kota Sibolga	72/PW.09/IP/05/2025	06/05/2025	53/PW.09/IU/03/2025	26/3/2025
175	Telaah atas Tagihan Sewa Transportasi Logistik pada Bawaslu Kabupaten Mimika	36/PW.05/IP/03/2025	21/02/2025	34/PW.07/IU/03/2025	11/03/2025
176	Pembahasan atas Perjanjian Sewa Kendaraan pada Bawaslu Provinsi Bali	43/PW.09/IP/03/2025	21/02/2025	51/PW.09/IU/03/2025	28/02/2025
177	Reviu Kinerja dan Pertanggungjawaban dana pengawasan PSU pada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan terdampak Putusan MK Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025	64/PW.02/IP/04/2025	10/04/2025	121.A/PW.09/IP/7/2025	16/07/2025
178	Reviu Kinerja dan Pertanggungjawaban dana pengawasan PSU pada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terdampak Putusan MK Nomor 75/PHPU.BUPXXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025	63/PW.02/IP/04/2025	08/04/2025	126/PW.09/IP/07/2025	25/07/2025
179	Penelaahan atas Pelaksanaan Pemungutan Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dan Pulau Taliabu	74/PW.09/IP/05/2025	11/05/2025	1. 103/PW.09/IU/05/2025 2. 104/PW.09/IU/05/2025	23/05/2025
180	Penelaahan atas Pelaksanaan Pemungutan Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong	77/PW.02/IP/05/2025	02/05/2025	1. 23/PW.09/IP/05/2025 2. 106/PW.09/IU/05/2025	24/05/2025
181	Penyusunan Telaah atas Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bengkulu Selatan terdampak Putusan MK Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025	76/PW.09/IP/05/2025	05/05/2025	96/PW.09/IU/05/2025	20/05/2025
182	Reviu Kinerja dan Pertanggungjawaban dana pengawasan PSU pada Bawaslu Kota Palopo terdampak Putusan MK Nomor 168/PHPU.AKO-XXIII/2025 tanggal 19 Februari 2025 dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	89/PW.02/IP/05/2025	19/05/2025	103.B/PW.08.02/IP/07/2024	01/06/2025
183	Telaah atas Permohonan Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Belanja Operasional pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	70/PW.09/IP/04/2025	30/04/2025	17/PW.09/IP/04/2025	28/04/2025
184	Konsultasi dengan BPKP terkait Permasalahan Klaim dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan satuan kerja Bawaslu	75/PW.05/IP/05/2025	14/05/2025	84/PW.02/IU/05/2025	07/05/2025
185	Reviu Pendahuluan dan Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Kirab Pilkada Damai, Sosialisasi Pilkada Bersama Komunitas, dan Deklarasi Pilkada Damai Di Provinsi Papua Tengah	50/PW.02/IU/06/2025	02/06/2025	118/PW.02/IU/06/2025	16/06/2025
186	Telaah atas Pemanggilan Kejaksaan Negeri Pontianak terhadap Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kota Pontianak terkait Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pontianak yang Dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024	94/PW/IP/07/2025	07/07/2025	314/PW.09/IP/12/2025	30/12/2025
187	Telaah Awal atas Aduan Penggunaan Dana Hibah pada Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	91/PW.09/IP/07/2025	08/07/2025	65/PW.09/IP/09/2025	09/09/2025
188	Telaah Staf atas Kasus Tindak Pidana Korupsi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	97/PW.09/IP/07/2025	09/07/2025	48/PW.09/IP/07/2025	22/07/2025
189	Telaah atas Kasus yang terjadi di Bawaslu Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara	92/PW.09/IP/07/2025	10/07/2025	263/PW.09/IU/12/2025	8/12/2025
190	Penyusunan Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Inspektorat Utama	138/PW.09/IP/10/2025	03/10/2025	237/PW.09/IU/11/2025	08/11/2025
191	Pengawasan lainnya berupa pendampingan dalam inventarisasi kelengkapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan walikota dan wakil walikota Pontianak tahun 2024	162/PW.09/IP/11/2025	19/11/2025	314/PW.09/IP/12/2025	30/12/2025
192	Pengawasan lainnya berupa pembinaan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah pemilihan walikota dan wakil walikota Padangsidimpian tahun 2024	157/PW.09/IP/11/2025	16/11/2025	290/PW.09/IP/12/2025	29/12/2025
193	Penelaahan atas kasus yang terjadi di Bawaslu Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara	165/PW.09/IP/11/2025	27/11/2025	104/PW.09/IP/12/2025	30/12/2025
194	Pengawasan lainnya berupa pendampingan dalam inventarisasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024	159/PW.09/IP/11/2025	16/11/2025	312/PW.09/IP/12/2025	30/12/2025

Lampiran 6.

Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
195	Telaah atas Surat Somasi/Teguran Keras terkait Perjanjian Sewa Kendaraan yang disampaikan oleh PT Mitra Pinassthika Mustika (MPM) Rent kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	176/PW.09/IP/12/2025	10/12/2025	102/PW.09/IP/12/2025	29/12/2025
196	Telaah atas Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 periode Tahun 2024 s. d. Semester I Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Kabupaten Mimika, Bawaslu Kabupaten Puncak dan Instansi terkait Lainnya oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah	245/PW.09/IP/11/2025	29/11/2025	245/PW.09/IP/11/2025	29/11/2025
197	Pengawasan Lainnya berupa Pendampingan atas Pemeriksaan BPK pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	171/PW.09/IP/12/2025	05/12/2025	316/PW.09/IP/12/2025	30/12/2025
198	Telaah terkait Pengaduan Masyarakat atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah	175/PW.09/IP/12/2025	10/12/2025	99/PW.09/IP/12/2025	11/12/2025
199	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah	177/PW.08.02/IP/12/2025	11/12/2025	311/PW.08/IP/12/2025	30/12/2025
200	Pemeriksaan Disiplin atas Aduan Masyarakat pada Bawaslu Provinsi Papua Tengah	1118/PW.09/SJ/12/2025	15/12/2025	Tidak ada nomor	
201	Laporan Hasil Pendahuluan Pengawasan Dana Hibah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	14/PW.09/IP/02/2025	01/02/2025	019.D/PW.09/IP/03/2025	04/03/2025
202	Paparan Materi Sidang	27/PW.09/IU/02/2025	20/02/2025	Tidak ada nomor	
203	Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur	38/PW.08/IP/03/2025	20/03/2025	037/PW.03/IP/03/2025	25/03/2025
204	*Opname Cash*	37/PW.09/IP/03/2025 45/PW.09/IP/04/2025	25/04/2025	Tidak ada nomor	
205	Laporan Pengawasan Lainnya dalam rangka Pengolahan Data Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Layanan Pengawasan Intern Inspektorat Wilayah III Semester I Tahun 2025	99/PW.09/IU/07/2025 98/PW.09/IU/07/2025	11/07/2025	125/PW.09/IP/07/2025	24/07/2025
206	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 Dan Persiapan Pelaksanaan SPI Tahun 2025 Termasuk Pemantauan Progres Rencana Aksi Pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	46/PW.09/IU/05/2025	02/05/2025	092/PW.09/IU/06/2025	11/06/2025
207	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Dalam Rangka Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bawaslu Provinsi Jambi	73/PW.09/IP/11/2025	07/11/2025	264/PW.09/IP/12/2025	09/12/2025
208	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Telaah Disposisi Terhadap Surat Laporan dan Permohonan Izin Konsultasi Terkait Proses Penanganan Pelanggaran Kinerja Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	31/PW.09/IP/02/2025	24/02/2025	54/PW.09/IU/03/2025	13/04/2025
209	Nota Dinas Penyampaian Hasil Telaah Disposisi Terhadap Surat Pengaduan Eks Panwaslu Kecamatan Tanah Siang dan	24/PW.09/IP/02/2025	06/02/2025	7/PW.09/IP/02/2025	10/2/2025
210	Telaah Disposisi Terhadap Surat Pengaduan Eks Panwaslu Kecamatan Tanah Siang dan Murung atas Permohonan Pengembalian Dana Perjalanan Dinas pada Bawaslu Kabupaten Murung Raya	39/PW.09/IP/03/2025	22/03/2025	56/PW.09/IU/03/2025	27/03/2025
211	Telaah Disposisi Terhadap Surat Penyampaian Laporan Kondisi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (C)	43/PW.09/IP/04/2025	25/03/2025	86/PW.09/IU/05/2025	08/05/2025
212	Dugaan Perselingkuhan Bawaslu Kabupaten Pohuwato	74/PW.09/IU/07/2025	03/07/2025	39/PW.09/IP/07/2025	05/07/2025
213	Kalteng-Optimalisasi Anggaran	136/PW.09/IU/09/2025	23/09/2025	60/PW.09/IP/09/2025	24/09/2025
214	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Dalam Rangka Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bawaslu Provinsi Jambi (2)	73/PW.09/IP/11/2025	07/11/2025	264/PW.09/IP/12/2025	09/12/2025
	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Ittama				
215	Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2024	8/PW.09/IU/01/2025	15/01/2025	011.B/PW.09/IU/02/2025	3/2/2025
216	Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama Semester I Tahun 2025	105/PW.09/IU/07/2025	21/07/2025	132/PW.09/IU/07/2025	31/07/2025
	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Itwil				
217	Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Wilayah I Periode Semester II Tahun 2024	4/PW.07/IP/01/2025	08/01/2025	008.A/PW.09/IP/01/2025	30/01/2025
218	Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Wilayah I Semester I Tahun 2025	147/PW.09/IP/07/2025	11/07/2025	125.A/PW.09/IP/7/2025	24/07/2025
219	Melaksanakan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Wilayah II Tahun 2024	1/PW.07/IU/01/2025	03/01/2025	008.B/PW.07/IP/01/2025	30/01/2025
220	Melaksanakan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Wilayah II Semester I Tahun 2025 selama 9 (sembilan) hari kerja terhitung dari 01 s.d. 11 Juli 2025;	90/PW.09/IP/07/2025	01/07/2025	127.A/PW.09/IU/07/2025	29/07/2025
221	Laporan Kegiatan Pengawasan Semester II Tahun 2024 Inspektorat Wilayah III Badan Pengawas Pemilihan Umum	2/PW.09/IP/01/2025	06/01/2025	014.B/PW.09/IP/02/2025	03/02/2025
222	Laporan Kegiatan Pengawasan Semester I Tahun 2024 Inspektorat Wilayah III Badan Pengawas Pemilihan Umum	2/PW.09/IP/01/2025	07/07/2026	2/PW.09/IP/01/2025	21/07/2025
	Penyusunan LKjIP Itwil				
223	Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah 1 Tahun 2024	2/PW.09/IP/01/2025	02/01/2025	012/PW.07/IP/02/2025	04/02/2025
224	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Inspektorat Wilayah II	6/PW.09/IP/01/2025	02/01/2025	016.A/PW.09/IP/02/2025	24/2/2025
225	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Wilayah III	6/PW.09/IP/01/2025	06/01/2025	010.A/PW.09/IP/01/2025	31/01/2025

Lampiran 6.

Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyusunan LKjIP Inspektorat Utama				
226	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Inspektorat Utama	11/PW.09/IU/01/2025	02/01/2025	011.A/PW.07/IU/02/2025	3/2/2025
	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern				
227	Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Bawaslu	6/PW.00/IU/01/2025	06/01/2025	30/PW.09/K1/02/2025	19/02/2025
	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan				
228	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Wilayah III	5/PW.00/IU/01/2025	06/02/2025	Tidak ada nomor	
	Penyusunan Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko				
229	Sosialisasi Manajemen Risiko dan Pendampingan Penyusunan Register Risiko pada Bawaslu Kabupaten Pringsewu	296/PW.09/IP/11/2025 297/PW.09/IP/11/2025	13/11/2025	265/PW.09/IP/12/2025	10/12/2025
230	Pernyataan Komitmen-RR-RPR	Tidak ada nomor		Tidak ada nomor	
	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP				
231	Penyusunan dan Pemantauan Rencana Aksi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Bawaslu Semester I Tahun 2025 sebagai data dukung Framework Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	71/PW.09/IU/06/2025	02/06/2025	B-1339/PW.09/SJ/06/2025	12/06/2025
232	Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Bawaslu Tahun 2025	114/PW.09/IU/08/2025	04/08/2025	B-377/PW.09/K1/08/2025	26/08/2025
233	Penyampaian Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Utama Bawaslu beserta Hasil Monitoring Rencana Aksi Semester I Tahun 2025	71/PW.09/IU/06/2025	02/06/2025	B-1339/PW.09/SJ/06/2025	12/06/2025
234	Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025	114/PW.09/IU/08/2025	04/08/2025	B-377/PW.09/K1/08/2025	26/08/2025
	Pemantauan progress Stranas PK				
235	Telaah atas Permintaan Data Kejaksaaan Negeri Timor Tengah Utara terkait Pengelolaan Dana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Dana Pemilu Legislatif Tahun 2023 s.d. 2024 pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara	58/PW.09/IP/03/2025	17/03/2025	046/PW.09/IP/04/2025	14/04/2025
236	Telaah perihal Permohonan Izin Pemberian Dokumen Pertanggungjawaban kepada Polresta Bandar Lampung pada Bawaslu Provinsi Lampung	53/PW.09/IP/03/2025	10/03/2025	43/PW.09/IU/03/2025	12/03/2025
237	Telaah atas Surat Permohonan Arahan dan Tindak Lanjut perihal permintaan data oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	172/PW.09/IP/07/2025 173/PW.09/IP/07/2025	18/07/2025	145/PW.04/IU/08/2025	05/08/2025
238	Telaah dan Koordinasi dengan Panwaslih Kota Banda Aceh dan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam rangka permintaan keterangan ahli oleh Kepolisian Resor Kota Banda	182/PW.03/IU/11/2025	25/11/2025	259/PW.03/IU/12/2025	02/12/2025
239	Penyusunan dan Pemantauan Rencana Aksi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Bawaslu Semester I Tahun 2025 sebagai data dukung Framework Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	71/PW.09/IU/06/2025	02/06/2025	B-1339/PW.09/SJ/06/2025	12/06/2025
240	Provinsi Jambi - TL Aduan	73/PW.09/IP/11/2025	07/11/2025	263/PW.09/IP/12/2025	09/12/2025
241	Inspektorat Utama - Penyusunan SOP	125/PW.00/IU/08/2025	27/08/2025	1/PW.09/SJ/09/2025 3/PW.09/SJ/09/2025 2/PW.09/SJ/09/2025 4/PW.09/SJ/09/2025 5/PW.09/SJ/09/2025 6/PW.09/SJ/09/2025 7/PW.09/SJ/09/2025	30/09/2025
242	Inspektorat Utama - Penyusunan Pedoman AKBR	126/PW.00/IU/08/2025	27/08/2025	16468.1 TAHUN 2025	07/11/2025
243	Kota Cirebon - MR	689/PW.09/SJ/09/2025	12/09/2025	233/PW.09/IP/11/2025	18/11/2025
244	Kabupaten Cirebon - MR	699/PW.09/SJ/09/2025	12/09/2025	232/PW.09/IP/11/2025	18/11/2025
245	Kabupaten Garut - MR	675/PW.09/SJ/09/2025	12/09/2025	218/PW.09/IP/11/2025	07/11/2025
246	Kabupaten Tasikmalaya - MR	676/PW.09/SJ/09/2025	12/09/2025	235/PW.09/IP/11/2025	24/11/2025
247	Kabupaten Sumedang - MR	674/PW.09/SJ/09/2025	12/09/2025	237/PW.09/IP/11/2025	24/11/2025
	Telaah Sejawat				
248	Telaah Sejawat Internal di Inspektorat Wilayah II Bawaslu Tahun 2025	289/PW.09/IP/11/2025	10/11/2025	284/PW.03/IP/12/2025	23/12/2025
249	Telaah Sejawat Internal di lingkungan Inspektorat Utama Bawaslu pada Inspektorat Wilayah III	289/PW.09/IP/11/2025	10/11/2025	310/PW.09/IP/12/2025	30/12/.2025
250	Laporan Hasil Telaah Sejawat Pada Inspektorat Wilayah I	179/PW.09/IU/11/2025	20/10/2025	296/PW.09/IP/12/2025	29/12/2025
	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko				
251	Monitoring dan Evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	65/PW.08/IP/04/2025	21/04/2025	108/PW.08/IP/7/2025	07/07/2025
252	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko pada Bawaslu Kota Magelang	146/PW.08/IP/10/2025	15/10/2025	241/PW.08/IP/11/2025	24/10/2025
	Monitoring SP4N Lapor				
253	Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR! Periode Triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun 2025 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	39/PW.09/IU/03/2025	24/03/2025	49/PW.09/IU/03/2025	24/03/3035
254	Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR Periode Triwulan II (April s.d Juni) Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	52/PW.09/IU/06/2025	03/06/2025	B-1326/PW.09/SJ/06/2025	10/06/2025

Lampiran 6.

Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Internal tahun 2025

No.	Objek Pemeriksaan	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Nomor *Output*	Tanggal *Output*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
255	Pengawasan Lainnya dalam Rangka Monitoring Tindak Lanjut Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 1 Januari s.d. Triwulan III Tahun 2025	132/PW.08/IU/09/2025	11/9/2025	B-1935/PW.08/SJ/09/2025	24/09/2025
256	Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR! Periode Triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun 2025 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	39/PW.09/IU/03/2025	24/03/2025	49/PW.09/IU/03/2025	24/03/3035
257	Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR Periode Triwulan II (April s.d Juni) Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	52/PW.09/IU/06/2025	03/06/2025	B-1326/PW.09/SJ/06/2025	10/06/2025
	Evaluasi Lainnya				
258	Laporan Hasil Evaluasi atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 279/PW/K1/08/2022 tentang Standardisasi Kendali Mutu Layanan Pengawasan Intern	125/PW.00/IU/08/2025	27/08/2025	274/PW.03/IP/12/2025	18/12/2025
	Pembinaan Penguatan Survey E-SPI				
259	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 pada Unit Mitra Kerja Inspektorat Wilayah I	317/PW.09/IP/11/2025	03/11/2025	244.A/PW.09/IP/11/2025	28/11/2025
260	Pengawasan Lainnya dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dan Persiapan Pelaksanaan SPI Tahun 2025 termasuk Pemantauan Progress Rencana Aksi pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	46/PW.09/IU/05/2025	02/05/2025	092/PW.09/IU/06/2025	11/06/2025
	NON PKPT				
261	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit pada Bawaslu Kota Cilegon	339/PW.08.02/IP/12/2025	18/12/2025	304/PW.08.02/IP/12/2025	30/12/2025
262	Asistensi Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Bawaslu Kota Tangerang	270/PW.05/IP/10/2025	27/10/2025	303/PW.05/IP/12/2025	30/12/2025
263	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Bawaslu Provinsi Banten	340/PW.08.02/IP/12/2025	19/12/2025	292/PW.08.02/IP/12/2025	29/12/2025
264	Asistensi Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	231/PW.05/IP/09/2025	11/09/2025	302/PW.05/IP/12/2025	30/12/2025
265	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK atas Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024 s.d Semester I Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	342/PW.08.02/IP/12/2025	19/12/2025	295/PW.08.02/IP/12/2025	29/12/2025
266	Telaah atas Laporan Pengaduan pada Bawaslu Kabupaten Buru Melalui Aplikasi SP4N Lapor	237/PW.09/IP/09/2025	17/09/2025	323/PW.09/IP/12/2025	31/12/2025
267	Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat pada Bawaslu Kabupaten Bogor	182/PW.08/IP/12/2025	23/12/2025	327/PW.08/IP/12/2025	31/12/2025
268	Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat pada Bawaslu Kabupaten Bogor	209/PW.09/IU/12/2025	22/12/2025	299/PW.08.02/IP/12/2025	29/12/2025
269	Pengawasan Lainnya - Tematik-Sumatera Barat - Penanganan Pelanggaran Kinerja	151/PW.09/IU/10/2025	16/10/2025	70/PW.09/IP/10/2025	27/10/2025

Lampiran 7.

Hasil Evaluasi AKIP Internal pada Unit Kerja Bawaslu tahun 2024 dan tahun 2025

No	Unit Kerja Bawaslu	Nilai AKIP 2024	Predikat	Nilai AKIP 2025	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Inspektorat Utama	82,3	A (Memuaskan)	85,3	A (Memuaskan)
2	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	83,4	A (Memuaskan)	83,55	A (Memuaskan)
3	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	83,1	A (Memuaskan)	83,25	A (Memuaskan)
4	Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83,05	A (Memuaskan)	82,75	A (Memuaskan)
5	Bawaslu Provinsi D.I Yogyakarta	81,45	A (Memuaskan)	81,6	A (Memuaskan)
6	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	80,5	A (Memuaskan)	80,00	BB (Sangat Baik)
7	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	80	BB (Sangat Baik)	79,7	BB (Sangat Baik)
8	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	81,25	A (Memuaskan)	78,75	BB (Sangat Baik)
9	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	68	B (Baik)	77,5	BB (Sangat Baik)
10	Bawaslu Provinsi Jambi	79,25	BB (Sangat Baik)	76,85	BB (Sangat Baik)
11	Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	79,7	BB (Sangat Baik)	75,6	BB (Sangat Baik)
12	Bawaslu Provinsi Lampung	81,1	A (Memuaskan)	75,05	BB (Sangat Baik)
13	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	77,3	BB (Sangat Baik)	74,85	BB (Sangat Baik)
14	Bawaslu Provinsi Gorontalo	80	BB (Sangat Baik)	74,55	BB (Sangat Baik)
15	Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	81,1	A (Memuaskan)	74,55	BB (Sangat Baik)
16	Bawaslu Provinsi Aceh	79,35	BB (Sangat Baik)	73,8	BB (Sangat Baik)
17	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	78,45	BB (Sangat Baik)	71,85	BB (Sangat Baik)
18	Bawaslu Provinsi Banten	73,75	BB (Sangat Baik)	71,45	BB (Sangat Baik)
19	Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	71,3	BB (Sangat Baik)	71,35	BB (Sangat Baik)
20	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	79,71	BB (Sangat Baik)	71,3	BB (Sangat Baik)
21	Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	77,5	BB (Sangat Baik)	70,85	BB (Sangat Baik)
22	Bawaslu Provinsi Bali	71,5	BB (Sangat Baik)	70,7	BB (Sangat Baik)
23	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	71,65	BB (Sangat Baik)	70,6	BB (Sangat Baik)
24	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	76,35	BB (Sangat Baik)	70,4	BB (Sangat Baik)
25	Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	71,35	BB (Sangat Baik)	70,35	BB (Sangat Baik)
26	Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	80,05	A (Memuaskan)	70,15	BB (Sangat Baik)
27	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	70,7	BB (Sangat Baik)	68,5	B (Baik)
28	Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	73,2	BB (Sangat Baik)	68,25	B (Baik)
29	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	67,76	B (Baik)	67,95	B (Baik)
30	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	73,35	BB (Sangat Baik)	67,5	B (Baik)
31	Bawaslu Provinsi Maluku	77,55	BB (Sangat Baik)	66,5	B (Baik)
32	Bawaslu Provinsi Papua Barat	62,05	B (Baik)	63,75	B (Baik)
33	Kedeputian Bidang Dukungan Teknis	52,7	CC (Cukup)	63,2	B (Baik)
34	Bawaslu Provinsi Bengkulu	73,15	BB (Sangat Baik)	61,8	B (Baik)
35	Bawaslu Provinsi Riau	70,35	BB (Sangat Baik)	61	B (Baik)
36	Bawaslu Provinsi Papua Tengah	N/A	-	40,8	C (Kurang)
37	Provinsi Papua				
38	Provinsi Papua Selatan				
39	Provinsi Papua Barat Daya				
40	Kedeputian Bidang Administrasi				
41	Provinsi Papua Pegunungan				

Lampiran 8.

Daftar 235 Unit Kerja Sampel Penilaian Survei e-SPI KPK Tahun 2025

No	Unit Kerja
(1)	(2)
1	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
3	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
4	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
5	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
6	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
7	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
8	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
9	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
10	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
11	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
12	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
13	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
14	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
15	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
16	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG KIDUL
17	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
18	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
19	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
20	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
21	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
22	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
23	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
24	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
25	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
26	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
27	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
28	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
29	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJAB BARAT
30	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJAB TIMUR
31	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
32	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
33	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
34	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
35	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
36	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
37	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
38	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
39	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
40	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
41	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
42	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Lampiran 8.

Daftar 235 Unit Kerja Sampel Penilaian Survei e-SPI KPK Tahun 2025

No	Unit Kerja
(1)	(2)
43	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
44	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
45	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
46	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
47	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
48	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
49	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
50	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
51	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
52	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
53	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
54	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
55	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
56	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
57	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
58	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
59	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
60	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
61	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO
62	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
63	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
64	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
65	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
66	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
67	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
68	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
69	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
70	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
71	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
72	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
73	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
74	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
75	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
76	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
77	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
78	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
79	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
80	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
81	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
82	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
83	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
84	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Lampiran 8.

Daftar 235 Unit Kerja Sampel Penilaian Survei e-SPI KPK Tahun 2025

No	Unit Kerja
(1)	(2)
85	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
86	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
87	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
88	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
89	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
90	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
91	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
92	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
93	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
94	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
95	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
96	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
97	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
98	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
99	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ANAMBAS
100	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
101	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
102	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
103	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
104	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
105	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
106	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
107	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
108	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
109	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU
110	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
111	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
112	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
113	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
114	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
116	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
117	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
118	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
119	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
120	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
121	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
122	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
123	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
124	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
125	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
126	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Lampiran 8.

Daftar 235 Unit Kerja Sampel Penilaian Survei e-SPI KPK Tahun 2025

No	Unit Kerja
(1)	(2)
127	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
128	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
129	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
130	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
131	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM
132	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
133	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN
134	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
135	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
136	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
137	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
138	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
139	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA
140	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
141	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
142	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO
143	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
144	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI
145	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI
146	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA
147	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
148	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
149	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
150	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
151	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
152	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
153	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
154	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
155	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
156	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
157	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
158	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
159	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
160	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
161	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
162	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
163	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
164	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
165	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
166	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
167	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI-TOLI
168	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Lampiran 8.

Daftar 235 Unit Kerja Sampel Penilaian Survei e-SPI KPK Tahun 2025

No	Unit Kerja
(1)	(2)
169	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
170	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
171	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
172	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
173	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
174	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAU-BAU
175	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
176	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
177	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
178	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
179	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
180	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
181	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
182	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
183	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
184	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
185	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
186	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
187	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
188	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
189	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
190	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
191	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
192	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
193	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
194	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
195	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
196	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
197	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
198	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
199	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM
200	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
201	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
202	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
203	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
204	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
205	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
206	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
207	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
208	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
209	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
210	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

Lampiran 8.

Daftar 235 Unit Kerja Sampel Penilaian Survei e-SPI KPK Tahun 2025

No	Unit Kerja
(1)	(2)
211	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR
212	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDIMPUAN
213	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
214	INSPEKTORAT WILAYAH I
215	INSPEKTORAT WILAYAH II
216	INSPEKTORAT WILAYAH III
217	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
218	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
219	BIRO FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
220	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ACEH
221	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT
222	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL
223	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG
224	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGAH
225	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGGARA
226	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA
227	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH
228	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES
229	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
230	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE
231	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE
232	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH
233	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE
234	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG
235	PUSAT DATA DAN INFORMASI

Lampiran 9.

Indeks Integritas Internal dan Eksternal serta Tingkat Perolehan Pengisian Survei pada Unit Kerja Bawaslu

No	Unit Kerja	Indeks Integritas 2024		Indeks Integritas 2025	
		Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jawa Tengah	78,70	90,80	82,50	91,00
2	Sumatera Utara	77,20	66,20	80,16	81,10
3	Riau	75,40	N/A*	81,24	89,84
4	Jawa Barat	75,30	97,20	81,27	90,78
5	Lampung	75,30	83,00	83,82	92,53
6	D.I.Yogyakarta	75,00	94,20	85,06	90,57
7	Inspektorat Utama	74,90	N/A*	82,08	N/A*
8	Sulawesi Selatan	74,90	90,90	82,06	85,24
9	Aceh	73,90	74,10	84,45	94,86
10	Kalimantan Selatan	73,60	88,70	80,34	92,35
11	Papua Barat	73,30	N/A*	78,75	N/A*
12	Jambi	73,20	N/A*	77,52	70,35
13	Nusa Tenggara Timur	73,00	85,90	80,09	83,44
14	Sulawesi Tenggara	72,20	93,10	81,27	92,94
15	Pusat Data dan Informasi	71,70	91,50	76,42	N/A*
16	Kalimantan Tengah	71,20	91,70	78,85	88,87
17	Jawa Timur	70,80	N/A*	82,55	90,71
18	Banten	70,60	N/A*	81,27	92,33
19	Sumatera Selatan	70,40	88,00	81,72	N/A*
20	Kepulauan Bangka Belitung	70,00	92,90	N/A*	N/A*
21	Maluku	69,60	79,60	78,74	92,26
22	Kalimantan Timur	69,40	N/A*	82,21	92,22
23	Kedeputian Bidang Administrasi	69,30	N/A*	76,76	92,56
24	Sulawesi Barat	69,00	85,60	N/A*	N/A*
25	Kalimantan Barat	69,00	88,80	83,78	89,75
26	Bali	68,60	85,20	85,19	90,33
27	Sulawesi Tengah	68,40	N/A*	81,50	87,93
28	Nusa Tenggara Barat	68,00	95,60	79,26	97,03
29	Bengkulu	67,90	N/A*	80,95	84,13
30	Maluku Utara	67,40	N/A*	83,66	95,36
31	Gorontalo	67,20	67,10	86,30	91,17
32	Sulawesi Utara	67,00	N/A*	82,58	72,86
33	Sumatera Barat	66,90	N/A*	77,76	81,30
34	Kalimantan Utara	66,10	82,30	77,73	N/A*
35	Kepulauan Riau	64,90	77,30	79,68	90,70
36	Kedeputian Bidang Dukungan Teknis	64,70	N/A*	78,45	N/A*
37	DKI Jakarta	62,50	83,80	79,08	86,50
38	Papua Pegunungan	60,80	N/A*	83,87	N/A*
39	Papua	60,30	N/A*	80,71	N/A*
40	Papua Barat Daya	58,60	N/A*	77,84	N/A*
41	Papua Tengah	53,00	N/A*	70,95	77,42

Lampiran 9.

Indeks Integritas Internal dan Eksternal serta Tingkat Perolehan Pengisian Survei pada Unit Kerja Bawaslu

No	Unit Kerja	Indeks Integritas 2024		Indeks Integritas 2025	
		Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Papua Selatan	49,80	N/A*	90,90	N/A*

**N/A = indeks integritas tidak muncul karena tidak ada data populasi yang disampaikan atau tingkat perolehan pengisian survei tidak mencapai target minimal yang ditetapkan KPK untuk dapat diterbitkan Indeksnya*

Keterangan:		
	Terjaga	Indeks 78,00 - 100,00
	Waspada	Indeks ≥73,00 - 77,99
	Rentan	Indeks <73,00

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2025

Gedung Menara Thamrin Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3,
RT.2/RW.1, Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta
Pusat, DKI Jakarta 10250